

LAPORAN *SURVEILLANCE*
PERBANKAN INDONESIA
LSPI
TW IV 2024

LAPORAN *SURVEILLANCE* PERBANKAN INDONESIA

TW IV 2024

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan - Otoritas Jasa Keuangan



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan IV-2024 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Kami berharap agar pembaca dan pengguna laporan ini dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari data dan informasi maupun analisis/ulasan yang disajikan.

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia Triwulan IV-2024 ini memuat *overview* dan analisis kondisi perekonomian global maupun domestik, serta kaitannya terhadap perkembangan kinerja, penyaluran kredit dan/atau pembiayaan, dan profil risiko yang dihadapi perbankan. Selain itu, dalam laporan ini tercakup juga kebijakan perbankan yang diterbitkan oleh OJK pada periode laporan, perkembangan kelembagaan perbankan, serta koordinasi antar lembaga terkait perbankan. Pada laporan ini juga disajikan pembahasan khusus dengan topik “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Meningkatkan Kontribusi Perbankan dalam Perekonomian”.

Secara umum, pada periode laporan, kondisi perekonomian global cenderung beragam di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global terhadap kebijakan yang akan diterapkan Presiden AS terpilih, Donald Trump. Di sisi lain, Eropa, UK, dan Tiongkok masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Laju penurunan inflasi global yang terus berlanjut khususnya inflasi di negara maju seperti AS, mendorong beberapa bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga. Pada bulan Desember, The Fed kembali memangkas FFR sebesar 25 bps menjadi 4,50% melanjutkan tren pemotongan suku bunga sebelumnya yang dilakukan pada bulan September 2024, setelah sebelumnya bertahan di level tinggi. Selain itu, perlu diperhatikan juga faktor risiko seperti eskalasi *trade war* dan potensi *capital outflow* utamanya dari *Emerging Market*. Hal ini dipicu antara lain oleh rencana kebijakan perdagangan dari Presiden Trump yang juga akan mempengaruhi sentimen pasar keuangan dan pasar saham global. Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diselimuti ketidakpastian, pada triwulan IV-2024 ekonomi domestik masih mampu tumbuh kuat dibandingkan triwulan III-2024, meskipun sedikit menurun jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2024 antara lain ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta ekspor impor barang dan jasa yang tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) melambat dibandingkan triwulan IV tahun lalu.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga tecermin pada indikator perbankan di triwulan IV-2024 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 10,39% (yoy), sedikit meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (10,38%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi yang baik sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat serta prospek ekonomi yang baik. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 4,48% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (3,73%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 112,87% dan 25,59%, jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 26,69% meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 9,89% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL gross yang menurun menjadi sebesar 2,08% dan NPL net cukup stabil menjadi 0,74%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik kendati pertumbuhan kredit/pembiayaan serta DPK relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga masih cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 30,96% dan 23,78%.

permodalan juga masih cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 30,96% dan 23,78%.

Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko akibat semakin intensifnya *trade war*, ketidakpastian penurunan laju suku bunga, perkembangan ekonomi global, serta kenaikan tensi geopolitik. Kondisi ketidakpastian global ini dapat berpotensi meningkatkan tekanan pada ekonomi domestik dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Adapun terkait kredit yang direstrukturisasi juga mengalami penurunan dengan jumlah yang relatif kecil yang berubah menjadi NPL. Hal ini sejalan dengan OJK yang senantiasa menghimbau perbankan untuk memperhatikan kualitas pelaksanaan restrukturisasi sekaligus terus mengkaji prospek pemulihan debitur. Namun demikian, bank diminta untuk tetap melakukan pengawasan dan *monitoring* yang ketat untuk mencegah timbulnya pemburukan kredit di masa depan. Selain itu, perbankan juga didorong untuk meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga *coverage* CKPN secara memadai. Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan *stress test* dan asesmen terhadap kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit akibat perubahan kondisi makro ekonomi. Selain itu, ketahanan bank dalam menjaga likuiditas juga terus didorong dan dipantau, utamanya dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi di masa mendatang.

OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan diiringi dengan penguatan regulasi. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan beragam ketentuan perbankan berupa sebelas POJK, lima SEOJK, dan satu surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Adapun ketentuan perbankan tersebut mengatur antara lain integritas pelaporan keuangan bank, perubahan ketentuan LCR dan NSFR, Rahasia Bank, Tata Kelola BPR, Pelaporan dan Transparansi BPR, dan Surat Tindak Lanjut Transisi JIBOR. Di samping itu, OJK juga terus aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pemantauan OJK terhadap perkembangan dan dinamika ekonomi global serta dampaknya kepada ekonomi domestik dan perbankan Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan secara individual yang intensif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, OJK juga meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential banking*), profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk melalui penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Mei 2025



Dian Ediana Rae
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Ringkasan Eksekutif	ix
Infografis	xi

Bab 1

Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

1. Perekonomian Global	3
2. Perekonomian Domestik	7

Bab 2

Kinerja Industri Perbankan Nasional

1. Kinerja Bank Umum	15
2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	22
3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	24

Bab 3

Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

A. Penyaluran Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)	29
1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	29
2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	32
3. Perkembangan Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM	37
B. Penyaluran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS	38
1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	38
2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)	39

Daftar Box

Boks 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Meningkatkan Kontribusi Perbankan dalam Perekonomian	85
---	----

Bab 4

Profil Risiko Perbankan

1. Risiko Kredit	43
2. Risiko Pasar	52
3. Risiko Likuiditas	55
4. Risiko Hukum	56

Bab 5

Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

1. Pengaturan Perbankan	61
2. Kelembagaan Perbankan	69

Bab 6

Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan	77
2. Koordinasi Bilateral	79
3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional	80

Lampiran

I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko	105
II. <i>Glossary</i>	107

Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum	15
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum	16
Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan	16
Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank	18
Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar	18
Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum	20
Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum	21
Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum	21
Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS	22
Tabel 10 Indikator Umum BPR	23
Tabel 11 Indikator Umum BPRS	25
Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi	32
Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi (Spasial)	37
Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank	38
Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi	39
Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)	40
Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit	44
Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	45
Tabel 19 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan	45
Tabel 20 Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank	45
Tabel 21 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Juni 2024	51
Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori	54
Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan	56
Tabel 24 Statistik Penanganan Penyimpangan Ketentuan Perbankan	57
Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	57
Tabel 26 Jaringan Kantor BUK	69
Tabel 27 Jaringan Kantor BPR	70
Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah	72
Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS	73

Daftar Grafik

Grafik 1 Inflasi Konsumen	4
Grafik 2 Suku Bunga Acuan	4
Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	5
Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara	5
Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas	7
Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran	7
Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor	10
Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia	10
Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha	11
Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum	16
Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen	17
Grafik 12 Pergerakan DPK berdasarkan Valuta	17
Grafik 13 Kredit per Valuta	18
Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	19
Grafik 15 Perkembangan Aset BPR	23
Grafik 16 Perkembangan DPK BPR	23
Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan	24
Grafik 18 Tren Aset BPRS	25
Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS	25
Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS	26
Grafik 21 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi	32
Grafik 22 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi (Spasial)	36
Grafik 23 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM	38
Grafik 24 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i>	43
Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit	43
Grafik 26 Pertumbuhan CKPN	44
Grafik 27 Tren Kredit Restrukturisasi	44
Grafik 28 Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi	49
Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi	49
Grafik 30 Tren Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)	51
Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index	52
Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar	53
Grafik 33 <i>Spread Yield</i> UST dan SBN	53
Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia	53
Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan	54
Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) berdasarkan Tenor	54
Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB	55
Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta	55
Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK	55
Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR	56
Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB	56
Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK	70
Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR	71
Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	71
Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris	72
Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS	73
Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS	73

Ringkasan Eksekutif

Secara umum, pada triwulan IV-2024, kondisi perekonomian global cenderung beragam di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global terhadap kebijakan yang akan diterapkan Presiden AS terpilih, Donald Trump. Di sisi lain, Eropa, UK, dan Tiongkok masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Laju penurunan inflasi global yang terus berlanjut khususnya inflasi di negara maju seperti AS, mendorong beberapa bank sentral melakukan pemangkasan suku bunga. Pada bulan Desember, The Fed kembali memangkas FFR sebesar 25 bps menjadi 4,50% melanjutkan tren pemotongan suku bunga sebelumnya yang dilakukan pada bulan September 2024, setelah sebelumnya bertahan di level tinggi. Adapun pada tahun 2025, The Fed memberikan sinyal adanya kemungkinan pengetatan kebijakan di masa mendatang (*hawkish cut*). Selain itu, perlu diperhatikan juga potensi risiko seperti eskalasi *trade war* dan potensi *capital outflow* utamanya dari *Emerging Market*. Hal ini dipicu antara lain oleh rencana kebijakan perdagangan dari Presiden Trump melalui penerapan tarif impor yang cenderung agresif utamanya terhadap negara Tiongkok yang juga akan mempengaruhi sentimen pasar keuangan dan pasar saham global. Di tengah kondisi perekonomian global yang masih diselimuti ketidakpastian, pada triwulan IV-2024 ekonomi domestik masih mampu tumbuh kuat dibandingkan triwulan III-2024, meskipun sedikit menurun jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2024 antara lain ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta ekspor impor barang dan jasa yang tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) melambat dibandingkan triwulan IV tahun lalu.

Ekonomi domestik yang tetap kuat juga tecermin pada indikator perbankan di triwulan IV-2024 sebagaimana terlihat pada pertumbuhan kredit (bank umum) yang masih cukup baik yaitu sebesar 10,39% (yoy), sedikit meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya (10,38%, yoy). Pertumbuhan kredit tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dari segmen korporasi yang baik sejalan dengan penjualan yang baik dan kemampuan bayar yang kuat serta prospek ekonomi yang baik. Di sisi lain, DPK juga masih tumbuh yaitu sebesar 4,48% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya (3,73%, yoy) sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Hal ini tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 112,87% dan 25,59%, jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%. Tingkat permodalan juga cukup solid dengan CAR sebesar 26,69% meskipun menurun dari tahun sebelumnya didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 9,89% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan kredit, dan melampaui pertumbuhan modal. Risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio NPL *gross* yang menurun menjadi sebesar 2,08% dan NPL net cukup stabil menjadi 0,74%. Sejalan dengan kinerja bank umum, kinerja BPR dan BPRS juga cukup baik kendati pertumbuhan kredit/pembiayaan serta DPK relatif melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio permodalan juga masih cukup solid dengan CAR BPR dan BPRS masing-masing sebesar 30,96% dan 23,78%.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan, OJK senantiasa berupaya memperkuat mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan diiringi dengan penguatan regulasi. Dalam penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan beragam ketentuan perbankan berupa 11 POJK, lima SEOJK, dan satu surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. Adapun ketentuan perbankan tersebut mengatur antara lain integritas pelaporan keuangan bank, perubahan ketentuan LCR dan NSFR, Rahasia Bank, Tata Kelola BPR, Pelaporan dan Transparansi BPR, dan Surat Tindak Lanjut Transisi JIBOR. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Halaman ini sengaja dikosongkan

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

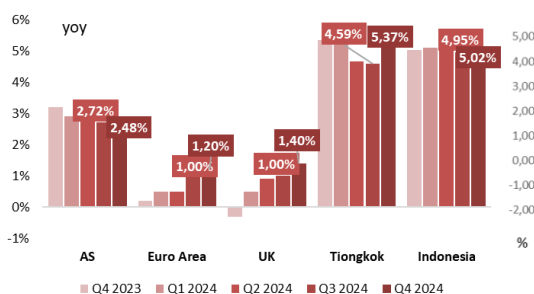
Triwulan IV 2024

Ekonomi Global

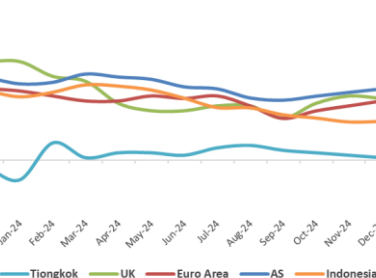


- Kondisi perekonomian global cenderung beragam di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global terhadap kebijakan yang akan diterapkan Presiden AS terpilih, Donald Trump. Di sisi lain Eropa, UK, dan Tiongkok masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Meski begitu, masing-masing negara masih banyak menghadapi tantangan seperti konsumsi masih lesu di Eropa, kinerja manufaktur UK yang masih lemah dan krisis properti yang masih membayangi Tiongkok.
- Laju inflasi global juga cenderung beragam, namun beberapa bank sentral mengambil kebijakan pemotongan suku bunga. Pada bulan Desember, The Fed akhirnya memangkas FFR sebesar 25 bps menjadi 4,50% setelah pemotongan suku bunga sebelumnya yang dilakukan pada bulan September sekaligus memberikan sinyal bahwa adanya kemungkinan pengetatan kebijakan di masa mendatang (*hawkish cut*).
- Faktor risiko lain yang perlu diperhatikan yaitu eskalasi *trade war* dan potensi *capital outflow* utamanya dari *Emerging Market*. Hal ini dipicu oleh rencana kebijakan Presiden Trump yang juga akan mempengaruhi sentimen pasar keuangan dan pasar saham global. Selain itu, tensi geopolitik di Timur Tengah juga masih berlanjut.

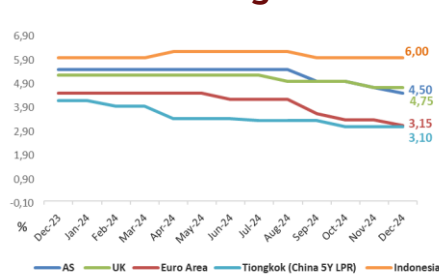
Pertumbuhan Ekonomi



Inflasi Global



Suku Bunga Global

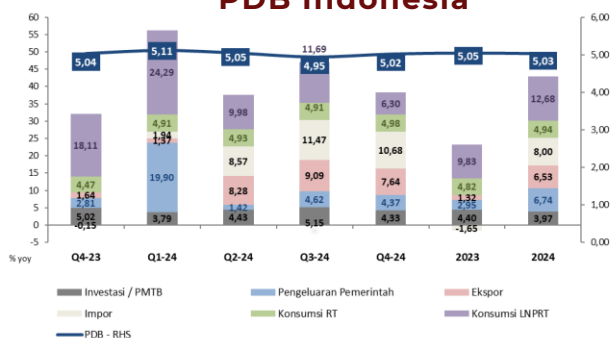


Ekonomi Domestik

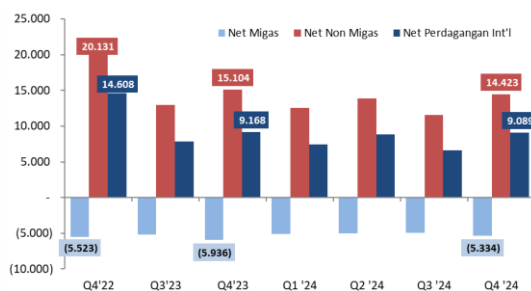
- Ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 5,02% (yoy). Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (5,04%), namun lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2024 yaitu 4,95%. Pertumbuhan ekonomi domestik ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, serta ekspor impor barang dan jasa yang tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan investasi atau penanaman modal tetap bruto (PMTB) melambat dibandingkan triwulan IV tahun lalu.
- Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2024 sebesar 127,7 meningkat dari 123,8 pada tahun lalu. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen dalam enam bulan ke depan. Meski begitu, beberapa sektor yang memiliki porsi besar terhadap PDB masih tumbuh melambat seperti sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dan sektor konstruksi.



PDB Indonesia



Neraca Perdagangan Indonesia



INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan IV 2024

KINERJA



Bank Umum



Bank Umum
Konvensional



Bank Umum
Syariah



Aset

5,87% (yoy)

5,91% (yoy)

Rp12.461 T



DPK

3,73% (yoy)

4,48% (yoy)

Rp8.837 T



Kredit

10,38% (yoy)

10,39% (yoy)

Rp7.827 T



CAR

27,65%

26,69%



ROA

2,74%

2,69%

TW IV-23

TW IV-24

5,57% (yoy)

5,60% (yoy)

Rp11.769 T

3,46% (yoy)

4,18% (yoy)

Rp8.326 T

10,18% (yoy)

10,30% (yoy)

Rp7.414 T

27,75%

26,76%

2,78%

2,72%

11,82% (yoy)

11,75% (yoy)

Rp665 T

8,60% (yoy)

9,75% (yoy)

Rp511 T

14,19% (yoy)

12,18% (yoy)

Rp413 T

25,41%

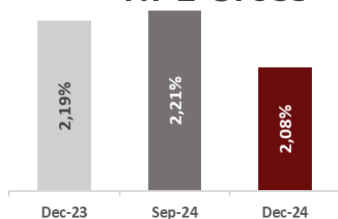
25,30%

1,88%

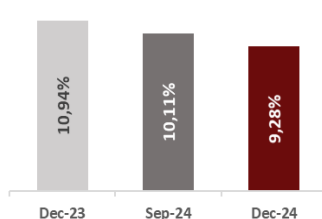
2,07%

Risiko Kredit

NPL Gross

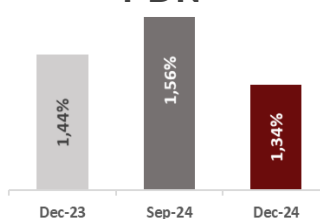


LaR



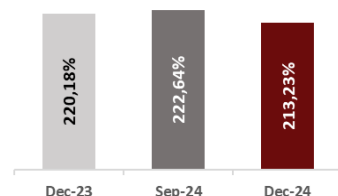
Risiko Pasar

PDN

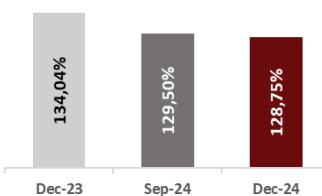


Risiko Likuiditas

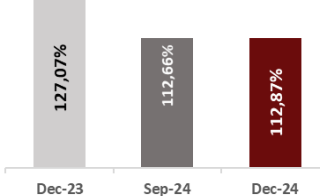
LCR



NSFR



AL/NCD



**PROFIL
RISIKO
BANK
UMUM**

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan IV 2024

KINERJA						
	Aset	DPK	Kredit	CAR	ROA	
 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	6,96% (yoy)	8,64% (yoy)	8,89% (yoy)	29,98%	1,00%	TW IV-23
	4,97% (yoy)	4,02% (yoy)	5,47% (yoy)	30,96%	1,46%	TW IV-24
	Rp205 T	Rp143 T	Rp148 T			
 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)	14,98% (yoy)	13,56% (yoy)	17,84% (yoy)	23,21%	2,05%	
	8,00% (yoy)	10,31% (yoy)	11,51% (yoy)	23,78%	1,51%	
	Rp25 T	Rp17 T	Rp19 T			

KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN IV 2024

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL DIUNDANGKAN/ PENETAPAN	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 15 Tahun 2024	Integritas Pelaporan Keuangan Bank	9 Oktober 2024	Bank Umum dan BPR
POJK Nomor 19 Tahun 2024	Perubahan atas POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>)	8 November 2024	Bank Umum Konvensional
POJK Nomor 20 Tahun 2024	Perubahan atas POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) bagi Bank Umum	8 November 2024	Bank Umum
POJK Nomor 23 Tahun 2024	Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR dan BPR Syariah	29 November 2024	BPR dan BPRS

INFOGRAFIS

Laporan *Surveillance* Perbankan Indonesia

Triwulan IV 2024

KETENTUAN PERBANKAN PADA TRIWULAN IV 2024

KETENTUAN	PERIHAL	TANGGAL DIUNDANGKAN/ PENETAPAN	OBJEK PENGATURAN
POJK Nomor 24 Tahun 2024	Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah	29 November 2024	BPRS
POJK Nomor 25 Tahun 2024	Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah	29 November 2024	BPRS
POJK Nomor 26 Tahun 2024	Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan (POJK PKUP)	13 Desember 2024	BPR dan BPRS
POJK Nomor 28 Tahun 2024	Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku	17 Desember 2024	LJK
POJK Nomor 30 Tahun 2024	Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	23 Desember 2024	Bank Umum, BPR, dan BPRS
POJK Nomor 31 Tahun 2024	Perintah Tertulis	23 Desember 2024	LJK
POJK Nomor 44 Tahun 2024	Rahasia Bank	27 Desember 2024	Bank Umum, BPR, dan BPRS
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024	Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat	18 Oktober 2024	BPR
SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024	Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	26 November 2024	Bank Umum Syariah
SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2024	Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat	1 Desember 2024	BPR
SEOJK Nomor 17/SEOJK.03/2024	Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah	1 Desember 2024	BPRS
SEOJK Nomor 21/SEOJK.03/2024	Pedoman Akuntansi	24 Desember 2024	BPR
Surat KEPP Nomor S-33/D.03/2024	Tindak Lanjut Transisi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)	10 Oktober 2024	Bank Umum Konvensional

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Halaman ini sengaja dikosongkan

1 Overview dan Analisis Perekonomian Global dan Domestik

Pada triwulan IV-2024, kondisi ekonomi global cenderung beragam di tengah sentimen pasar keuangan dan pasar saham global terhadap kebijakan yang akan diterapkan Presiden AS terpilih, Donald Trump. Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi domestik masih tetap terjaga antara lain ditopang oleh pertumbuhan ekspor impor barang dan jasa yang tumbuh tinggi, serta komponen konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah yang tumbuh tinggi dibandingkan triwulan-IV tahun sebelumnya.

1. Perekonomian Global

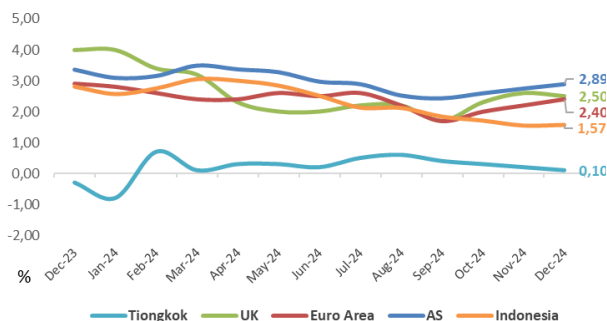
Pada triwulan IV-2024, kondisi pasar keuangan dan perekonomian global cenderung *mixed*. Sentimen pasar keuangan dan pasar saham global dipengaruhi oleh rencana kebijakan Presiden AS terpilih, Donald Trump yang meningkatkan ekspektasi terhadap perbaikan kinerja ekonomi AS. Di sisi lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin intensifnya *trade war*, menguatnya USD, dan menyebabkan *capital outflow* utamanya dari *Emerging Market*. Kondisi tensi geopolitik juga masih cukup tinggi meskipun sempat mereda di Timur Tengah setelah adanya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Namun menjelang akhir tahun 2024, kedua kubu tersebut saling menyalahkan karena gagalnya gencatan senjata di Gaza meski sebelumnya telah ada kesepakatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar kesepakatan kesepahaman yang telah dicapai. Sementara menurut Hamas, Israel menetapkan beberapa syarat baru antara lain terkait penarikan pasukan dan pertukaran tahanan. Dalam beberapa hari terakhir, AS dan mediator dari Qatar dan

Mesir telah berupaya maksimal untuk menyelesaikan perjanjian antara kedua kubu. Hamas menuntut agar perang secara total diakhiri, namun Israel menginginkan untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza sebelum gencatan senjata. Meski perundingan sedang berlangsung, Israel tetap terus melancarkan operasi militernya termasuk di tiga rumah sakit. Sebelumnya Israel melakukan serangan udara yang salah satunya menghantam bekas sekolah yang dijadikan tempat pengungsian di pinggiran kota Gaza.

Laju inflasi global yang beragam, seperti AS dan Eropa yang sedang mengalami peningkatan sementara di UK dan Tiongkok melambat, mendorong beberapa bank sentral melakukan pertemuan guna membahas kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Namun demikian, ketidakpastian kondisi ekonomi global masih terjadi seiring kekhawatiran yang menyelimuti pasar di tengah kondisi politik AS. Presiden AS, Donald Trump menyampaikan beberapa program kerjanya dengan salah satu program utamanya yaitu penerapan tarif impor untuk seluruh negara, serta tarif lebih tinggi

untuk barang impor dari Tiongkok, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Trump juga berencana untuk mengenakan pajak 100% terhadap negara BRICS apabila merealisasikan untuk menciptakan mata uang baru. Saat ini, tingkat Inflasi AS sebesar 2,89% telah sesuai dengan ekspektasi pasar, namun berada jauh di atas target The Fed sebesar 2%. Meskipun demikian, pada Desember 2024 The Fed memberikan kado akhir tahun bagi pasar dengan memangkas FFR sebesar 25 bps menjadi 4,50% setelah pemotongan suku bunga sebelumnya yang dilakukan pada bulan September 2024. Pemangkasan tersebut diumumkan pada FOMC tanggal 18 Desember 2024 dengan bersamaan pemberian sinyal oleh The Fed bahwa adanya kemungkinan pengetatan kebijakan di masa mendatang (*hawkish cut*). Hal tersebut dilakukan untuk meredakan tekanan finansial seiring adanya potensi kebijakan ekonomi pemerintahan baru yang dapat memengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti rencana pemberlakuan tarif impor, pemotongan pajak, dan deportasi massal.

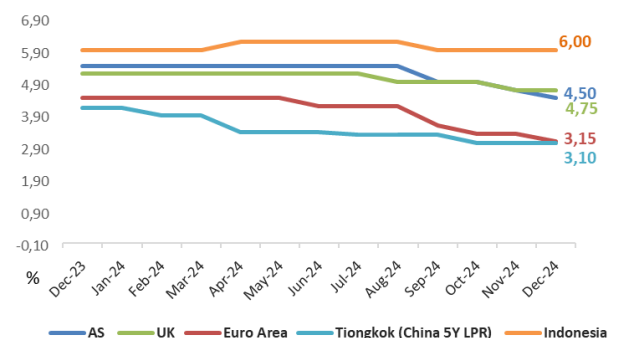
Grafik 1 Inflasi Konsumen



Sumber: Reuters

Meski demikian, reaksi pasar terhadap pengumuman pemotongan FFR beragam, indeks Dow Jones turun lebih dari 1.100 poin yang merupakan penurunan terburuk dalam satu dekade terakhir. Nasdaq dan S&P juga turun tajam sebesar 3,6% dan 2,9%. Selain itu, dolar menguat dan imbal hasil obligasi meningkat.

Grafik 2 Suku Bunga Acuan



Sumber: Reuters

Sejalan dengan The Fed, pada bulan Desember 2024 ECB juga memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya untuk keempat kalinya selama tahun 2024 ini sebesar 25bps menjadi 3,15% atau sesuai perkiraan. Sehingga *Deposit Facility Rate* menjadi 3,00% dan *Marginal Lending Rate* menjadi 3,40%. ECB juga memperkirakan bahwa inflasi akan menurun secara bertahap yaitu sebesar 2,4% pada tahun 2024, sebesar 2,1% pada tahun 2025, dan pada tahun 2026 sebesar 1,9%. Selain itu inflasi inti (tidak termasuk energi dan makanan) juga diperkirakan turun dengan target jangka menengah sebesar 2%. ECB tetap fokus pada target penurunan inflasi menjadi 2% dan akan menyesuaikan kebijakannya berdasarkan data yang masuk. Di sisi lain, pemulihan

ekonomi diproyeksikan melambat dari sebelumnya. PDB tahun 2024, 2025, dan 2026 masing-masing diproyeksikan sebesar 0,7%, 1,1%, dan 1,4%.

Sementara itu, BoE justru memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya pada 4,75%. Hal ini masih sejalan dengan ekspektasi pasar mengingat inflasi IHK, pertumbuhan upah, dan beberapa indikator ekspektasi inflasi telah meningkat yang dapat menambah risiko persistensi inflasi. Hal ini sejalan dengan PboC yang juga memutuskan untuk mempertahankan 1Y LPR pada 3,1% dan 5Y LPR pada 3,6%. Kedua suku bunga tersebut tetap berada pada rekor terendah setelah penurunan suku bunga pada Oktober dan Juli.

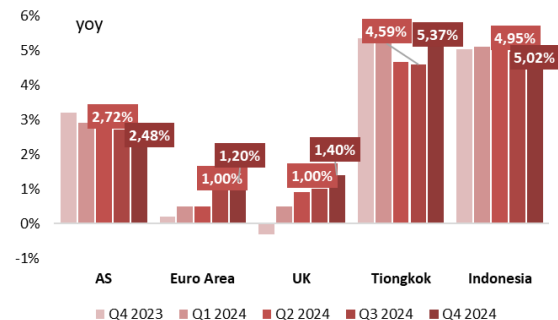
Bank Indonesia pada Desember 2024, memutuskan mempertahankan BI Rate pada level 6,00%. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.

Pada triwulan laporan, perekonomian AS tumbuh 2,48% (yoy) menurun dari triwulan sebelumnya sebesar 2,72% (yoy). Adapun secara triwulanan, pertumbuhan juga menurun menjadi 2,3% (qtq) dari 3,1% (qtq) pada triwulan sebelumnya. PMI Manufaktur AS cenderung meningkat dari bulan sebelumnya meski masih berada pada level kontraksi yaitu sebesar 49,2 atau meningkat dari 48,4 (November 2024). Angka tersebut terus menunjukkan kontraksi di sektor manufaktur yang telah berlangsung sejak awal tahun 2024.

Di sisi lain ekonomi Eropa, UK, dan Tiongkok mengalami pertumbuhan pada triwulan IV-2024 dibandingkan triwulan III-2024. Ekonomi Tiongkok tumbuh 5,37% (yoy) dari 4,70% (yoy) pada triwulan

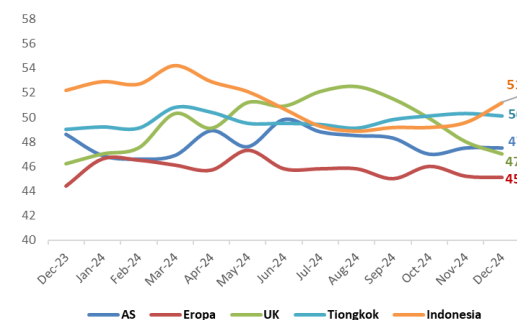
sebelumnya. Ekonomi Tiongkok masih mampu tumbuh di tengah masih presistennya pelemahan sektor properti, ekonomi domestik yang lemah, risiko deflasi dan pembatasan perdagangan dengan Barat.

Grafik 3 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara



Sumber: Trading Economics dan Reuters

Grafik 4 PMI Manufaktur Beberapa Negara



Sumber: Reuters

Pada periode laporan, penjualan ritel Tiongkok secara umum membaik meski masih lebih rendah dari periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih pesimis dan permintaan yang lemah. Tantangan yang dihadapi oleh perekonomian Tiongkok antara lain krisis properti yang masih membayangi dan diperkirakan akan berkepanjangan, Indeks Kepercayaan Konsumen yang melemah pada bulan laporan, permintaan konsumen yang masih lesu, terlebih dengan isu *ageing population*,

yang dapat menghambat pertumbuhan Tiongkok di masa mendatang.

Di sisi lain, Eropa dan UK pada triwulan IV-2024 masih mencatatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Eropa tumbuh sebesar 1,2% (yoy) dari 1,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Beberapa negara yang tergabung dalam zona Eropa mencatatkan pertumbuhan pada triwulan IV ini. Portugal membukukan pertumbuhan tertinggi yaitu 1,5%, disusul oleh Lithuania (0,9%) dan Spanyol (0,8%). Sebaliknya, ekonomi Irlandia berkontraksi 1,3% dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,0%. Sementara Prancis dan Jerman tercatat tumbuh negatif masing-masing -0,1% dan -0,2% pada triwulan IV 2024. Tingkat pertumbuhan secara tahunan (yoy) positif untuk sembilan negara dan negatif pada tiga negara. Sejalan dengan ekonomi Eropa, ekonomi UK pada triwulan IV-2024 mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,40% (yoy) dari 1,00% pada triwulan sebelumnya.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih tertahan, tingkat inflasi di Eropa mencatatkan peningkatan, namun inflasi UK menunjukkan perlambatan. Pada periode Desember 2024, inflasi Eropa sebesar 2,40% meningkat dari triwulan sebelumnya yaitu 1,70%. Berbagai indikator perekonomian di Eropa menunjukkan penurunan seperti aktivitas produksi yang melemah, PMI manufaktur juga mengalami penurunan dan masih di zona kontraksi (<50), serta aktivitas konsumsi yang masih lesu pada November 2024. Sedangkan, tingkat pengangguran di Eropa cukup stagnan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi juga masih tertahan sebagaimana kondisi di

Eropa, namun kondisi perekonomian UK sedikit berbeda. Aktivitas konsumsi di negara ini membaik yang terlihat dari kenaikan *Retail Sales* menjadi 3,50 dari 0,10 di bulan November 2024. Kinerja manufaktur UK masih melemah yang ditunjukkan oleh PMI manufaktur yang menurun dari bulan sebelumnya dan masih konsisten berada di zona kontraksi.

Harga komoditas global pada triwulan IV-2024 secara umum dalam tren peningkatan (yoy) namun masih berfluktuatif karena tidak hanya dipengaruhi permintaan dan penawaran, melainkan juga faktor geopolitik dan perubahan iklim. Pergerakan harga komoditas global hingga Desember 2024 menunjukkan peningkatan yang tercatat pada indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) sebesar 506,43 naik dari 476,55 pada Desember 2023.

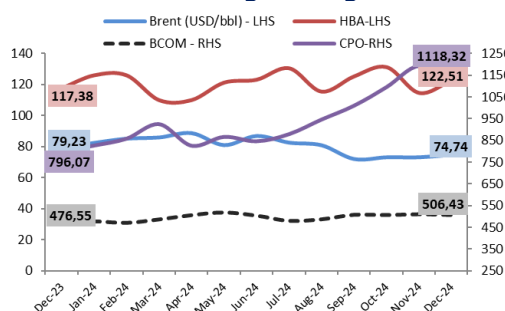
Kinerja harga minyak mentah Brent sepanjang 2024 cukup berfluktuasi. Pada penghujung tahun, harga minyak mentah ditutup pada 74,74 USD/barel setelah turun dari 79,23 USD/barel dari posisi Desember 2023. Meski harga batubara juga berfluktuatif namun pada akhir tahun, batubara mencatatkan kenaikan sebesar 122,51 LHS. Hal ini sejalan dengan harga CPO yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya maupun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Secara umum, penurunan harga komoditas minyak dunia salah satunya dipengaruhi oleh penurunan permintaan dari Tiongkok yang masih mengalami tekanan ekonomi. Selain itu, AS dan negara OPEC lainnya mengalirkan lebih banyak minyak mentah ke pasar global meski pasokan telah mencukupi. Di sisi lain kenaikan harga

batubara utamanya didorong oleh meningkatnya permintaan impor dari Tiongkok yang salah satunya dipicu oleh peningkatan jumlah pembangkit listrik bertenaga batubara disana. Pertumbuhan pembangkit listrik termal (bertenaga batubara) ini melebihi perkiraan awal yang disebabkan pertumbuhan permintaan listrik yang lebih tinggi dari ekspektasi. Selain itu, dari dalam negeri juga meningkatkan produksi batubara yang didorong oleh permintaan kuat dari Tiongkok tersebut dan permintaan domestik.

Peningkatan juga dialami oleh komoditas CPO yang didorong oleh terkonsentrasinya produksi dalam negeri dan Malaysia karena beberapa faktor seperti curah hujan yang terlampaui tinggi mengingat pada kuartal IV merupakan musim hujan di kedua negara utama penghasil CPO tersebut. Dibalik produksi yang tertahan, permintaan untuk CPO kian meningkat salah satunya dikarenakan regulasi biodiesel yang mewajibkan campuran *palm oil* meningkat menjadi 40%.

Grafik 5 Perkembangan Harga Komoditas

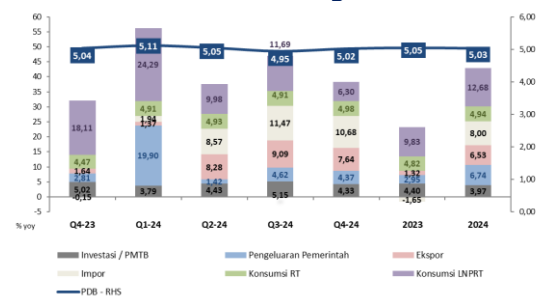


Sumber: Reuters

2. Perekonomian Domestik

Dari sisi domestik, fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal ini sebagaimana tercermin pada ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,02% (yoy) pada triwulan IV-2024 atau tumbuh 5,03% (yoy) secara keseluruhan pada tahun 2024. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 5,04% (yoy) namun meningkat dibandingkan triwulan III-2024 sebesar 4,95% (yoy).

Grafik 6 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Pengeluaran



Sumber: BPS

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi domestik ditopang oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, serta Ekspor dan Impor Barang dan Jasa yang tumbuh lebih tinggi. Sementara itu, pertumbuhan Investasi/Penananaman Modal Tetap Bruto (PMTB) melambat dibandingkan triwulan-IV tahun lalu.

Komponen Investasi atau PMTB (porsi: 31,68% terhadap PDB) yang secara tahunan tumbuh melambat dari 5,02% (yoy) menjadi 4,33% (yoy) menjadi salah satu faktor penyebab tertahannya laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2024. Investasi non bangunan seperti sumber daya hayati atau *Cultivated*

Biological Resources (CBR) dan kendaraan menjadi penyebab utama dari melambatnya pertumbuhan investasi pada periode laporan. Adapun investasi CBR berkontraksi lebih dalam dari -1,46% (yoy) pada triwulan IV-2023 menjadi -11,87% (yoy). Sementara itu, investasi kendaraan yang semula tumbuh positif sebesar 3,20% (yoy) menjadi berkontraksi -4,13% (yoy). Meskipun demikian, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia pada triwulan IV-2024 mencapai Rp452,8 triliun atau meningkat 23,8% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Angka realisasi investasi pada triwulan IV-2024 tersebut merupakan 27,4% dari total target investasi Pemerintah sepanjang 2024 senilai Rp1.650 triliun. Secara kumulatif, realisasi investasi ke dalam negeri selama Januari-Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.714,2 triliun melampaui target yang ditetapkan dengan nilai perolehan investasi asing yang melebihi nilai investasi dalam negeri.

Di sisi lain, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (porsi: 52,52% terhadap PDB) masih menjadi kontributor utama PDB Indonesia. Komponen ini tercatat tumbuh 4,98% (yoy) atau masih melanjutkan tren pertumbuhan di bawah 5% sejak awal tahun 2024 (triwulan-I 2024: 4,91% yoy; triwulan-II 2024: 4,93% yoy; dan triwulan III-2024: 5,07% yoy). Namun demikian, kondisinya sudah cukup membaik dibandingkan triwulan IV-2023 sebesar 4,47% (yoy). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencatatkan kenaikan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran makanan dan minuman selain restoran dari 2,56% (yoy)

pada triwulan IV-2023 menjadi 4,34% (yoy). Sementara itu, komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga/LNPRT (porsi: 1,36% terhadap PDB) tumbuh melambat dari 18,11% (yoy) pada triwulan IV-2023 menjadi 6,30% (yoy).

Secara umum, terjaganya konsumsi domestik dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian seiring pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di berbagai wilayah, mobilitas masyarakat yang tinggi selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta laju inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy) atau terkendali dalam kisaran target $2,5 \pm 1\%$. Selain itu, juga dipengaruhi oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang tetap terjaga di level optimis (>100) sebagaimana tecermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2024 sebesar 127,7. Angka tersebut bahkan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 123,8.

Peningkatan IKK didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini (Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini) dan ekspektasi konsumen dalam enam bulan ke depan (Indeks Ekspektasi Konsumen) yaitu masing-masing dari 113,6 dan 133,9 pada Desember 2023 menjadi 116,0 dan 139,5 pada Desember 2024. Perkembangan IKK yang meningkat ini dapat menjadi sinyal positif terhadap arah pertumbuhan konsumsi domestik. Jika kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi tinggi, maka mereka akan cenderung lebih banyak berbelanja, sehingga mendorong

peningkatan konsumsi. Sebaliknya, jika kepercayaan konsumen menurun, maka mereka akan cenderung lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang, sehingga dapat menghambat pertumbuhan konsumsi.

Sejalan dengan pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang menunjukkan peningkatan, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (porsi: 9,48% terhadap PDB) tumbuh 4,37% (yoy) pada triwulan IV-2024 lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,81% (yoy). Kenaikan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas belanja Pemerintah pada akhir tahun 2024. Dikutip dari situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi belanja Pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meningkat diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial), menjaga stabilitas ekonomi, serta memelihara momentum pertumbuhan melalui pemberian bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP). Berbagai program perlindungan sosial yang diberikan antara lain melalui: Program Keluarga Harapan (PKH); kartu Sembilan Bahan Pokok (Sembako), beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah; bantuan premi BPJS kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM); listrik dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg; subsidi pupuk; serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Demikian halnya dengan, komponen Ekspor Barang dan Jasa yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi yaitu dari 1,64% (yoy) pada triwulan IV-2023 menjadi 7,64% (yoy) pada triwulan IV-2024. Sejalan dengan pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang meningkat, kontribusi komponen tersebut terhadap PDB juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu menjadi 25,14% pada triwulan IV-2024 dari periode yang sama tahun lalu sebesar 23,30%. Kontribusi aktivitas ekspor terhadap PDB pada triwulan IV-2024 yang meningkat dibandingkan tahun lalu menjadi salah satu bukti keberhasilan Indonesia dalam menjalin hubungan perdagangan yang lebih erat dengan berbagai negara di dunia. Pada Desember 2024, nilai ekspor Indonesia kembali tumbuh positif sebesar 4,77% (yoy) setelah berkontraksi -5,85% (yoy) pada Desember 2023. Perkembangan nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh transaksi migas maupun nonmigas yang masing-masing tumbuh sebesar 4,09% (yoy) dan 4,82% (yoy) pada triwulan IV-2024 dari 1,45% (yoy) dan -6,32% (yoy) pada periode yang sama tahun lalu.

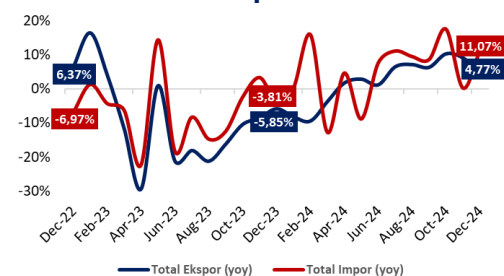
Komoditas utama ekspor nonmigas yang mendorong kenaikan pertumbuhan tersebut adalah produk manufaktur lainnya (porsi: 23,91%) yang tumbuh dari 3,43% (yoy) menjadi 16,42% (yoy). Selaras dengan hal tersebut, komoditas nikel (porsi: 3,64%) dan peralatan listrik (porsi: 3,64%) juga mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi yakni sebesar 53,53% (yoy) dan 45,34% (yoy) dari yang sebelumnya berkontraksi -30,73% (yoy) dan -19,60% (yoy) pada Desember 2023. Sementara itu, kenaikan nilai ekspor migas utamanya dipengaruhi oleh komoditas minyak mentah (porsi:

0,98%) dan gas alam (porsi: 3,59%) yang masing-masing tumbuh sebesar 104,70% (yoy) dan 11,19% (yoy) dari -24,44% (yoy) dan -23,61% (yoy) pada Desember tahun lalu. Sejalan dengan perkembangan komponen ekspor, impor (porsi: 20,98%) juga tumbuh positif sebesar 10,68% (yoy) setelah berkontraksi -0,15% (yoy) pada triwulan IV-2023. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya nilai impor pada Desember 2024 yang kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 11,07% (yoy) dari -3,81% (yoy) pada triwulan IV-2023. Peningkatan nilai impor tersebut didorong oleh transaksi nonmigas yang tumbuh dari -5,57% (yoy) menjadi 13,92% (yoy).

Adapun komoditas impor nonmigas utama yang mendorong peningkatan tersebut antara lain: produk manufaktur lainnya (porsi: 19,87%); mesin untuk keperluan khusus (porsi: 6,70%); mesin untuk keperluan umum (porsi: 7,26%); dan perlengkapan elektrik (porsi: 5,82%). Komoditas produk manufaktur lainnya dan mesin untuk keperluan khusus masing-masing tumbuh dari -8,51% (yoy) dan -17,20% (yoy) pada triwulan IV-2023 menjadi 23,09% (yoy) dan 21,92% (yoy). Sementara itu, komoditas mesin untuk keperluan umum dan perlengkapan elektrik masing-masing tumbuh dari -2,90% (yoy) dan -16,94% (yoy) menjadi 4,31% (yoy) dan 32,89% (yoy). Sebaliknya, transaksi impor migas pada periode laporan justru berkontraksi -2,24% (yoy) dari 5,35% (yoy). Penurunan nilai impor tersebut dipengaruhi oleh komoditas hasil minyak (porsi: 0,11%) yang berkontraksi -2,62% (yoy) dari 12,19% (yoy).

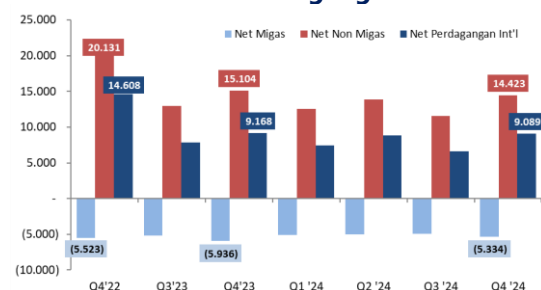
Nilai ekspor yang lebih tinggi daripada impor pada periode laporan mendorong neraca perdagangan melanjutkan surplus selama 56 bulan berturut-turut. Pada Desember 2024, surplus neraca perdagangan tercatat sebesar USD2,24 miliar (defisit migas USD1,76 miliar dan surplus nonmigas USD4 miliar). Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan mencapai USD32,01 miliar selama periode Januari-Desember 2024 atau berkontraksi -13,27% (yoy) dari USD36,91 miliar dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Grafik 7 Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor



Sumber: BPS

Grafik 8 Neraca Perdagangan Indonesia



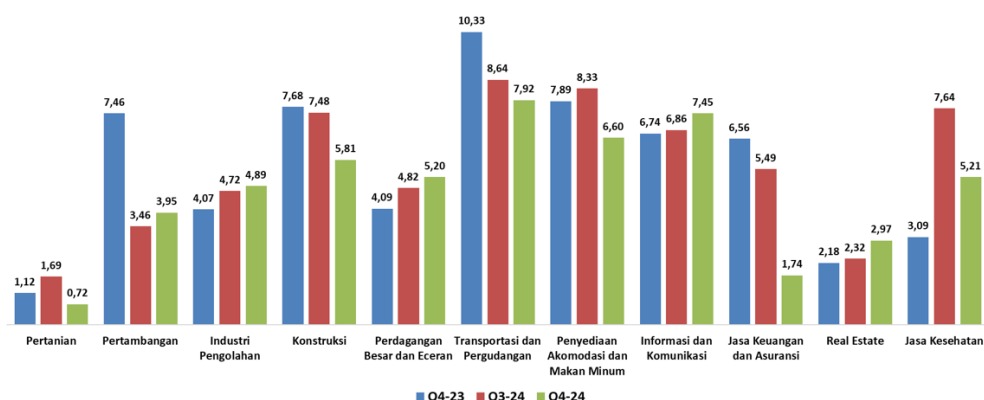
Sumber: BPS

Dilihat berdasarkan lapangan usaha, terdapat beberapa sektor dengan kontribusi cukup besar terhadap PDB (>5%) yang tumbuh melambat secara tahunan pada periode laporan. Pertama, sektor pertambangan dan penggalian (porsi: 9,44%) tumbuh 3,95% (yoy) lebih

rendah dari 7,46% (yoy) pada triwulan IV-2023. Kedua, sektor transportasi dan pergudangan (porsi: 6,19%) tumbuh melambat dari 10,33% (yoy) menjadi 7,92% (yoy). Ketiga, sektor konstruksi (porsi: 10,42%) yang tumbuh melambat dari 7,68% (yoy) menjadi 5,81% (yoy). Kemudian diikuti dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (porsi: 11,31%) yang tumbuh 0,72% (yoy) turun dari 1,12% (yoy). Selain keempat sektor tersebut, terdapat beberapa sektor lainnya yang menjadi penyumbang melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 meskipun porsinya terhadap PDB <5%. Pertama, sektor pengadaan listrik dan gas (porsi: 1,03%) tumbuh 3,42% (yoy) menurun dari 8,68% (yoy). Kedua, sektor jasa keuangan dan asuransi (porsi: 4,04%) tumbuh melambat dari 6,56% (Yoy) menjadi 1,74% (yoy). Ketiga, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (porsi:0,06%) yang tumbuh melandai sebesar 1,06% (yoy) dari 4,66% (yoy). Keempat, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (porsi:

2,69%) yang pertumbuhannya turun dari 7,89% (yoy) menjadi 6,60% (yoy). Terakhir, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (porsi: 2,98%) yang tumbuh lebih rendah dari 1,61% (yoy) menjadi 1,19% (yoy). Meskipun demikian, terdapat beberapa sektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2023, antara lain: industri pengolahan (porsi: 19,13%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (porsi: 13,03%); informasi dan komunikasi (porsi: 4,34%); real estate (porsi: 2,33%), serta jasa kesehatan (porsi: 1,31%). Sektor industri pengolahan tumbuh meningkat dari 4,07% (yoy) menjadi 4,89% (yoy). Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh dari 4,09% (yoy) menjadi 5,20% (yoy). Sektor informasi dan komunikasi tumbuh meningkat dari 6,74% (yoy) menjadi 7,45% (yoy). Sektor real estate tumbuh dari 2,18% (yoy) menjadi 2,97% (yoy). Terakhir, sektor jasa kesehatan tumbuh dari 3,09% (yoy) menjadi 5,21% (yoy).

Grafik 9 Pertumbuhan PDB Indonesia berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: BPS

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

2 Kinerja Industri Perbankan Nasional

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan IV-2024 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai. Fungsi intermediasi perbankan masih cukup baik ditandai dengan kredit dan DPK bank umum yang tumbuh meningkat dari tahun sebelumnya. Selain itu, rentabilitas dan efisiensi perbankan juga masih terjaga meskipun menurun dari tahun sebelumnya.

1. Kinerja Bank Umum

Secara umum ketahanan perbankan pada triwulan IV-2024 cukup terjaga, tecermin dari tingkat permodalan bank yang cukup solid dan ditopang ketersediaan likuiditas yang memadai dengan rasio AL/NCD dan AL/DPK tercatat jauh di atas *threshold* meskipun mengalami penurunan, utamanya dipengaruhi oleh penyaluran kredit yang tumbuh melebihi penghimpunan dana. Hal ini juga tecermin pada fungsi intermediasi perbankan yang membaik, dengan kredit

dan DPK yang masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Rentabilitas perbankan tercatat sedikit melambat tecermin dari rasio ROA yang sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan melambatnya rentabilitas, perlu diperhatikan juga efisiensi perbankan yang tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya tecermin dari BOPO yang meningkat sebesar 238 bps dari tahun sebelumnya.

Tabel 1 Indikator Umum Bank Umum

Indikator	2023	2024		qtq		yoy	
	Des	Sep	Dec	Sep'24	Dec'24	Des '23	Dec '24
Jumlah Bank	105	105	105	(1)	-	(1)	-
BUK	92	91	91	(1)	-	(1)	(1)
BUS	13	14	14	-	-	-	1
Total Aset (Rp Miliar)	11,765,838	12,147,173	12,460,955	0.82%	2.58%	5.87%	5.91%
BUK	11,171,129	11,527,363	11,796,344	0.75%	2.33%	5.57%	5.60%
BUS	594,709	619,810	664,611	2.13%	7.23%	11.82%	11.75%
Kredit (Rp Miliar)	7,090,243	7,579,250	7,827,148	1.35%	3.27%	10.38%	10.39%
BUK	6,721,867	7,178,573	7,413,892	1.27%	3.28%	10.18%	10.30%
BUS	368,376	400,677	413,255	2.80%	3.14%	14.19%	12.18%
DPK (Rp Miliar)	8,457,929	8,720,782	8,837,242	-0.01%	1.34%	3.73%	4.48%
BUK	7,991,997	8,237,476	8,325,868	-0.12%	1.07%	3.46%	4.18%
BUS	465,932	483,306	511,374	1.82%	5.81%	8.60%	9.75%
- Giro (Rp Miliar)	2,662,551	2,703,615	2,751,373	-1.36%	1.77%	4.57%	3.34%
BUK	2,588,476	2,619,296	2,672,964	-1.49%	2.05%	4.30%	3.26%
BUS	74,075	84,319	78,409	3.06%	-7.01%	15.06%	5.85%
- Tabungan (Rp Miliar)	2,669,183	2,764,829	2,850,242	0.68%	3.09%	2.06%	6.78%
BUK	2,492,249	2,581,786	2,653,336	0.61%	2.77%	1.71%	6.46%
BUS	176,935	183,043	196,906	1.70%	7.57%	7.32%	11.29%
- Deposito (Rp Miliar)	3,126,195	3,252,337	3,235,627	0.53%	-0.51%	4.48%	3.50%
BUK	2,911,273	3,036,394	2,999,568	0.47%	-1.21%	4.25%	3.03%
BUS	214,922	215,944	236,060	1.45%	9.32%	7.58%	9.83%

Sumber: SPI Desember 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

1.1 Aset Bank Umum

Aset Bank Umum tumbuh 5,91% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,87% (yoy). Jika dilihat dari jenis usaha bank, peningkatan didorong oleh pertumbuhan BUK yang tumbuh 5,60% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar 5,57% (yoy). Di sisi lain, BUS meskipun masih tumbuh tinggi dua digit sebesar 11,75% (yoy), tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,82% (yoy).

Aset BUS masih tergolong kecil (5,33%) dari total aset bank umum. Meskipun demikian, porsi aset BUS tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,05%.

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan aset hanya terjadi pada kelompok bank BUSN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar 44,76% yang tumbuh 7,01% (yoy) dari 5,86% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu kelompok Bank lain tercatat melambat. Kelompok Bank BUMN yang merupakan kelompok bank dengan porsi terbesar terdua (42,35%) juga tercatat tumbuh melambat 5,24% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,05% (yoy).

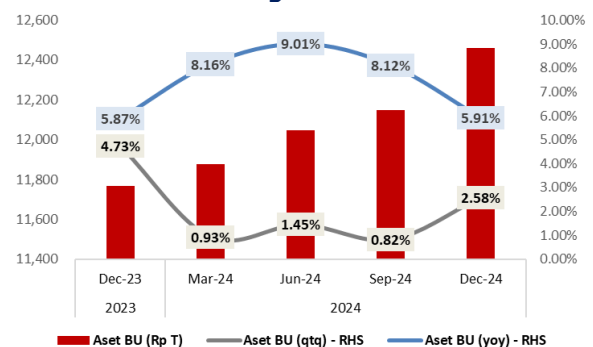
Aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset empat Bank Umum terbesar mencapai 49,93% atau hampir setengah dari aset perbankan Indonesia, dan total aset 20 Bank Umum terbesar mencapai 79,67% dari aset perbankan.

Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset Bank Umum

Periode	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Des '23	50.61%	79.70%
Mar '24	50.14%	79.54%
Jun '24	49.89%	79.49%
Sep '24	49.73%	79.43%
Dec '24	49.93%	79.67%

Sumber: OJK

Grafik 10 Perkembangan Aset Bank Umum



Sumber: SPI Desember 2024

Tabel 3 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '23	Sep '24	Des '24		Sep '24	Des '24	Des '23	Des '24
BUMN	5,014,378	5,095,028	5,276,888	42.35%	0.36%	3.57%	6.05%	5.24%
BUSN	5,211,779	5,453,386	5,577,216	44.76%	1.41%	2.27%	5.86%	7.01%
BPD	985,415	1,016,463	1,021,878	8.20%	2.22%	0.53%	5.02%	3.70%
KCBLN	554,266	582,296	584,973	4.69%	-2.89%	0.46%	5.94%	5.54%
Total	11,765,838	12,147,173	12,460,955	100%	0.82%	2.58%	5.87%	5.91%

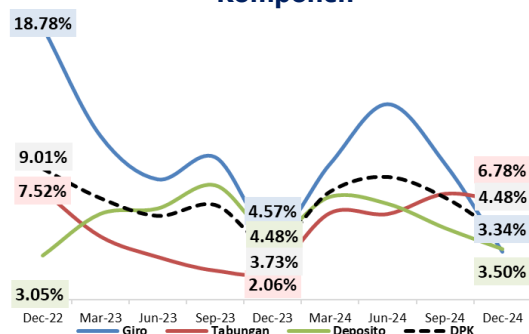
Sumber: SPI Desember 2024

1.2 Sumber Dana Bank Umum

Pada periode laporan, DPK Bank Umum tumbuh 4,48% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,73% (yoy). Berdasarkan jenis usaha, DPK tercatat meningkat baik pada BUK maupun BUS. DPK BUK menjadi pendorong utama kenaikan DPK pada bulan laporan, yaitu sebesar 4,18% (yoy) dari 3,46% (yoy) pada Dec-23, atau meningkat Rp333,87 T.

Peningkatan pertumbuhan DPK didorong oleh peningkatan Tabungan (porsi 32,25%) yang tercatat tumbuh 6,78% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 2,06% (yoy). Di sisi lain, Deposito dan Giro (porsi masing-masing 36,61% dan 31,13%) justru tumbuh melambat 3,50% (yoy) dan 3,34% (yoy).

Grafik 11 Tren Pertumbuhan DPK per Komponen

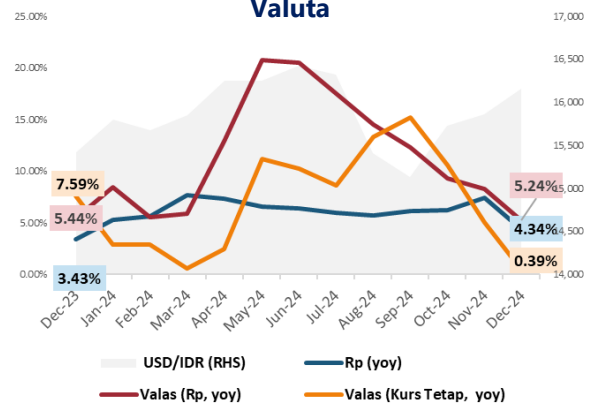


Sumber: SPI Desember 2024

Berdasarkan valuta, DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,36%) tercatat tumbuh 4,34% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 3,43% (yoy). Sementara itu, DPK Valas tercatat tumbuh 5,24% (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,44% (yoy). Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tercatat masih tumbuh sebesar 0,39% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya

yang tumbuh 7,59% (yoy). Selisih tersebut menandakan bahwa secara umum DPK Valas memang melambat, meskipun depresiasi kurs Rupiah pada periode laporan mendorong peningkatan nilai DPK Valas.

Grafik 12 Pergerakan DPK Berdasarkan Valuta



Sumber: SPI Desember 2024

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK terdapat pada kelompok Bank BUSN sebesar 44,97%, diikuti BUMN sebesar 43,71%. DPK BUSN tumbuh meningkat menjadi 6,10% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 4,16% (yoy), yang secara umum mendorong pertumbuhan DPK. Namun demikian, DPK BUMN tercatat tumbuh sedikit melambat 3,07% (yoy) dari 4,65% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu Daerah Khusus (DKJ) Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 77,47%. Porsi terbesar berada di Daerah Khusus Jakarta (52,50%) diikuti Jawa Timur (8,73%) dan Jawa Barat (7,77%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 4 DPK Bank Umum berdasarkan Kelompok Kepemilikan Bank

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Des '23	Sep '24	Dec '24		Sep '24	Dec '24	Des '23	Dec '24
BUMN	3,747,610	3,810,518	3,862,797	43.71	-0.36%	1.37%	4.65%	3.07%
BUSN	3,745,302	3,877,080	3,973,849	44.97	0.26%	2.50%	4.16%	6.10%
BPD	730,333	790,239	752,685	8.52	3.80%	-4.75%	0.89%	3.06%
KCBLN	234,684	242,945	247,911	2.81	-9.72%	2.04%	-7.24%	5.64%
Total	8,457,929	8,720,782	8,837,242	100	-0.01%	1.34%	3.73%	4.48%

Sumber: SPI Desember 2024

Tabel 5 Penyebaran DPK Bank Umum berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar

Wilayah	Nominal Rp(M)			% Pangsa terhadap total DPK
	Des '23	Sep '24	Dec '24	
Daerah Khusus Jakarta	4,499,584	4,552,099	4,639,764	52.50%
Jawa Timur	736,718	768,869	771,767	8.73%
Jawa Barat	658,144	669,299	686,309	7.77%
Jawa Tengah	404,249	421,890	425,113	4.81%
Sumatera Utara	318,612	325,064	323,066	3.66%
Total DPK 5 Provinsi	6,617,307	6,737,221	1,991,223	77.47%
Total DPK	8,457,929	8,686,720	8,837,242	

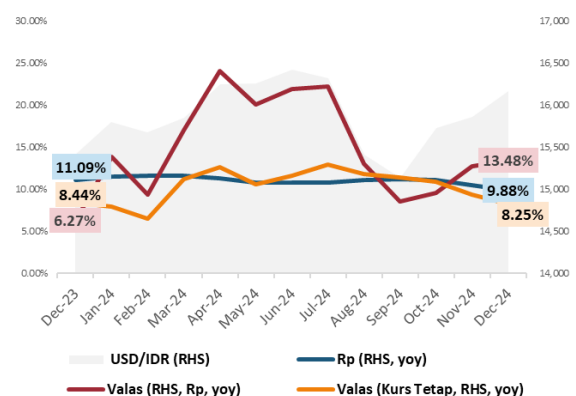
Sumber: SPI Desember 2024, diolah

1.3 Penggunaan Dana Bank Umum

Kredit Bank Umum tumbuh 10,39% (yoy), sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 10,38% (yoy). Jika dilihat per jenis usaha, kredit BUK tumbuh 10,30% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,18% (yoy). Sementara itu, pembiayaan BUS tumbuh 12,18% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 14,19% (yoy), meskipun dengan porsi relatif kecil (5,28%).

Berdasarkan valuta, kredit kepada pihak ketiga bukan bank didominasi dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,39%, sedangkan kredit valas sebesar 14,61%. Secara umum, peningkatan pertumbuhan kredit didorong oleh pertumbuhan kredit valas yang tumbuh 13,48% (yoy) dari 6,27% (yoy) pada tahun sebelumnya. Jika menggunakan kurs tetap, kredit valas tercatat sedikit melambat

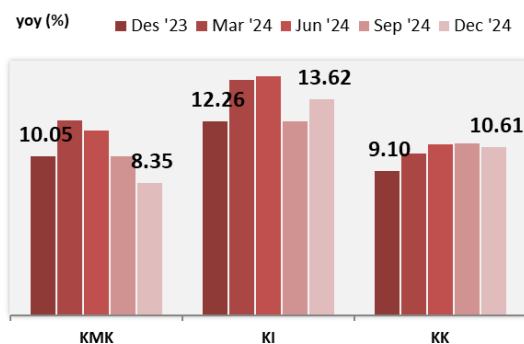
tumbuh 8,25% (yoy) dari 8,44% (yoy) pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan pertumbuhan kredit valas lebih karena dipengaruhi oleh depresiasi Rupiah (Grafik 18). Di sisi lain, kredit Rupiah tercatat tumbuh melambat 9,88% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 11,09% (yoy).

Grafik 13 Kredit per Valuta

Sumber: SPI Desember 2024

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,68%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) dengan porsi sebesar 44,79% dan kredit investasi (KI) sebesar 27,88%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,32%. Pertumbuhan kredit secara umum didorong oleh kredit konsumtif yang tumbuh 10,61% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,10% (yoy). Di sisi lain, kredit produktif secara umum tumbuh melambat 10,31% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 10,86% (yoy), yang disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan kredit modal kerja pada periode laporan.

Grafik 14 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI Desember 2024

1.4 Rentabilitas Bank Umum

Hingga TW IV 2024, rentabilitas Bank Umum tercatat menurun ditandai dengan ROA yang turun menjadi sebesar 2,69%, atau turun 5 bps dari tahun sebelumnya sebesar 2,74%. Penurunan ROA disebabkan oleh pertumbuhan laba sebelum pajak yang melambat hanya tumbuh 6,17% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 20,57% (yoy).

Dari sisi margin, NIM tercatat turun 19 bps menjadi sebesar 4,62% dari 4,81% pada tahun sebelumnya. Penurunan NIM seiring dengan melambatnya pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 4,07% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang

tumbuh 8,81% (yoy). Melambatnya pertumbuhan pendapatan bunga bersih utamanya disebabkan terkontraksinya pendapatan bunga dari Bank Indonesia yang memiliki porsi cukup besar. Selain itu, pendapatan bunga dari kredit yang diberikan juga tercatat tumbuh melambat pada bulan laporan.

Selain itu, efisiensi Bank Umum juga tercatat sedikit menurun tecermin dari rasio BOPO perbankan yang meningkat 238 bps dari 78,92% menjadi 81,30%. Peningkatan BOPO disebabkan oleh pertumbuhan beban operasional yang tumbuh tinggi 23,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional yang tumbuh 20,27% (yoy), sehingga secara umum membuat BOPO meningkat.

Selanjutnya, CIR tercatat 69,95%, naik dari 65,52% pada Desember 2023. Peningkatan CIR tersebut disebabkan oleh beban operasional selain beban bunga yang meningkat sebesar 24,15% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan operasional selain bunga. Namun demikian, secara umum rasio CIR sebesar 69,95% mencerminkan tingkat efisiensi bank umum yang masih cukup baik.

1.5 Permodalan Bank Umum

Secara umum pada Desember 2024, kondisi permodalan perbankan masih cukup solid meskipun sedikit turun, yaitu tecermin dari nilai CAR sebesar 26,69% yang turun 96 bps dari tahun lalu sebesar 27,65%. Penurunan nilai CAR tersebut didorong oleh pertumbuhan ATMR yang tumbuh 9,89% (yoy) dan melampaui pertumbuhan modal

yang tercatat melambat pada periode laporan.

Pertumbuhan ATMR utamanya dipengaruhi oleh kenaikan ATMR Kredit dan Pasar yang tumbuh cukup tinggi masing-masing sebesar 9,18% dan 464,09% (yoy). Pertumbuhan ATMR Kredit seiring dengan

penyaluran kredit yang tumbuh 10,39%, sedangkan pertumbuhan ATMR Pasar dipengaruhi adanya penyesuaian perhitungan ATMR pada tahun 2024. Sementara itu, modal tumbuh 6,08% (yoy) cenderung melambat dari tahun lalu yang tumbuh 7,87% (yoy).

Tabel 6 Rasio Keuangan Bank Umum

Indikator	2023	2024	2024	qtq		yoy	
	Dec	Sep	Dec	Sep'24	Dec'24	Des '23	Dec '24
CAR (%)	27.65	26.84	26.69	75	(15)	199	(96)
BUK	27.75	26.92	26.76	79	(16)	215	(99)
BUS	25.41	25.36	25.30	7	(6)	(87)	(11)
ROA (%)	2.74	2.73	2.69	7	(4)	31	(5)
BUK	2.78	2.76	2.72	7	(4)	33	(6)
BUS	1.88	2.02	2.07	(4)	5	(12)	19
NIM / NOM (%)	4.81	4.60	4.62	3	2	10	(19)
BUK	4.92	4.70	4.72	4	2	12	(20)
BUS	2.55	2.65	2.69	(6)	4	(4)	14
BOPO (%)	78.92	78.71	81.30	3	259	27	238
BUK	78.94	78.79	81.45	2	266	24	251
BUS	78.31	76.68	76.43	41	(25)	103	(188)
NPL / NPF Gross (%)	2.19	2.21	2.08	(5)	(13)	(25)	(11)
BUK	2.19	2.21	2.08	(7)	(13)	(25)	(11)
BUS	2.10	2.14	2.08	10	(6)	(25)	(2)
NPL / NPF Net (%)	0.71	0.78	0.74	-	(4)	-	3
BUK	0.72	0.78	0.74	(1)	(4)	1	2
BUS	0.63	0.77	0.71	10	(6)	(1)	8
LDR / FDR (%)	83.83	86.91	88.57	117	166	505	474
BUK	84.11	87.15	89.05	120	190	513	494
BUS	79.06	82.90	80.81	78	(209)	387	175
AL/DPK (%)	28.73	25.40	25.59	3	19	(247)	(314)
BUK	28.65	25.29	25.20	12	(9)	(275)	(345)
BUS	30.07	27.24	32.09	(147)	485	251	202
AL/NCD (%)	127.07	112.66	112.87	33	21	(1,060)	(1,420)
BUK	126.13	111.75	110.53	71	(122)	(1,177)	(1,560)
BUS	144.76	129.33	154.52	(719)	2519	1,153	976

Sumber: SPI Desember 2024

Tabel 7 Rasio Permodalan dan Rentabilitas Bank Umum

Rasio	KBMI 1			KBMI 2		
	Des '23	Sep '24	Dec '24	Des '23	Sep '24	Dec '24
CAR	33.44%	32.21%	31.45%	36.92%	36.46%	37.79%
ROA	1.33%	1.02%	0.92%	1.60%	2.08%	1.95%
BOPO	88.50%	90.41%	90.64%	92.96%	91.21%	93.81%
NIM	4.93%	4.50%	4.52%	4.31%	4.30%	4.34%
Rasio	KBMI 3			KBMI 4		
	Des '23	Sep '24	Dec '24	Des '23	Sep '24	Dec '24
CAR	25.80%	25.10%	24.97%	24.77%	23.98%	23.65%
ROA	1.78%	1.78%	1.74%	3.85%	3.76%	3.77%
BOPO	79.98%	80.49%	81.05%	70.07%	69.02%	71.48%
NIM	3.79%	3.57%	3.55%	5.41%	5.20%	5.24%

Sumber: SPI Desember 2024

Tabel 8 Komponen ATMR Bank Umum

Komponen ATMR (Rp T)	Des '23	Sep '24	Des '24	yoy	
				Des'23	Des '24
ATMR Kredit	6,081	6,446	6,639	7.79%	9.18%
ATMR Operasional	537	207	187	-46.88%	-65.10%
ATMR Pasar	98	555	555	57.52%	464.09%
Total ATMR	6,708	7,199	7,372	0.001%	9.89%

Sumber: OJK

Overview Kinerja BPR dan BPRS

Fungsi intermediasi BPR dan BPRS secara umum masih dalam kondisi yang cukup baik tecermin dari kredit/pembiayaan dan DPK yang masih tumbuh meskipun melambat. Aset BPR dan BPRS tumbuh namun melambat sebesar 5,29% (yoy), seiring dengan perlambatan DPK BPR dan BPRS yang juga masih tumbuh 4,65% (yoy). Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS juga masih tumbuh 6,12% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 9 Perkembangan Kinerja BPR dan BPRS

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Des '23	Sep '24	Des '24	Sep '24	Des '24	Des '23	Des '24
Total Aset (Rp Miliar)	218,161	224,071	229,708	2.15%	2.52%	7.76%	5.29%
BPR	194,984	200,162	204,676	1.95%	2.26%	6.96%	4.97%
BPRS	23,177	23,909	25,032	3.87%	4.70%	14.98%	8.00%
Kredit/Pembiayaan (Rp milyar)	157,816	165,342	167,474	1.70%	1.29%	9.79%	6.12%
BPR	140,791	146,822	148,488	1.54%	1.14%	8.89%	5.47%
BPRS	17,025	18,520	18,986	3.02%	2.51%	17.84%	11.51%
DPK (Rp Miliar)	153,179	158,162	160,298	2.28%	1.35%	9.11%	4.65%
BPR	137,909	142,108	143,453	1.99%	0.95%	8.64%	4.02%
BPRS	15,270	16,053	16,844	5.00%	4.93%	13.56%	10.31%
Tabungan	47,608	48,236	50,257	4.57%	4.19%	6.95%	5.56%
BPR	42,617	43,386	44,960	4.42%	3.63%	6.09%	5.50%
BPRS	4,991	4,850	5,297	5.97%	9.21%	14.88%	6.12%
Deposito	105,571	109,926	110,041	1.31%	0.10%	10.11%	4.23%
BPR	95,293	98,723	98,493	0.95%	-0.23%	9.82%	3.36%
BPRS	10,279	11,204	11,548	4.58%	3.07%	12.93%	12.34%

Sumber: OJK

2. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

Hingga periode triwulan IV 2024, kinerja BPR masih menunjukkan kondisi yang cukup solid. DPK tetap mampu tumbuh sejalan dengan penyaluran kredit yang mencatatkan pertumbuhan walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang masih

tinggi di atas *threshold* yang tercatat meningkat dibanding tahun lalu. Namun demikian, kinerja BPR perlu diperhatikan seiring adanya penurunan laba dan efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya, yang juga disertai dengan peningkatan risiko kredit pada periode laporan yang ditunjukkan dari NPL gross yang masih cukup tinggi.

Tabel 10 Indikator Umum BPR

Indikator	Nominal			qtq		yoy	
	Des '23	Sep'24	Des'24	Sep'24	Des'24	Des '23	Des'24
Jumlah BPR	1,402	1,377	1,356	(12)	(21)	(39)	(46)
Total Aset (Rp milyar)	194,984	200,162	204,676	1.95%	2.26%	6.96%	4.97%
Kredit (Rp milyar)	140,791	146,822	148,488	1.54%	1.14%	8.89%	5.47%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	137,909	142,108	143,453	1.99%	0.95%	8.64%	4.02%
- Tabungan (Rp milyar)	42,617	43,386	44,960	4.42%	3.63%	6.09%	5.50%
- Deposito (Rp milyar)	95,293	98,723	98,493	0.95%	-0.23%	9.82%	3.36%
CAR (%)	29.98	31.05	30.96	(70)	(9)	(78)	98
ROA (%)	1.00	1.24	1.46	15	22	(74)	46
BOPO (%)	89.37	88.12	86.11	(141)	(201)	571	(326)
NPL Gross (%)	9.87	11.72	10.97	33	(75)	198	110
NPL Net (%)	6.51	8.41	7.96	22	(45)	128	145
LDR (%)	76.56	77.24	77.28	22	4	73	72
CR (%)	13.65	13.46	14.23	(1)	77	(1)	58

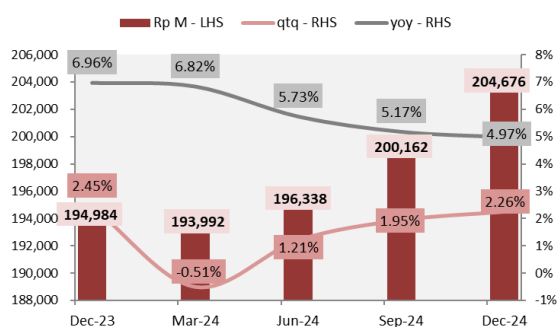
Sumber: SPI, Desember 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam basis point (bps)

2.1 Aset BPR

Aset BPR pada akhir triwulan IV 2024 tumbuh 4,97% (yoy), cenderung melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,96% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset tersebut sejalan dengan DPK yang juga tumbuh melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Grafik 15 Perkembangan Aset BPR

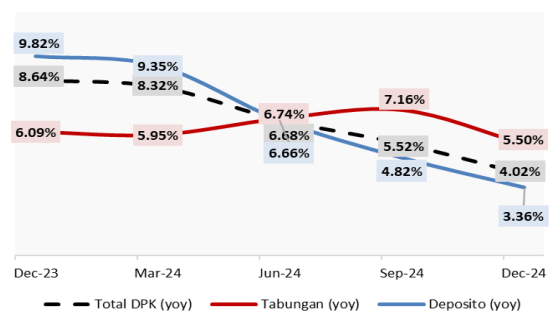


Sumber: SPI Desember 2024

2.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR tumbuh 4,02% (yoy) menjadi Rp143,45 triliun, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 8,64% (yoy). Perlambatan DPK tersebut didorong oleh komponen deposito yang tercatat tumbuh sebesar 3,36% (yoy) turun dari periode tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 9,82% (yoy). Sejalan dengan deposito, komponen tabungan juga menunjukkan perlambatan dengan mencatatkan pertumbuhan 5,50% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,09% (yoy).

Grafik 16 Perkembangan DPK BPR



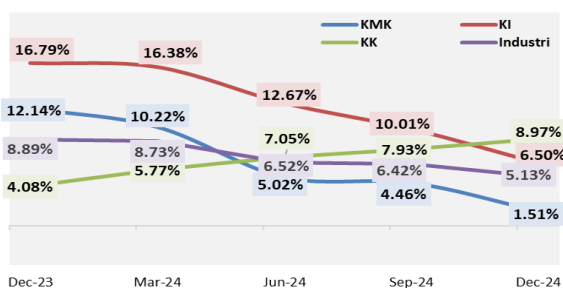
Sumber: SPI Desember 2024

2.3 Penggunaan Dana BPR

Kredit BPR pada akhir triwulan IV 2024 tumbuh 5,47% (yoy), melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,89% (yoy). Ditinjau dari jenis penggunaan, mayoritas kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (55,56%) yang terdiri dari KMK (46,95%) dan KI (8,62%) sedangkan sisanya untuk KK (44,44%).

Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh semua jenis penggunaan di mana KI tumbuh 6,50% (yoy), mengalami perlambatan dari 16,79% (yoy), dan untuk KMK tercatat tumbuh 1,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 12,14% (yoy). Sementara di sisi lain, kredit konsumtif tumbuh positif sebesar 8,97% (yoy) melampaui pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu 4,08% (yoy).

Grafik 17 Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: SPI, Desember 2024

2.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada periode laporan naik dibandingkan tahun sebelumnya, tecermin dari rasio ROA sebesar 1,46% atau naik 46 bps dibandingkan tahun sebelumnya (1,00%).

Seiring dengan peningkatan rentabilitas, efisiensi BPR juga tercatat meningkat, tecermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 326 bps menjadi 86,11% dari 89,37% pada tahun sebelumnya. Penurunan rasio BOPO disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan operasional sebesar 4,79% (yoy) dan melampaui pertumbuhan beban operasional sebesar 0,97% (yoy).

2.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari indikator CAR BPR yang tinggi sebesar 30,96%, jauh di atas KPMM, dan meningkat 98 bps dari tahun sebelumnya yang tercatat 29,98%. Peningkatan CAR didorong oleh pertumbuhan modal yang melampaui pertumbuhan dari ATMR.

3. Kinerja Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS hingga triwulan IV 2024 masih tetap terjaga dengan baik tecermin dari aset, DPK, dan pembiayaan BPRS yang tetap tumbuh walaupun melambat dibanding tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 8,00% (yoy), 10,31% (yoy), dan 11,51% (yoy).

Selain itu, perlu diperhatikan risiko pembiayaan BPRS tercatat meningkat tecermin dari adanya peningkatan rasio NPF *gross* pada periode laporan. Ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tecermin pada permodalan yang masih cukup baik, di tengah rentabilitas dan efisiensi BPRS juga tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 11 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq		yoy	
	Des '23	Sep '24	Des '24	Sep '24	Des '24	Des '23
Total Aset (Rp Miliar)	23,177	23,909	25,032	3.87%	4.70%	14.98%
Pembiayaan (Rp Miliar)	17,025	18,520	18,986	3.02%	2.51%	17.84%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	15,270	16,053	16,844	5.00%	4.93%	13.56%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	4,991	4,850	5,297	5.97%	9.21%	14.88%
- Deposito iB (Rp Miliar)	10,279	11,204	11,548	4.58%	3.07%	12.93%
CAR (%)	23.21	22.52	23.78	(57)	126	(121)
ROA (%)	2.05	1.39	1.51	(15)	12	13
BOPO (%)	85.79	91.70	90.61	79	(109)	(23)
NPF Gross (%)	6.49	9.03	7.75	80	(128)	58
FDR (%)	111.50	115.36	112.73	(222)	(263)	405

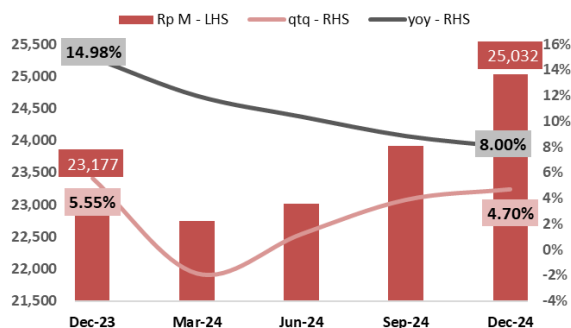
Sumber: SPS Desember 2024

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

3.1 Aset BPRS

Pada periode laporan, aset BPRS tercatat sebesar Rp25,03 triliun atau tumbuh 8,00% (yoy), melambat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 14,98% (yoy).

Grafik 18 Tren Aset BPRS



Sumber: SPS Desember 2024

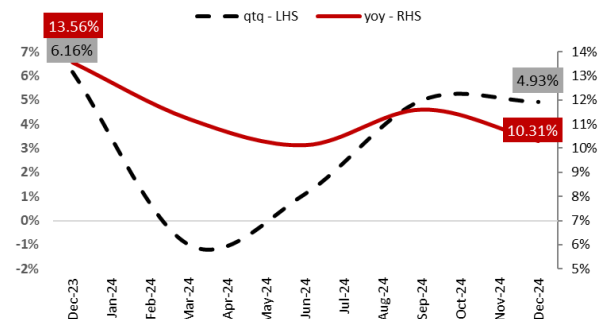
3.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar Rp16,84 triliun, tumbuh melambat 10,31% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,56% (yoy).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB yakni 68,56%. Deposito iB BPRS tumbuh 12,34% (yoy) melambat dibandingkan dengan tahun

lalu yang tumbuh 12,93% (yoy). Sejalan dengan perlambatan pada komponen deposito, tabungan iB BPRS juga tumbuh 6,12% (yoy) melambat dari tahun lalu yang tumbuh 14,88% (yoy).

Grafik 19 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Desember 2024

3.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada periode laporan, pembiayaan BPRS mencapai Rp18,99 triliun, tumbuh sebesar 11,51% (yoy) melambat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 17,84% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, pembiayaan BPRS mayoritas disalurkan ke sektor konstruksi (18,19%), jasa dunia usaha

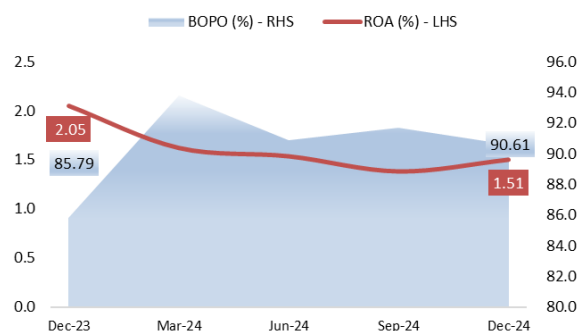
(13,29%) dan perdagangan (12,64%). Pembiayaan ke sektor konstruksi tercatat masih tumbuh tinggi 29,90% (yoy) namun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 56,61% (yoy). Di sisi lain, sektor jasa dunia usaha tumbuh melambat 27,15% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh 36,96% (yoy). Sementara itu, sektor perdagangan masih berkontraksi meskipun tidak sedalam tahun sebelumnya sebesar -1,75% (yoy) dari -2,24% pada Desember 2023.

3.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS mengalami penurunan yang tecermin dari rasio ROA turun 54 bps menjadi 1,51% dari 2,05% pada tahun sebelumnya yang disebabkan oleh berkontraksinya laba BPRS pada bulan laporan. Penurunan rentabilitas sejalan dengan pemburukan efisiensi BPRS tecermin dari rasio BOPO yang meningkat tinggi 482 bps menjadi 90,61%, jauh meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 85,79%, disebabkan oleh pendapatan operasional yang melambat lebih besar

dibandingkan pelambatan beban operasional.

Grafik 20 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Desember 2024

3.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih cukup solid dengan CAR sebesar 23,78%, naik 57 bps dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 23,21%. Meskipun baik total modal maupun ATMR sama-sama tumbuh melambat, namun pertumbuhan total modal tetap lebih tinggi dibandingkan ATMR sehingga CAR meningkat. CAR BPRS juga cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS, atau masih jauh di atas *threshold*.

3 Penyaluran Kredit/Pembiayaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

3 Kredit/Pembiayaan Perbankan

Pada triwulan IV-2024, perkembangan kredit/pembiayaan perbankan (Bank Umum) masih cukup baik didorong oleh aktivitas usaha yang masih berada pada level ekspansif dan konsumsi rumah tangga utamanya golongan menengah atas yang tumbuh solid. Dilihat dari kenaikan nominal kredit secara tahunan, kredit/pembiayaan Bank Umum pada periode ini utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan, perantara keuangan, pertambangan, serta rumah tangga – kepemilikan rumah tinggal. Sementara pada BPR dan BPRS kredit/pembiayaan mengalami perlambatan utamanya pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel namun sektor *real estate* tumbuh relatif tinggi menahan perlambatan yang semakin dalam.

A. Kredit/Pembiayaan Bank Umum (BUK dan BUS)

1. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

Penyaluran kredit/pembiayaan Bank Umum kepada pihak ketiga bukan bank (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan IV-2024 tumbuh relatif stabil dengan sedikit meningkat sebesar 10,39% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 10,38% (yoy). Secara triwulanan, kredit tumbuh 3,27% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,35% (qtq). Pertumbuhan kredit secara tahunan utamanya didorong oleh meningkatnya penyaluran kredit kepada debitur korporasi.

Porsi terbesar penyaluran kredit bank umum masih kepada non-lapangan usaha sektor rumah tangga (porsi: 23,47%). Penyaluran kredit pada sektor ini tumbuh 10,38% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 9,17% (yoy). Pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh sektor rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d. 70 yang tumbuh 9,69% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,43% (yoy).

Selain itu, rumah tinggal tipe di atas 70 juga masih tercatat tumbuh 11,84% (yoy), meskipun melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 17,97% (yoy). Di sisi lain, kepemilikan rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal s.d. tipe 21 justru mengalami kontraksi -6,89% (yoy) dan menarik ke bawah subsektor rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal secara umum, menjadi tumbuh 9,67% (yoy) pada periode laporan dari 12,48% (yoy) pada tahun sebelumnya. Selain itu, pertumbuhan sektor rumah tangga juga didorong oleh subsektor rumah tangga untuk kepemilikan Apartemen yang tumbuh 6,49% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 5,75% (yoy). Kredit rumah tangga untuk keperluan lainnya juga mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi sehingga turut mendorong ke atas dari pertumbuhan kredit konsumtif, tercatat pada Desember 2024 penyaluran kredit ke sektor tersebut tumbuh sebesar 10,17% (yoy) dan melampaui pertumbuhan tahun lalu yang hanya sebesar 5,81% (yoy).

Sementara itu untuk kredit produktif, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit terbesar yaitu sektor industri pengolahan (porsi 15,64%). Kredit pada sektor ini tumbuh 9,56% (yoy), meningkat setelah tahun sebelumnya tumbuh 4,72% (yoy). Pertumbuhan pada sektor ini didorong oleh subsektor industri makanan, utamanya industri minyak makan dan lemak dari nabati dan hewani yang tumbuh 30,21% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 17,29% (yoy). Selain itu, industri makanan lainnya juga tercatat mendorong pertumbuhan dengan tumbuh 11,07% (yoy) dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -1,92% (yoy). Industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya juga tercatat tumbuh tinggi 19,47% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 11,63% (yoy), didorong oleh subsektor industri bubur kertas (*pulp*), kertas dan karton/*paper board*.

Per Desember 2024, pertumbuhan penyaluran kredit kepada industri pengolahan yang terkait hilirisasi, antara lain untuk subsektor industri pengolahan kelapa sawit, logam non besi, dan manufaktur elektronik tumbuh tinggi sebesar 28,48% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yaitu sebesar 12,19% (yoy). Peningkatan penyaluran kredit kepada industri pengolahan terkait hilirisasi tersebut dipicu oleh pertumbuhan kredit pada subsektor industri kelapa sawit yang tumbuh sebesar 30,21%, melampaui pertumbuhan pada Desember 2023 sebesar 17,29%. Selain itu, pertumbuhan pada subsektor pengolahan logam bukan besi juga meningkat signifikan dan turut mendorong pertumbuhan kredit hilirisasi, tercatat pada Desember 2024 kredit terhadap subsektor ini tumbuh sebesar 23,22% (yoy), lebih tinggi

dari tahun sebelumnya yang tumbuh hanya 2,03% (yoy). Secara porsi penyaluran kredit, persentase penyaluran kredit kepada subsektor pengolahan kelapa sawit, logam non besi, dan manufaktur elektronik adalah sebesar 20,16% terhadap total kredit kepada industri pengolahan dan 3,15% terhadap total penyaluran kredit secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kontribusi penyaluran kredit kepada subsektor industri pengolahan yang berkaitan dengan hilirisasi cukup signifikan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan kontribusi perbankan terhadap sektor ini.

Sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit kedua terbesar yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 15,16%) namun tercatat melambat. Pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor ini tumbuh 4,19% (yoy), menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 9,12% (yoy). Pertumbuhan sektor ini didorong di antaranya oleh subsektor Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau yang tumbuh 18,57% (yoy) cenderung menurun setelah tahun sebelumnya mampu tumbuh 23,36% (yoy), didorong oleh perlambatan perdagangan dalam negeri beras yang hanya tumbuh 9,58% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 70,77% (yoy). Selain itu, subsektor lainnya yang mendorong perlambatan dari sektor perdagangan besar dan eceran yaitu perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenis yang tumbuh melambat 17,02% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh mencapai 26,84% (yoy).

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 6,69% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh 5,25% (yoy), menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,58% (yoy). Perlambatan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor pertanian dan perburuan, utamanya pada subsektor perkebunan kelapa sawit yang tumbuh 7,66% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 7,98% (yoy) serta subsektor perkebunan tanaman kopi yang tumbuh 2,08% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,54% (yoy).

Penyaluran kredit ke sektor perantara keuangan juga memiliki porsi yang cukup besar (5,74%). Sektor ini tercatat tumbuh tinggi pada periode laporan, yaitu 21,46% (yoy), dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 20,89% (yoy). Pertumbuhan di sektor keuangan terjaga tinggi ditopang oleh subsektor jasa penunjang perantara keuangan lainnya yang tumbuh tinggi 32,07% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -2,38% (yoy).

Sektor ekonomi transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi 5,69%) juga tercatat tumbuh double digit, 19,16% (yoy), namun

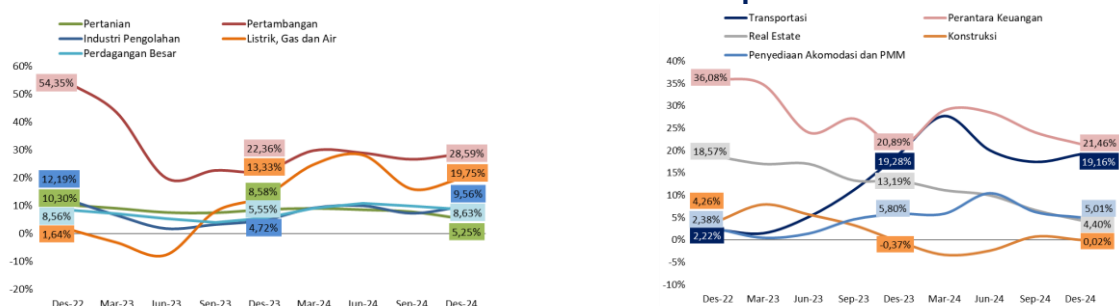
sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 19,28% (yoy). Melambatnya pertumbuhan kredit pada sektor ini didorong oleh subsektor angkutan jalan untuk barang yang tumbuh hanya 5,79% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 15,79% (yoy). Perlambatan di subsektor tersebut sejalan dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait kebijakan pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, termasuk pembatasan operasional angkutan barang.

Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi 4,77% mampu tumbuh tinggi pada triwulan IV-2024 sehingga turut mendorong pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Sektor ini tumbuh 28,59% (yoy), melampaui pertumbuhan pada tahun lalu yang tumbuh 22,36% (yoy). Adapun subsektor yang mendorong pertumbuhan kredit pada sektor pertambangan dan penggalian antara lain subsektor pertambangan logam dan bijih timah yang tumbuh tinggi sebesar 55,26% (yoy) dan jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 28,35% (yoy).

Tabel 12 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Sektor Ekonomi

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)			qtq		yoy		Porsi
		Des '23	Sep '24	Des '24	Sep '24	Des '24	Des '23	Des '24	
Lapangan Usaha/Sektor Produktif		5.156,59	5.497,53	5.688,42	0,82%	3,47%	10,86%	10,31%	72,68%
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	497,66	517,92	523,78	0,73%	1,13%	8,58%	5,25%	6,69%
2	Perikanan	20,80	20,40	19,78	-1,75%	-3,01%	5,43%	-4,87%	0,25%
3	Pertambangan dan Penggalian	290,47	341,99	373,51	4,76%	9,22%	22,36%	28,59%	4,77%
4	Industri Pengolahan	1.117,34	1158,41	1224,14	-0,62%	5,67%	4,72%	9,56%	15,64%
5	Listrik, Gas, dan Air	183,96	200,75	220,29	-0,50%	9,73%	13,33%	19,75%	2,81%
6	Konstruksi	395,10	402,77	395,18	2,37%	-1,88%	-0,37%	0,02%	5,05%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	1.139,16	1201,22	1186,85	0,92%	-1,20%	9,12%	4,19%	15,16%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	130,79	136,21	137,35	0,32%	0,84%	5,80%	5,01%	1,75%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	373,42	416,45	444,98	1,08%	6,85%	19,28%	19,16%	5,69%
10	Perantara Keuangan	369,67	428,86	448,98	-0,22%	4,69%	20,89%	21,46%	5,74%
11	Real Estate	356,07	368,14	371,75	0,13%	0,98%	13,19%	4,40%	4,75%
12	Administrasi Pemerintahan	65,29	78,26	96,69	1,15%	23,55%	48,97%	48,09%	1,24%
13	Jasa Pendidikan	16,88	17,45	17,91	0,69%	2,65%	13,32%	6,15%	0,23%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37,41	40,81	46,67	3,20%	14,37%	18,68%	24,77%	0,60%
15	Jasa Kemasyarakatan	158,56	163,87	176,91	4,42%	7,95%	38,28%	11,57%	2,26%
16	Jasa Perorangan	4,00	3,77	3,63	-0,36%	-3,52%	0,42%	-9,21%	0,05%
17	Badan Internasional	0,02	0,26	0,01	1870,34%	-95,79%	-17,05%	-38,92%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha/Sektor Konsumtif		1.933,66	2.081,72	2.138,73	2,77%	2,74%	9,10%	10,61%	27,32%
18	Rumah Tangga	1.664,20	1.789,82	1.836,89	2,77%	2,63%	9,17%	10,38%	23,47%
-	- Pemilikan Rumah Tinggal	659,77	709,14	723,58	1,70%	2,04%	12,48%	9,67%	9,24%
-	- Pemilikan Flat atau Apartemen	29,55	30,82	31,47	1,67%	2,10%	5,75%	6,49%	0,40%
-	- Pemilikan Ruko atau Rukan	22,48	28,53	28,90	1,16%	1,28%	7,05%	28,57%	0,37%
-	- Pemilikan Kendaraan Bermotor	131,42	137,81	142,09	3,47%	3,11%	13,34%	8,12%	1,82%
-	- Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya	14,37	19,90	22,20	10,24%	11,56%	34,05%	54,47%	0,28%
-	- Keperluan Rumah Tangga Lainnya	806,61	863,61	888,65	3,49%	2,90%	5,81%	10,17%	11,35%
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	269,46	291,90	301,83	2,73%	3,40%	8,72%	12,01%	3,86%
Total		7.090,24	7.579,25	7.827,15	1,35%	3,27%	10,38%	10,39%	100,00%

Sumber: SPI Desember 2024

Grafik 21 Tren Pertumbuhan Kredit Produktif per Sektor Ekonomi

Sumber: SPI Desember 2024, diolah

2. Kredit/Pembiayaan Bank Umum berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)

Pada Desember 2024, distribusi penyaluran kredit/pembiayaan (selanjutnya disebut kredit) Bank Umum berdasarkan wilayah penyebaran (spasial) masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera dengan porsi masing-masing sebesar 68,54% dan 13,55%. Penyaluran kredit di wilayah Jawa masih tumbuh positif sebesar 10,63% (yoy) meskipun lebih rendah dari 11,62% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, penyaluran kredit di wilayah Sumatera tumbuh meningkat dari 5,31% (yoy) menjadi 9,32% (yoy) pada Desember 2024.

Pada wilayah Jawa, pertumbuhan kredit yang melambat utamanya dikontribusikan oleh Provinsi Banten (porsi: 9,27% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa). Penyaluran kredit di Provinsi Banten tumbuh

6,05% (yoy) pada Desember 2024 atau lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu sebesar 11,13% (yoy). Sektor *real estate* adalah yang mencatatkan penurunan penyaluran kredit terbesar mencapai Rp2,44 triliun. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit pada sektor *real estate* di Provinsi Banten berkontraksi dari 28,03% (yoy) menjadi -6,53% (yoy) yang utamanya dipengaruhi oleh turunnya kredit pada jasa perusahaan untuk *real estate* lainnya. Di sisi lain, Provinsi DKI Jakarta dengan porsi penyaluran kredit terbesar (48,66%) di wilayah Jawa justru mencatatkan pertumbuhan kredit yang meningkat dari 15,25% (yoy) pada Desember 2023 menjadi 15,42% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit tersebut seiring dengan adanya kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp348,82 triliun. Secara nominal penyaluran kredit, kenaikan terbesar terdapat pada sektor perantara keuangan sebesar Rp72,16 triliun yang utamanya didorong oleh perantara keuangan lainnya (nonbank) selain *leasing*.

Pada wilayah Sumatera, pertumbuhan kredit yang meningkat utamanya berkontribusi oleh Provinsi Sumatera Utara. Dalam kaitan tersebut, penyaluran kredit pada wilayah Sumatera didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan porsi sebesar 28,26%. Pada Desember 2024, nominal kredit yang disalurkan di Provinsi Sumatera Utara meningkat sebesar Rp42,20 triliun atau tumbuh signifikan dari 1,55% (yoy) menjadi 16,47% (yoy). Kenaikan nominal penyaluran kredit terbesar utamanya terdapat pada sektor industri pengolahan sebesar Rp15,74 triliun. Peningkatan tersebut mendorong kredit sektor industri pengolahan di Sumatera Utara tumbuh tinggi hingga

26,75% (yoy) dari yang sebelumnya berkontraksi -1,91% (yoy) pada Desember 2023. Peningkatan kredit industri pengolahan tersebut utamanya terdapat pada industri minyak goreng dari kelapa sawit mentah (*crude palm oil*). Selaras dengan hal tersebut, kenaikan nominal penyaluran kredit terbesar juga terjadi pada sektor pertanian sebesar Rp9,75 triliun. Peningkatan tersebut mendorong kredit sektor pertanian di Provinsi Sumatera Utara tumbuh tinggi hingga 23,22% (yoy) dari yang sebelumnya berkontraksi -9,90% (yoy) pada Desember 2023. Adapun kenaikan penyaluran kredit sektor pertanian tersebut utamanya terdapat pada perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum pertumbuhan kredit yang meningkat di Provinsi Sumatera Utara merupakan implementasi dari dukungan perbankan terhadap upaya hilirisasi produk kelapa sawit.

Selain Sumatera, penyaluran kredit di wilayah Sulawesi (porsi 5,28% terhadap total kredit kredit yang disalurkan secara nasional) juga tercatat tumbuh meningkat dari 7,68% (yoy) menjadi 11,60% (yoy) pada Desember 2024. Pertumbuhan kredit yang meningkat pada wilayah tersebut utamanya berkontribusi oleh Provinsi Sulawesi Tengah (porsi: 18,44% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi). Penyaluran kredit di Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh signifikan menjadi 25,84% (yoy) dari 1,91% (yoy) pada Desember 2023 seiring dengan kenaikan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp17,65 triliun. Secara nominal penyaluran kredit, peningkatan terbesar terdapat pada sektor industri pengolahan dengan kenaikan sebesar Rp9,25 triliun atau tumbuh signifikan dari 17,86% (yoy) menjadi 72,47% (yoy).

Peningkatan kredit terbesar utamanya terdapat pada industri logam dasar bukan besi dari Rp279,06 juta menjadi Rp 6,42 triliun. Sebagai informasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain oleh Pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Kenaikan kredit pada industri tersebut mengindikasikan adanya dukungan kuat dari perbankan dalam mendorong hilirisasi industri logam di KEK Palu. Selain itu, kenaikan penyaluran kredit terbesar juga terjadi pada sektor listrik, gas, dan air sebesar Rp3,38 triliun sehingga tumbuh signifikan dari -8,84% (yoy) menjadi 45,37% (yoy). Peningkatan kredit terbesar untuk sektor tersebut utamanya ditujukan pada ketenagalistrikan lainnya. Hal ini ditengarai sejalan dengan adanya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Luwuk 40 Megawatt (MW) di Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik PLN dan mampu menyuplai kebutuhan listrik lebih dari 30.000 rumah serta industri sebesar 30 MW di wilayah tersebut. Di sisi lain, Provinsi Sulawesi Selatan yang mendominasi penyaluran kredit di wilayah Sulawesi dengan porsi sebesar 42,94% justru mencatatkan pertumbuhan kredit yang melambat dari 11,29% (yoy) tahun lalu menjadi 5,57% (yoy). Penurunan nominal penyaluran kredit terbesar terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran yakni sebesar Rp562,67 triliun. Hal tersebut membuat pertumbuhan kredit sektor perdagangan besar dan eceran di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tekontraksi -1,40%

(yoy) dari 6,63% (yoy). Penurunan kredit terbesar pada sektor tersebut utamanya dipengaruhi oleh perdagangan eceran tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi.

Wilayah lainnya yang juga mencatatkan pertumbuhan kredit lebih tinggi dibandingkan Desember 2023 yaitu Papua dan Maluku (porsi 1,23% terhadap total kredit yang disalurkan secara nasional). Provinsi yang berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan kredit tersebut adalah Maluku Utara (porsi: 33,17% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Sulawesi). Provinsi Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan kredit yang meningkat dari 6,93% (yoy) menjadi 28,03% (yoy) seiring kenaikan nominal penyaluran kredit sebesar Rp6,97 triliun. Kenaikan nominal penyaluran kredit terbesar utamanya pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp2,58 triliun atau tumbuh signifikan mencapai 99,48% (yoy) dari yang sebelumnya terkontraksi -8,32% (yoy). Adapun kenaikan penyaluran kredit tersebut utamanya didorong oleh pertambangan biji nikel. Sebagaimana diketahui, Maluku Utara menjadi provinsi dengan cadangan bijih nikel terbanyak di Indonesia atau mencapai 1,86 miliar ton pada tahun 2024. Selanjutnya, kenaikan nominal penyaluran kredit terbesar juga terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar Rp1,60 triliun sehingga mendorong pertumbuhan kredit pada sektor tersebut naik dari 16,35% (yoy) menjadi 22,66% (yoy). Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kredit industri logam dasar bukan besi seiring adanya program hilirisasi nikel yang menjadi salah satu sektor unggulan bagi Provinsi Maluku Utara. Kenaikan pertumbuhan kredit

juga terjadi pada Provinsi Papua yang mendominasi penyaluran kredit di wilayah ini dengan porsi 47,69%. Sektor yang mencatatkan pertumbuhan kredit tertinggi pada periode laporan adalah pertambangan dan penggalian yaitu dari yang sebelumnya terkontraksi -98,52% (yoy) menjadi tumbuh sangat signifikan hingga 16000,58% (yoy). Hal tersebut terjadi karena nominal kredit sektor pertambangan dan penggalian meningkat drastis dari Rp14,46 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp2,33 triliun pada Desember 2024. Perkembangan tersebut didorong oleh pertambangan bijih tembaga yang meningkat sebesar Rp1,86 triliun pada Desember 2024. Ekspansi kredit perbankan untuk jenis usaha tersebut ditengarai sebagai bentuk dukungan dalam penyelesaian pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk menggenjot ekspor konsentrat tembaga yang sedang digencarkan hingga September 2025. Sebagai informasi tambahan, PT Freeport Indonesia secara resmi baru saja mengoperasikan pabrik konsentrat tembaga di KEK JIPE, Gresik, Jawa Timur yang memiliki desain *single line* dan terbesar di dunia. Smelter ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas produksi hingga 1,7 juta ton setelah beroperasi penuh, produk katoda tembaga mencapai 600 ribu per tahun, emas dan perak murni sebanyak 6 ribu ton, asam sulfat sebanyak 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga sebanyak 1,3 juta ton per tahun, dan gipsium sebanyak 150 ribu ton per tahun.

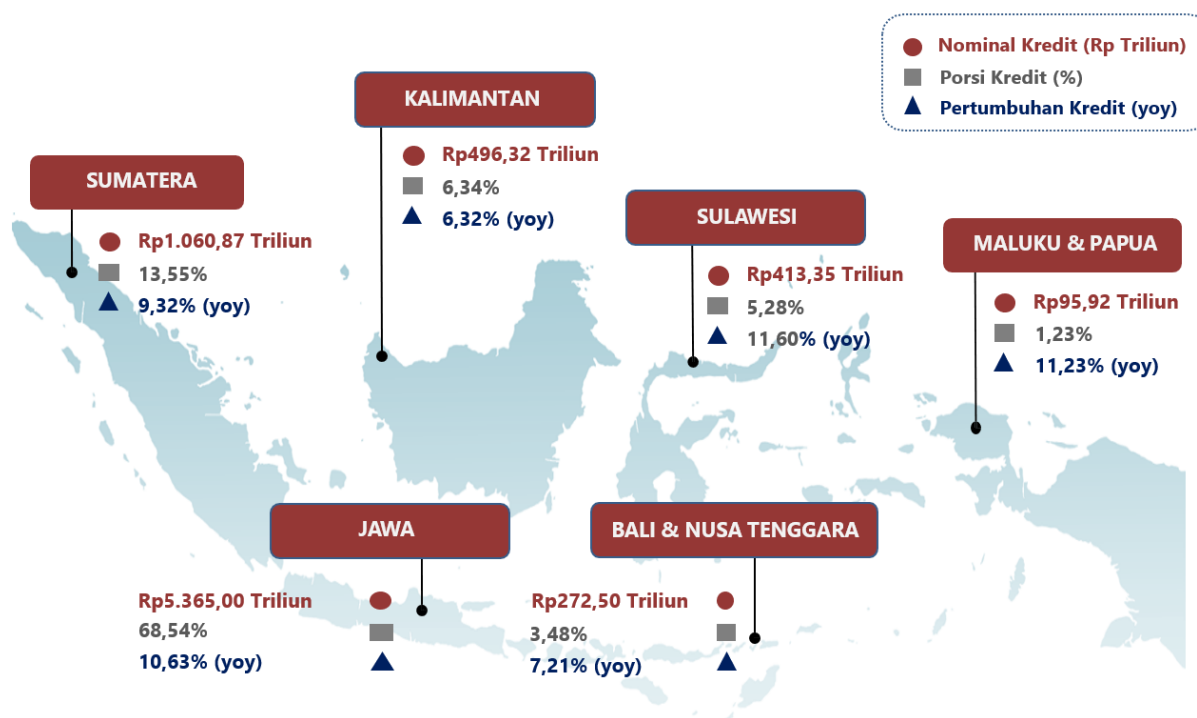
Di sisi lain, terdapat dua wilayah selain Jawa yang mencatatkan pertumbuhan kredit yang lebih lambat pada Desember 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Kalimantan, serta Bali dan Nusa Tenggara. Pada wilayah Kalimantan

(porsi 6,34% terhadap total kredit yang disalurkan secara nasional) kredit tumbuh melambat dari 10,19% (yoy) menjadi 6,32% (yoy). Penyaluran kredit di wilayah ini sebagian besar disalurkan di Provinsi Kalimantan Timur (porsi: 43,18% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan) yang tumbuh 5,48% (yoy) lebih rendah dari 13,73% (yoy). Perlambatan kredit di Kalimantan Timur utamanya pada sektor pertambangan dan penggalian yang turun Rp4,3 triliun, sehingga terkontraksi -9,30% dari 40,68% (yoy) pada Desember 2023. Penurunan tersebut utamanya dipengaruhi oleh pertambangan batubara, penggalian gambut, dan gasifikasi batubara. Di samping itu, sektor konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan yang terkontraksi -5,94% (yoy) dari 0,11% (yoy) pada Desember tahun sebelumnya seiring dengan penurunan nominal kredit yang disalurkan sebesar Rp773,99 miliar. Penurunan kredit terbesar utamanya dipengaruhi oleh konstruksi gedung lainnya seiring dengan progress pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Penajam Paser Utara yang sudah berada pada tahap akhir menuju penyelesaian. Provinsi lainnya yang berkontribusi pada penurunan kredit di wilayah Kalimantan adalah Kalimantan Tengah (porsi: 16,28% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Kalimantan). Sektor utama yang mencatatkan penurunan kredit terbesar yaitu pertanian dari 6,27% (yoy) menjadi terkontraksi -2,90% (yoy) seiring nominal kredit yang turun Rp937,29 miliar. Penurunan kredit tersebut utamanya terdapat pada perkebunan kelapa yang turun Rp891,90 miliar atau terkontraksi semakin dalam dari -12,68% (yoy) menjadi -96,87% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, wilayah Bali dan Nusa

Tenggara (porsi penyaluran kredit 3,48% terhadap total kredit yang disalurkan secara nasional) mengalami pertumbuhan kredit yang melambat dari 14,28% (yoy) menjadi 7,21% (yoy). Perlambatan kredit yang terjadi pada wilayah tersebut utamanya dikontribusikan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (porsi: 18,77% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara) yang berkontraksi -2,29% (yoy) dari 14,56% (yoy) seiring dengan penurunan nominal kredit sebesar Rp1,20 triliun. Penurunan kredit di provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sangat dalam hingga -71,41% (yoy) dari 1,74% (yoy) seiring nominal kredit yang turun Rp3,10 triliun. Adapun penurunan kredit terbesar terjadi pada pertambangan bijih tembaga yang berkontraksi sangat

dalam dari 3,47% (yoy) menjadi -91,91% (yoy). Provinsi Nusa Tenggara Barat (porsi: 36,07% terhadap total kredit yang disalurkan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara) juga mencatatkan pertumbuhan kredit yang melambat dari 17,97% (yoy) menjadi 17,49% (yoy) pada Desember 2024. Penurunan kredit di provinsi tersebut utamanya dipengaruhi oleh sektor pertanian yang berkontraksi sebesar -9,41% (yoy) dari 17,69% (yoy) seiring nominal kredit yang turun Rp600,13 miliar. Adapun penurunan kredit terbesar terjadi pada perkebunan tebu dan tanaman pemanis lainnya. Sebagai informasi, Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum lama ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Tebu Nasional sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024.

Grafik 22 Persebaran Kredit/Pembiayaan Bank Umum menurut Lokasi Proyek (Spasial)



Sumber: LBUT, diolah

Tabel 13 Porsi Kredit/Pembiayaan berdasarkan Sektor Ekonomi menurut Lokasi Proyek (Spasial)

No.	Sektor Ekonomi	Porsi					
		Pulau Jawa	Pulau Sumatera	Pulau Kalimantan	Pulau Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Papua dan Maluku
Lapangan Usaha							
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	3,41%	16,42%	22,82%	7,08%	5,06%	6,54%
2	Perikanan	0,17%	0,33%	0,31%	0,95%	0,42%	0,49%
3	Pertambangan dan Penggalian	3,35%	3,21%	15,98%	5,18%	12,82%	7,99%
4	Industri Pengolahan	17,05%	17,85%	6,26%	10,24%	4,29%	10,69%
5	Listrik, Gas, dan Air	2,81%	2,70%	2,30%	4,23%	1,77%	1,21%
6	Konstruksi	6,18%	2,42%	3,18%	2,85%	2,01%	2,44%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	14,90%	15,02%	12,50%	17,44%	20,24%	16,19%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	1,54%	1,32%	1,18%	1,48%	9,61%	1,97%
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	7,19%	2,34%	4,04%	1,17%	1,08%	2,57%
10	Perantara Keuangan	8,18%	0,23%	0,22%	0,35%	0,26%	0,37%
11	Real Estate	6,00%	1,86%	1,87%	2,75%	1,63%	1,24%
12	Administrasi Pemerintahan	1,43%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,32%
13	Jasa Pendidikan	0,26%	0,22%	0,11%	0,16%	0,25%	0,01%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65%	0,64%	0,14%	0,33%	0,95%	0,15%
15	Jasa Kemasyarakatan	2,53%	1,50%	1,63%	2,07%	2,40%	1,50%
16	Jasa Perorangan	0,03%	0,06%	0,02%	0,08%	0,10%	0,54%
17	Badan Internasional	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
19	Rumah Tangga	20,91%	29,60%	26,31%	35,16%	28,16%	38,23%
	-Pemilikan Rumah Tinggal	9,82%	8,59%	7,44%	10,25%	7,38%	4,34%
	-Pemilikan Flat atau Apartemen	0,53%	0,14%	0,08%	0,17%	0,05%	0,04%
	-Pemilikan Ruko atau Rukan	0,38%	0,34%	0,37%	0,51%	0,24%	0,30%
	-Pemilikan Kendaraan Bermotor	1,67%	2,34%	2,42%	2,33%	1,74%	0,93%
	-Pemilikan Peralatan Rumah Tangga	8,50%	18,20%	15,99%			
	Lainnya (termasuk pinjaman multiguna)				21,90%	18,76%	32,61%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3,42%	4,28%	1,11%	8,46%	8,95%	7,53%
Total		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Ket: *Shading* hijau menunjukkan lima sektor dengan porsi terbesar di wilayah tersebut

Sumber: LBUT, diolah

3. Perkembangan Kredit/Pembiayaan UMKM

Pada triwulan IV-2024, kredit UMKM masih tumbuh 3,37% (yoy), meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,03% (yoy). Porsi penyaluran kredit UMKM per Desember 2024 tercatat sebesar 19,24% terhadap total kredit bank umum.

Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (porsi 45,97%) yang tumbuh 0,87% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 4,58% (yoy) dan mendorong perlambatan pertumbuhan kredit UMKM. Selain itu, sektor ekonomi dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (17,39%) tercatat tumbuh sebesar 6,90%

(yoy), walaupun juga melambat dari 14,37% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Di tengah perlambatan kredit UMKM, kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan rasio NPL di bawah *threshold* 5% yaitu sebesar 3,76%, meskipun sedikit naik dari tahun sebelumnya sebesar 3,71%. Adapun kenaikan rasio NPL utamanya terjadi pada sektor *real estate* dan jasa perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,08% menjadi 4,36% serta sektor perikanan yang naik dari 3,96% menjadi 4,68%, dengan porsi NPL masing-masing sebesar 4,50% dan 1,43% dari total NPL UMKM. Sementara itu, terdapat perbaikan NPL kredit UMKM antara lain pada sektor pertambangan dan

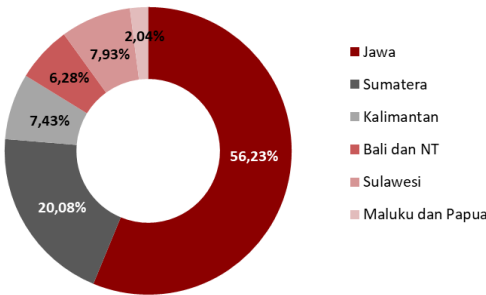
penggalian, industri pengolahan, konstruksi, serta transportasi.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 56,23%, terutama di provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, porsi kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) sebesar 23,68%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di provinsi Bangka Belitung sebesar 17,29% (yoy), meningkat dari tahun lalu sebesar 8,89% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM di Jawa Timur sebagai wilayah dengan porsi penyaluran kredit UMKM terbesar (14,98%), tumbuh 4,78% (yoy) walaupun melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,10% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (61,91%) yang tumbuh 1,64% (yoy),

melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,05% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM kelompok bank BUSN dan BPD tumbuh masing-masing 5,38% (yoy) dan 10,10% (yoy), relatif melambat dari tahun sebelumnya masing-masing 5,84% (yoy) dan 17,65% (yoy). Di sisi lain, kredit UMKM kelompok Bank Asing masih melanjutkan tren kontraksi -34,45% (yoy), kendati sudah mulai membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -39,63% (yoy).

Grafik 23 Penyebaran Kredit/Pembiayaan UMKM



Sumber: SPI Desember 2024

Tabel 14 Kredit/Pembiayaan UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Des '23	Sep'24	Des'24		Sep'24	Des'24	Des '23	Des '24
BUMN	917.478	935.980	932.511	61,91%	1,46%	-0,37%	8,05%	1,64%
BUSN	431.542	441.711	454.780	30,19%	1,54%	2,96%	5,84%	5,38%
BPD	108.053	118.216	118.963	7,90%	3,67%	0,63%	17,65%	10,10%
KCBLN	59	36	38	0,00%	-45,32%	5,92%	-39,63%	-34,45%
Total UMKM	1.457.132	1.495.943	1.506.293	100%	1,66%	0,69%	8,03%	3,37%

Sumber: SPI Desember 2024

B. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS

1. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Kredit/pembiayaan BPR dan BPRS (selanjutnya disebut kredit) pada triwulan IV-2024 tumbuh 6,12% (yoy), melambat dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 9,79% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, salah satu kredit terbesar antara lain disalurkan ke sektor Perdagangan, Restoran, dan Hotel dengan porsi 20,39%. Kredit pada sektor ini terkontraksi sebesar -1,92% (yoy), turun dari

8,60% (yoy) pada tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan perlambatan kredit BPR dan BPRS. Penyaluran pembiayaan terbesar kedua disalurkan ke sektor bukan lapangan usaha - rumah tangga (porsi 12,50%) tumbuh sebesar 12,70% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,15% (yoy). Meskipun tumbuh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan tersebut belum dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Sektor konstruksi (porsi 7,12%) meskipun tumbuh melambat namun masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi sebesar 11,51% (yoy) dari tahun lalu yang

mampu tumbuh 31,64% (yoy). Sektor pertanian, perburuhan dan kehutanan (porsi 6,02%) juga tercatat masih tumbuh 1,96% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,27% (yoy). Penyaluran kredit pada sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan (porsi: 5,35%) juga masih tumbuh 18,73% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 18,66% (yoy).

Transportasi, pergudangan dan komunikasi (porsi: 3,60%) dan industri pengolahan (porsi: 3,31%) juga masih mampu tumbuh meskipun melambat masing-masing sebesar 13,09% (yoy) dan 6,74% (yoy), dari tahun sebelumnya yang tumbuh 34,63% (yoy) dan 21,49% (yoy).

Tabel 15 Konsentrasi Kredit/Pembiayaan BPR/BPRS berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Kredit (Rp M)			qtq		yoy		Porsi
	Des-23	Sep'24	Des-24	Sep'24	Des-24	Des-23	Des-24	
Pertanian, Perburuhan, dan Kehutanan	9.896	10.087	10.090	-0,69%	0,03%	8,27%	1,96%	6,02%
Perikanan	645	613	592	-2,07%	-3,53%	5,87%	-8,24%	0,35%
Pertambangan dan Penggalian	1.410	1.225	1.122	-1,98%	-8,45%	39,65%	-20,43%	0,67%
Industri Pengolahan	5.186	5.552	5.536	2,88%	-0,30%	21,49%	6,74%	3,31%
Listrik, Gas dan Air	239	242	226	7,26%	-6,64%	26,53%	-5,65%	0,13%
Konstruksi	10.687	11.959	11.917	5,88%	-0,35%	31,64%	11,51%	7,12%
Perdagangan, Restoran dan Hotel	34.809	34.833	34.141	0,01%	-1,99%	8,60%	-1,92%	20,39%
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5.336	5.916	6.035	2,10%	2,00%	34,63%	13,09%	3,60%
Perantara Keuangan	1.969	2.246	2.335	2,77%	3,94%	20,03%	18,60%	1,39%
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	7.552	8.630	8.966	6,54%	3,89%	18,66%	18,73%	5,35%
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sosial Wajib	249	235	202	-2,31%	-13,89%	5,28%	-18,63%	0,12%
Jasa Pendidikan	508	517	543	1,95%	4,85%	19,44%	6,74%	0,32%
Jasa Sosial/Masyarakat	11.671	11.253	11.999	-0,30%	6,63%	3,99%	2,81%	7,16%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	200	175	163	-7,24%	-6,84%	-22,93%	-18,28%	0,10%
Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya	13	11	8	-29,12%	-33,48%	275,41%	-42,32%	0,00%
Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga	18.570	19.999	20.928	2,22%	4,65%	5,15%	12,70%	12,50%
Bukan Lapangan Usaha - Lainnya	48.877	51.847	52.673	1,84%	1,59%	4,93%	7,77%	31,45%
Total	157.816	165.342	167.474	1,70%	1,29%	9,79%	6,12%	100%

Sumber: SPI dan SPS Desember 2024

2. Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, sebagian besar kredit BPR dan BPRS disalurkan ke wilayah Jawa dengan porsi sebesar 59,49%. Besarnya kredit di wilayah Jawa sejalan dengan mayoritas BPR dan BPRS di Indonesia beroperasi di wilayah tersebut. Kredit di

wilayah ini tumbuh 5,08% (yoy), melambat dari tahun lalu yang tumbuh 9,16% (yoy). Jawa Tengah yang merupakan Provinsi dengan penyaluran kredit BPR dan BPRS terbesar (porsi 22,70%) tumbuh 0,87% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya

yang tumbuh 5,23% (yoy). Selain itu, Jawa Barat (porsi 14,07%) dan Jawa Timur (porsi 11,14%) juga tumbuh melambat sebesar 6,81% (yoy) dan 8,42% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing 7,16% (yoy) dan 17,16% (yoy), sehingga menarik ke bawah pertumbuhan penyaluran kredit BPR dan BPRS secara umum.

Selain itu, kredit kedua terbesar terdapat di wilayah Sumatera dengan porsi 19,93%. Kredit di wilayah ini tumbuh 11,39% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 13,34% (yoy). Penurunan utamanya didorong oleh Provinsi Sumatera Utara dan

Sumatera Selatan yang tumbuh masing-masing 8,70% (yoy) dan 8,57% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari pertumbuhannya, kredit di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tumbuh meningkat diantara wilayah lainnya, tercatat tumbuh sebesar 5,35% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,25% (yoy), namun dengan porsi sebesar 7,56% dari total kredit BPR dan BPRS. Pertumbuhan di wilayah ini terutama didorong oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang masing-masing tumbuh 4,53% (yoy) dan 6,52% (yoy).

Tabel 16 Persebaran Kredit/Pembiayaan BPR dan BPRS menurut Lokasi (Spasial)

	Kredit (RP M)				qtq			yoy		Porsi
	Des'23	Mar-24	Jun-24	Sep-24	Des-24	Sep-24	Des-24	Des'23	Des-24	
Jawa	94.817	97.523	97.392	98.660	99.632	1,30%	0,99%	9,16%	5,08%	59,49%
Sumatera	29.967	30.939	31.694	32.568	33.381	2,76%	2,49%	13,34%	11,39%	19,93%
Kalimantan	4.758	4.858	4.819	4.859	4.901	0,83%	0,87%	26,91%	3,02%	2,93%
Bali - Nusra	16.257	16.458	16.319	16.508	16.899	1,16%	2,37%	6,41%	3,95%	10,09%
Sulampua	12.018	12.128	12.350	12.747	12.661	3,21%	-0,68%	5,25%	5,35%	7,56%
Total	157.816	161.905	162.574	165.342	167.474	1,70%	1,29%	9,79%	6,12%	100%

Sumber: SPI dan SPI Desember 2024

4 Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

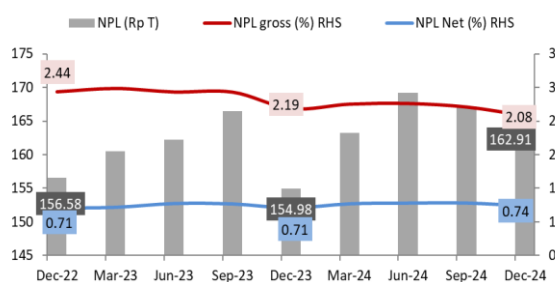
4 Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko bank umum cukup terkelola dengan baik, tecermin dari risiko kredit yang menurun serta kondisi likuiditas yang cukup memadai. Selain itu, risiko pasar juga cukup terjaga seiring upaya bank menyeimbangkan portofolio SSB (*bonds' portfolio rebalancing*) yang dimiliki. Namun demikian ke depannya, risiko likuiditas perlu tetap diwaspadai seiring dengan sentimen ketidakpastian kebijakan moneter dan perdagangan global.

1. Risiko Kredit

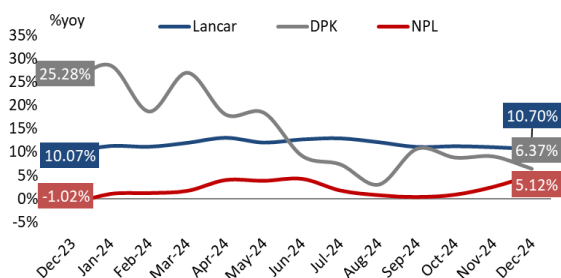
Pada akhir triwulan IV 2024, risiko kredit membaik tecermin dari rasio NPL *gross* tercatat sebesar 2,08%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,19%. Sejalan dengan turunnya NPL *gross*, NPL net cukup stabil sebesar 0,74%. Namun demikian, penurunan rasio NPL bukan disebabkan oleh penurunan nominal NPL secara umum. Pada periode laporan, nominal NPL naik 5,12% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -1,02% (yoy).

Grafik 24 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net



Sumber: SPI Desember 2024

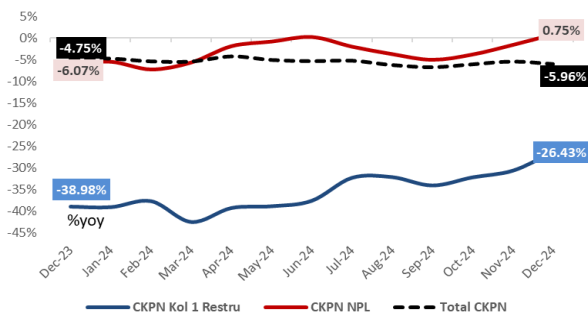
Grafik 25 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit



Sumber: SPI Desember 2024

Penurunan rasio NPL *gross* lebih disebabkan oleh kredit yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan nominal NPL. Sementara itu CKPN NPL tumbuh 0,75% (yoy) lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi -6,07% (yoy).

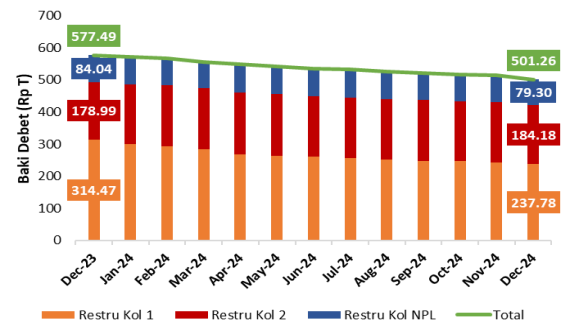
Secara total, CKPN berkontraksi -5,96% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang berkontraksi -4,75% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh berkontraksinya CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sebesar -26,43% (yoy). Sementara itu, CKPN kredit non restrukturisasi kualitas lancar berkontraksi sebesar -7,26% (yoy). Adapun besarnya penurunan CKPN kredit restrukturisasi kualitas lancar sejalan dengan berakhirnya stimulus kredit restrukturisasi yang telah dihentikan sepenuhnya pada 31 Maret 2024 dan normalisasi kegiatan bisnis perbankan. Meskipun CKPN menurun, *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan *coverage* CKPN terhadap kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) masih memadai masing-masing sebesar 14,29% dan 41,09%. Selain itu, *coverage* total CKPN terhadap NPL juga masih cukup baik sebesar 183,26%. Hal ini mengindikasikan bahwa antisipasi bank terhadap risiko kredit masih memadai.

Grafik 26 Pertumbuhan CKPN

Sumber: LBUT

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan sudah turun sebesar -13,20% (yoy) menjadi sebesar Rp501,26 Triliun. Hal ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan berakhirnya kebijakan stimulus restrukturisasi. Adapun kredit restrukturisasi masih didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar sebesar Rp237,78 Triliun atau 47,44% terhadap total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut turun -24,39% (yoy), melanjutkan kontraksi tahun sebelumnya yang juga turun -37,28% (yoy). Porsi kredit restrukturisasi kualitas Lancar terhadap total kredit juga mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 3,04% dari 4,44% pada Desember 2023. Penurunan kredit restrukturisasi kualitas Lancar tersebut

menyebabkan rasio *Loan at Risk* (LaR) menurun menjadi sebesar 9,28%, dari tahun sebelumnya 10,94%, dan lebih rendah dibandingkan rasio LaR sebelum pandemi (Des'19 = 9,93%).

Grafik 27 Tren Kredit Restrukturisasi

Sumber: LBUT

Meskipun kondisi risiko kredit mulai membaik, namun perbankan harus tetap mengedepankan aspek prudensial dan mengantisipasi terjadinya pemburukan kualitas kredit ke depan di tengah masih tingginya ketidakpastian global seperti risiko akibat eskalasi perang dagang, ketidakpastian kebijakan moneter global, perkembangan ekonomi negara-negara utama, serta kenaikan tensi geopolitik yang dapat berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik.

Tabel 17 Perkembangan Kualitas Kredit

Kualitas Kredit (Rp T)	Des'23	Sep-24	Des-24	Porsi	qtq		yoy	
					Sep'24	Des'24	Des'23	Des'24
1. Lancar	6,629	7,060	7,339	93.76%	1.53%	3.94%	10.07%	10.70%
- Non Restru	6,315	6,813	7,101	90.72%	1.80%	4.23%	14.37%	12.45%
- Restru	314	248	238	3.04%	-5.45%	-3.99%	-37.28%	-24.39%
2. DPK	306	352	326	4.16%	-0.95%	-7.39%	25.28%	6.37%
3. Kurang Lancar	23	22	21	0.26%	-12.02%	-7.43%	23.42%	-11.09%
4. Diragukan	25	27	23	0.30%	-6.92%	-14.06%	-2.85%	-6.09%
5. Macet	107	118	119	1.52%	2.62%	0.98%	-4.69%	11.21%
Nominal NPL	155	167	163		-1.21%	-2.56%	-1.02%	5.12%
Rasio NPL Gross %	2.19%	2.21%	2.08%		-6	-12	-25	-10
Rasio NPL Net %	0.71%	0.78%	0.74%		0	-4	0	2
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	621	599	563		-2.86%	-5.98%	-16.78%	-9.21%
Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %	8.75%	7.91%	7.20%		-34	-71	-286	-155
Loan at Risk (LaR)	776	766	726		-2.51%	-5.24%	-14.05%	-6.35%
Rasio Loan at Risk (LaR) %	10.94%	10.11%	9.28%		-40	-83	-311	-166
Total Kredit	7,090	7,579	7,827		1.35%	3.27%	10.38%	10.39%

Sumber: SPI Desember 2024

Keterangan: Perubahan (qtq dan yoy) untuk data rasio dalam *basis point* (bps)

1.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Pada periode laporan, terjadi penurunan risiko kredit produktif, baik pada jenis penggunaan modal kerja dan investasi secara yoy. Rasio NPL Kredit Modal Kerja

(KMK) dan Kredit Investasi (KI) masing-masing turun menjadi 2,57% dan 1,48% dari 2,78% dan 1,68% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio NPL Kredit Konsumsi (KK) sedikit meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,69% menjadi 1,90%.

Tabel 18 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Kredit (Rp T)	Des'22	Des'23	Des'24	yoy	
				Des '23	Des '24
KMK	2.940	3.236	3.506	10,05%	8,35%
KI	1.711	1.921	2.182	12,26%	13,62%
KK	1.772	1.934	2.139	9,10%	10,61%
Total Kredit	6.424	7.090	7.827	10,38%	10,39%

Sumber: SPI Desember 2024

Pada periode laporan, penurunan rasio NPL KMK terjadi di Bank Persero dan Bank Swasta. Rasio NPL KMK di Bank Persero dan Bank Swasta turun dari 2,69% dan 2,78% pada triwulan IV-2023 menjadi 2,36% dan 2,50%. Sementara itu, rasio NPL KMK di Bank BPD dan Bank KCBLN meningkat dari 6,09% dan 1,06% menjadi 7,78% dan 1,32%.

Sama halnya dengan KMK, perbaikan rasio NPL KI juga terjadi Bank Persero dan Bank Swasta. Rasio NPL KI di Bank Persero dan Bank Swasta turun dari 1,80% dan 1,51% pada triwulan IV-2023 menjadi 1,48% dan 1,40%. Sementara itu, rasio NPL KI di Bank BPD dan Bank KCBLN meningkat dari 2,11% dan 1,40% menjadi 2,45% dan 1,50%.

Tabel 19 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan

NPL Gross %	Des'22	Des'23	Des'24	yoy	
				Des '23	Des '24
NPL KMK	3,25	2,78	2,57	-47	-22
NPL KI	1,97	1,68	1,48	-29	-19
NPL KK	1,54	1,69	1,90	15	20
Total NPL	2,44	2,19	2,08	-25	-10

Adapun rasio NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Sementara itu, rasio NPL KK BPD tercatat yang terendah sebesar 1,01% relatif stabil namun sedikit naik dari periode yang sama tahun lalu yaitu 1,00%. Tingginya NPL KMK pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan monitoring, serta kompetensi dan *knowledge* SDM BPD yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, NPL BPD masih terjaga pada level 2,48%, walau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,18%.

Tabel 20 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK			NPL (%)
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	
Bank Persero	1.617.548	44,51	2,36	1.090.282	30,00	1,48	926.369	25,49	2,10	2,03
Bank Swasta	1.619.344	48,09	2,50	969.776	28,80	1,40	778.105	23,11	2,14	2,10
BPD	119.885	18,56	7,78	95.512	14,79	2,45	430.375	66,65	1,01	2,48
KCBLN	149.333	82,99	1,32	26.743	14,86	1,50	3.876	2,15	0,90	1,34
TOTAL	3.506.110	44,79	2,57	2.182.313	27,88	1,48	2.138.725	27,32	1,90	2,08

Sumber: SPI Desember 2024

1.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Beberapa sektor ekonomi menunjukkan perbaikan risiko kredit yang tecermin dari penurunan nominal NPL.

Penurunan nominal NPL terbesar terjadi pada sektor konstruksi. Risiko kredit pada sektor ini tercatat membaik dari 3,62% pada Desember 2023 menjadi 2,97% pada Desember 2024 dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp2,54 triliun (yoy). Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor konstruksi gedung dan bangunan sipil. Perbaikan risiko kredit pada sektor konstruksi sejalan dengan kinerja sektor tersebut yang menunjukkan dinamika positif, salah satunya didukung oleh anggaran infrastruktur nasional yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp423,4 triliun atau 12,7% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024. Dana tersebut digunakan untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek besar, termasuk jalan tol Trans-Sumatera dan infrastruktur di Ibu Kota Negara. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Untuk informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kontribusi sektor konstruksi dalam perekonomian Indonesia berada di urutan keempat, dilihat dari persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 10,43% pada triwulan IV-2024.

Penurunan nominal NPL terbesar kedua terjadi pada sektor industri pengolahan. Nominal NPL pada sektor ini tercatat turun Rp413,26 miliar atau secara rasio turun dari 3,26% pada Desember 2023 menjadi 2,94%

pada Desember 2024. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia yang mencatatkan penurunan nominal NPL terbesar meskipun porsi penyaluran kredit pada sub sektor tersebut relatif kecil. Selain itu, perbaikan risiko kredit pada sektor industri pengolahan juga didorong oleh subsektor industri mesin dan perlengkapannya. Adapun peningkatan kinerja sektor industri pengolahan secara umum didukung oleh kondisi ekonomi makro Indonesia yang tetap terjaga stabil serta kebijakan pemerintah yang akomodatif dalam mendorong kepercayaan industri untuk meningkatkan produksi dan investasi, sehingga memberikan optimisme bagi para pelaku industri terhadap prospek bisnis di tengah berbagai isu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun demikian, perlu juga diperhatikan NPL beberapa subsektor pada sektor ini yang meningkat antara lain industri tekstil, industri pakaian jadi, serta industri kertas, barang dari kertas, dan sejenisnya.

Penurunan nominal NPL terbesar ketiga terjadi pada sektor perikanan. Nominal NPL pada sektor ini tercatat turun Rp209,50 miliar atau secara rasio turun dari 5,30% menjadi 4,51%. Perbaikan rasio NPL tersebut utamanya didorong oleh sub sektor penangkapan biota di perairan umum dan budidaya biota di laut. Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mendorong pemanfaatan sumber daya laut melalui lima strategi ekonomi biru dalam menciptakan keberlanjutan ekologi dan ekonomi, merevitalisasi kesehatan laut, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan. Kelima strategi ekonomi biru tersebut mencakup perluasan

kawasan konservasi laut, Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan di pesisir darat dan laut, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Sektor kelautan dan perikanan rata-rata per tahunnya mampu menghasilkan lebih dari 20 juta ton produk, yang bersumber dari hasil tangkapan sekitar 7 juta ton, budi daya sebesar 5-6 juta ton, serta rumput laut di kisaran 9 juta ton.

Penurunan nominal NPL terbesar berikutnya terjadi pada sektor listrik, gas, dan air. Nominal NPL pada sektor tersebut turun Rp143,91 miliar, sehingga mendorong perbaikan risiko kredit dari 0,36% pada Desember 2023 menjadi 0,24% pada Desember 2024. Pendorong utama perbaikan risiko kredit pada sektor ini adalah subsektor gas dan ketenagalistrikan. Sebagai informasi, saat ini Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah serius menggarap potensi besar Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia sebagai sumber energi andalan di masa depan, salah satunya melalui akselerasi pengembangan EBT baik listrik maupun non listrik. Swasembada energi menjadi salah satu fokus utama sepanjang tahun 2024 dan menjadi salah satu target besar yang ingin diwujudkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya 5 tahun ke depan. Kementerian ESDM melaporkan bahwa penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik berbasis EBT hingga Desember 2024 sudah mencapai 547,41 Mega Watt (MW) dengan total kapasitas terpasang listrik bersih sebesar 14,11 Giga

Watt (GW). Capaian pembangunan energi bersih tersebut membuat realisasi investasi EBT sepanjang tahun 2024 mencapai USD1,49 miliar atau Rp23,13 triliun dan berhasil menciptakan sekitar 13.285 pekerjaan baur.

Selanjutnya, penurunan nominal NPL yang cukup besar terlihat pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Nominal NPL pada sektor ini turun sebesar Rp96,72 miliar sehingga menurunkan rasio NPL dari 2,97% pada Desember 2023 menjadi 2,75% pada Desember 2024. Perbaikan rasio NPL pada sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum didorong oleh subsektor restoran/rumah makan, bakar, dan jasa boga seiring dengan penurunan nominal NPL sebesar Rp231,74 miliar dan kenaikan penyaluran kredit sebesar Rp1,42 triliun. Perbaikan rasio NPL pada sektor ini juga didorong oleh subsektor penyediaan akomodasi hotel melati. Meskipun demikian, mengacu pada data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) rata-rata tingkat okupansi hotel di wilayah tujuan liburan masih di bawah 80%. Pelemahan daya beli masyarakat terutama kelas menengah serta kecenderungan untuk berlibur di dalam kota karena faktor cuaca buruk ditengarai berpengaruh pada minat masyarakat menginap di hotel saat liburan Nataru.

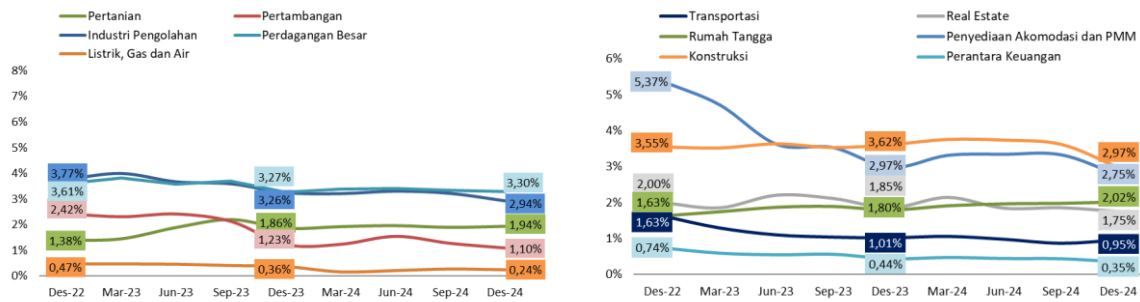
Sektor *real estate* juga mengalami penurunan nominal NPL cukup besar yaitu Rp87,18 miliar. Penurunan nominal NPL ini mendorong perbaikan risiko kredit pada sektor *real estate* dari 1,85% menjadi 1,75%. Subsektor jasa persewaan mesin dan peralatannya (tanpa operator), barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi menjadi pendorong utama penurunan

nominal NPL pada sektor *real estate*. Secara umum, perbaikan risiko kredit di sektor ini sejalan dengan pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha *real estate* pada triwulan IV-2024 yang tumbuh 2,97% (yoy) lebih tinggi dari 2,32% pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, penurunan NPL utamanya juga didorong oleh menurunnya nominal NPL pada jasa persewaan alat transportasi air. Perkembangan tersebut sejalan dengan data BPS yang mencatat jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri mencapai 25,9 juta orang selama Januari-Desember atau naik 20,46% (ctc) dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan jumlah penumpang tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang mendorong peningkatan mobilitas masyarakat termasuk penggunaan angkutan laut dalam negeri untuk keperluan bisnis maupun wisata. Selain itu, beberapa maskapai pelayaran juga kerap menawarkan promo dan diskon harga tiket menjelang libur Nataru sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan laut sebagai pilihan moda transportasi.

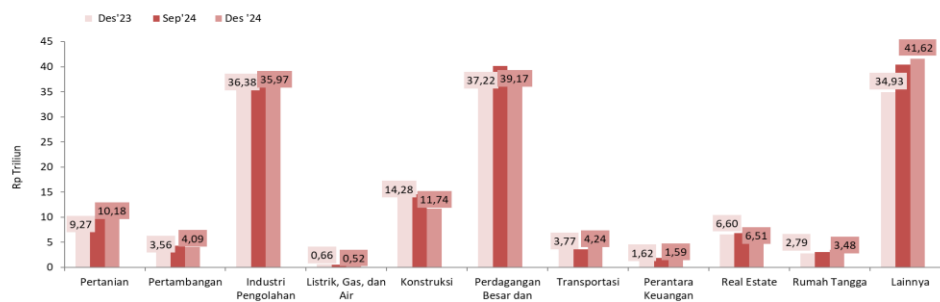
Di sisi lain, NPL pada sektor rumah tangga, yang merupakan sektor ekonomi terbesar, justru meningkat dari 1,80% pada Desember 2023 menjadi 2,02%, atau secara nominal meningkat Rp7,16 triliun. Peningkatan NPL pada sektor ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya NPL pada Rumah Tangga untuk Pemilikan Rumah Tinggal, dan Rumah Tangga untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor. Jika dilihat dari PDB Indonesia berdasarkan pengeluaran, pengeluaran

konsumsi rumah tangga memang tumbuh melambat, seiring dengan adanya indikasi penurunan jumlah kelas menengah yang diikuti dengan pelemahan daya beli masyarakat akibat berlanjutnya gelombang PHK di berbagai sektor industri.

Peningkatan rasio NPL juga terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran dari 3,27% pada Desember 2023 menjadi 3,30% pada Desember 2024. Peningkatan NPL pada sektor ini utamanya disebabkan oleh subsektor perdagangan besar dalam negeri selain ekspor dan impor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor). Sementara itu subsektor penjualan mobil, sepeda motor, dan penjualan eceran bahan bakar kendaraan yang menyumbang pemburukan risiko kredit pada triwulan sebelumnya justru mencatatkan perbaikan risiko kredit. Meskipun demikian, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil pada Desember 2024 tercatat sebanyak 79.806 unit atau masih terkontraksi -6,42% (yoy) namun membaik dari pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebesar -19,14% (yoy). Bahkan, pasar perdagangan mobil di Indonesia terutama untuk mobil baru masih lesu atau terkontraksi -13,99% (ctc) selama periode Januari-Desember 2024. Beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab turunnya penjualan mobil domestik sejak awal tahun karena masih cukup tingginya suku bunga global, nilai tukar Rupiah/USD yang fluktuatif, dan kenaikan upah pekerja yang tidak sepadan dengan besaran inflasi.

Grafik 28 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi

Sumber: SPI Desember 2024, diolah

Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: SPI Desember 2024, diolah

1.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi proyek, perbaikan risiko kredit hampir terjadi di semua wilayah kecuali Bali dan Nusa Tenggara serta Kalimantan. Secara umum, perbaikan risiko kredit terjadi seiring dengan resiliensi kondisi fundamental ekonomi domestik di tengah rambatan risiko global bersamaan dengan ketegangan geopolitik yang belum mereda.

Pada Desember 2024, rasio NPL di Wilayah Jawa tercatat membaik meskipun kredit tumbuh 10,63% (yoy), sedikit lebih rendah dari 11,62% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio NPL di Wilayah Jawa turun dari 2,28% pada Desember 2023 menjadi 2,16% pada Desember 2024 meskipun secara nominal NPL naik sebesar Rp5,11 triliun. Perbaikan rasio NPL di Wilayah Jawa utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1,48 triliun (porsi kredit Provinsi Jawa

Timur: 13,40% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Jawa) dengan perbaikan rasio NPL dari 3,06% menjadi 2,70%. Adapun penurunan nominal NPL Provinsi Jawa Timur utamanya didorong oleh sektor konstruksi sebesar Rp1,06 triliun atau secara rasio membaik dari 4,94% menjadi 2,41%. Perbaikan rasio NPL sektor konstruksi di Provinsi Jawa Timur sejalan dengan kinerja sektor tersebut yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dari 3,26% (yoy) pada triwulan IV-2023 menjadi 6,51% (yoy) pada triwulan IV-2024. Untuk informasi, sektor konstruksi berperan cukup besar terhadap struktur ekonomi Jawa Timur pada periode laporan dengan kontribusi sebesar 9,31% terhadap PDB.

Selanjutnya, wilayah Sumatera juga mencatatkan perbaikan rasio NPL dari 2,08% pada Desember 2023 menjadi 1,85% pada Desember 2024 dengan nominal NPL yang turun sebesar Rp596,48 miliar. Perbaikan

rasio NPL di wilayah tersebut utamanya didorong oleh turunnya nominal NPL di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp827,66 miliar (porsi kredit 16,38% dari total kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera) atau secara rasio turun dari 2,54% pada Desember 2023 menjadi 1,90% pada Desember 2024. Penurunan nominal NPL Provinsi Sumatera Selatan utamanya didorong oleh sektor pertanian atau secara rasio turun dari 5,16% menjadi 2,10%. Provinsi Kepulauan Riau juga mencatatkan penurunan nominal NPL cukup signifikan sebesar Rp396,54 miliar atau secara rasio turun dari 3,70% pada Desember 2023 menjadi 2,84% pada Desember 2024. Perbaikan kredit bermasalah tersebut utamanya pada subsektor industri kimia dasar sejalan dengan kinerja ekspor bahan kimia organik yang membaik, serta subsektor industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu sejalan dengan positifnya kinerja industri galangan kapal yang ditopang permintaan baik dari dalam negeri maupun untuk ekspor.

Perbaikan risiko kredit juga terlihat di wilayah Sulawesi dengan penurunan rasio NPL dari 3% pada Desember 2023 menjadi 2,64% pada Desember 2024 atau secara nominal turun Rp184,11 miliar (yoy). Penurunan tersebut didorong oleh perbaikan risiko kredit pada Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Rasio NPL Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 4,58%, turun dari 5,68% pada tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut sejalan dengan membaiknya kinerja kredit subsektor pertanian palawija jagung seiring dengan meningkatnya luas panen jagung di provinsi tersebut. Selanjutnya pada Provinsi Sulawesi Utara, rasio NPL tercatat menurun dari 2,29% pada Desember 2023 menjadi 1,87% pada Desember 2024 atau turun

sebesar Rp129,87 miliar (yoy). Perbaikan risiko kredit tersebut ditandai oleh penurunan rasio NPL pada berbagai sektor ekonomi dengan cakupan lebih dari 90% kredit produktif di provinsi tersebut.

Wilayah Maluku dan Papua juga mencatatkan penurunan rasio NPL dari 1,92% pada Desember 2023 menjadi 1,87% pada Desember 2024. Penurunan rasio NPL ini dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit sebesar 8,14% (yoy) yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (3,15% yoy), sementara nominal NPL justru meningkat sebesar Rp134,93 miliar (yoy). Berdasarkan provinsi, penurunan rasio NPL didorong oleh Provinsi Papua dengan NPL sebesar 2,07%, turun dari tahun sebelumnya sebesar 2,36%. Perbaikan rasio NPL pada Provinsi Papua utamanya pada sektor pertambangan sejalan dengan kredit yang tumbuh signifikan di tahun 2024 untuk mendukung ekspansi bisnis pertambangan bijih tembaga. Di sisi lain, tiga provinsi lain di wilayah Maluku dan Papua mengalami peningkatan rasio NPL dengan kenaikan rasio NPL terbesar pada Provinsi Maluku Utara sebesar 57 bps (yoy) menjadi 2,50% pada Desember 2024. Peningkatan rasio NPL di Provinsi Maluku utamanya disebabkan kenaikan risiko kredit pada sektor perdagangan yang merupakan sektor produktif terbesar (porsi 16,19%). Rasio NPL pada sektor tersebut meningkat dari 2,40% pada Desember 2023 menjadi 3,20% pada Desember 2024 khususnya terkait dengan perdagangan eceran.

Di sisi lain, wilayah Kalimantan serta Bali dan Nusa Tenggara tercatat mengalami kenaikan rasio NPL dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada wilayah Kalimantan, rasio NPL mengalami kenaikan dari 1,45%

pada Desember 2023 menjadi 1,83% pada bulan laporan. Kenaikan rasio NPL terjadi pada hampir semua provinsi pada wilayah Kalimantan dengan kenaikan terbesar pada Provinsi Kalimantan Tengah. Rasio NPL di provinsi tersebut meningkat dari 1,47% pada Desember 2023 menjadi 3,56% pada Desember 2024 atau secara nominal sebesar Rp1,73 triliun (yoy). Peningkatan risiko kredit tersebut utamanya pada sektor pertambangan dengan kenaikan nominal NPL mencapai Rp1,50 triliun (yoy) akibat penurunan kinerja penjualan salah satu debitur besar di sektor tersebut.

Sementara pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara, peningkatan rasio NPL tercatat sebesar 21 bps (yoy) menjadi 1,75% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp878,43 miliar (yoy). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan rasio NPL tertinggi yaitu sebesar 2,87%, meningkat dari 1,33% pada tahun sebelumnya. Kenaikan rasio NPL tersebut didorong oleh sektor perdagangan dengan porsi mencapai

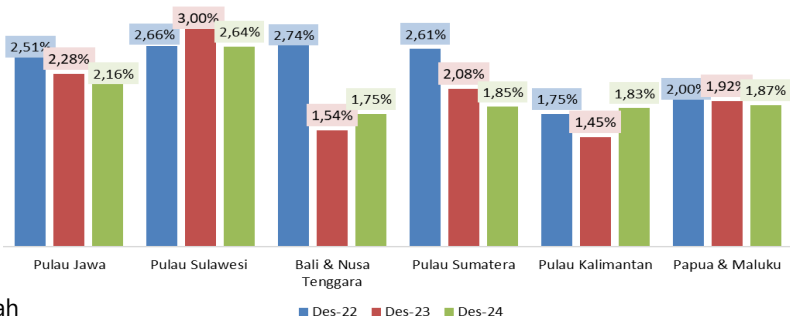
22,28% yang mengalami kenaikan signifikan dari 2,44% pada Desember 2023 menjadi 6,01% pada Desember 2024. Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengalami peningkatan rasio NPL dari 1,14% menjadi 1,61%. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan merupakan faktor utama pendorong kenaikan tersebut, dengan rasio NPL sebesar 9,31% pada Desember 2024, meningkat signifikan dari 1,72% pada Desember 2023. Adapun subsektor yang dengan peningkatan nominal NPL terbesar yaitu subsektor pertanian palawija jagung serta subsektor pembibitan dan budidaya sapi potong. Pada tahun 2024, berdasarkan data BPS terjadi penurunan luas panen jagung sebesar 2,94% (yoy) serta penurunan produksi jagung sebesar 5,56% (yoy) di Provinsi NTB. Penurunan kinerja kredit sektor pertanian tersebut sejalan dengan melambatnya pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 1,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 2,05% (yoy).

Tabel 21 NPL Gross Lokasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Periode Desember 2024

		Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Perantara Keuangan	Total
Jawa	NPL %	2,57%	0,89%	3,46%	0,24%	2,44%	3,31%	0,92%	2,24%	0,32%	2,16%
Sumatera	NPL %	1,44%	1,17%	0,95%	0,02%	5,86%	3,47%	1,04%	1,72%	4,75%	1,85%
Kalimantan	NPL %	0,54%	2,44%	0,73%	0,10%	5,49%	3,26%	0,80%	1,83%	2,11%	1,83%
Sulawesi	NPL %	5,12%	0,62%	4,96%	0,20%	5,66%	3,78%	2,87%	1,62%	2,10%	2,64%
Bali & Nusa Tenggara	NPL %	5,07%	0,03%	1,37%	2,05%	6,24%	2,82%	1,51%	1,25%	1,34%	1,75%
Papua & Maluku	NPL %	0,79%	0,27%	0,39%	0,06%	9,75%	3,33%	3,80%	1,45%	0,03%	1,87%
Total		1,94%	1,10%	2,94%	0,24%	2,97%	3,30%	0,95%	2,02%	0,35%	2,08%

Sumber: LBUT, diolah

Grafik 30 Tren Rasio NPL Gross berdasarkan Lokasi Proyek (Spasial)

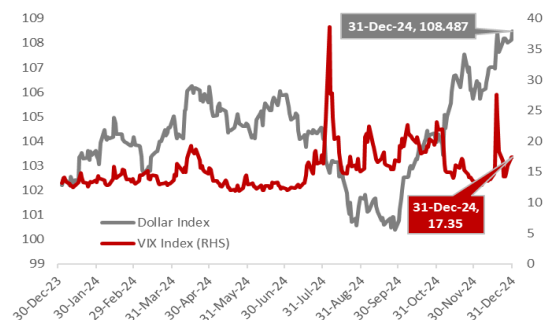


Sumber: LBUT, diolah

2. Risiko Pasar

Pada triwulan IV 2024, risiko pasar masih tetap terjaga di tengah dinamika hasil pemilu AS, transisi dan arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru AS dan domestik, serta gejolak geopolitik yang terjadi di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Hal ini juga tecermin dari *Volatility Index* (VIX) yang cenderung melandai pada Desember 2024 setelah beberapa waktu sebelumnya meningkat. Sementara itu, The Fed pada *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan Desember 2024 kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke level 4,25% - 4,50%, sehingga secara keseluruhan The Fed telah menurunkan suku bunga sebesar 100 bps pada tahun 2024. Di sisi lain, kecenderungan pemerintahan baru AS yang mendorong kebijakan ekonomi yang bersifat proteksionisme dan "*America First*" membuat permintaan dollar sebagai *safe haven asset* meningkat sehingga dollar indeks terus menguat. Dollar yang menguat, diiringi dengan kenaikan suku bunga membuat imbal hasil obligasi di pasar AS lebih menarik sehingga mendorong *capital outflow* dari EM ke AS. Nilai obligasi pada EM yang turun dapat memicu kerugian pada portfolio investasi bank. Selain itu, bank yang memiliki eksposur dalam USD (pembiayaan, investasi, trading) berpotensi mengalami kerugian nilai tukar dan *market losses*.

Grafik 31 Dolar Index dan VIX Index

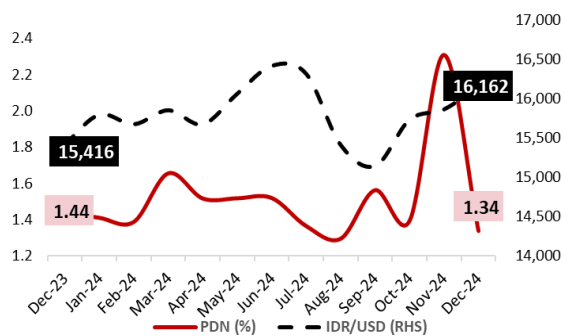


Sumber: Reuters

2.1 Risiko Nilai Tukar

Pada akhir Desember 2024, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp16.162/USD, melemah 4,62% dari posisi akhir Desember 2023 sebesar Rp15.416/USD. Namun demikian, pelemahan rupiah tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan mata uang negara lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa yang masing-masing melemah sebesar 12,35%, 10,26%, dan 6,19% *point-to-point* posisi akhir Desember 2024 terhadap akhir Desember 2023.

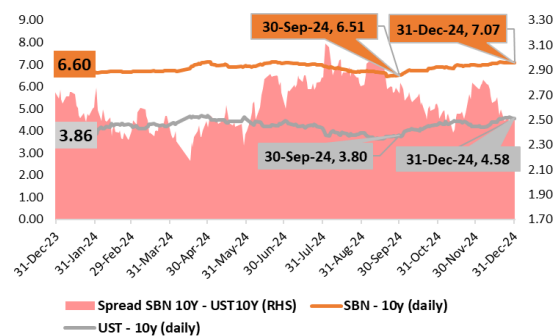
Seiring penguatan nilai tukar tersebut, Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan pada September 2024 masih terjaga rendah sebesar 1,34%, serta turun dari tahun lalu sebesar 1,44%. PDN masih berada pada posisi *Long* sehingga dampaknya terhadap pendapatan perbankan masih positif. Rasio PDN tersebut menunjukkan eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank yang terjaga dan masih berada pada level rendah jauh di bawah *threshold* 20%. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (54 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%).

Grafik 32 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar

Sumber: Bank Indonesia

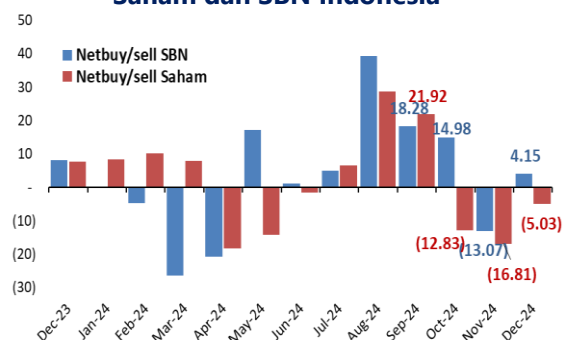
2.2 Risiko Suku Bunga

Perkembangan pasar tenaga kerja AS yang tetap solid namun mulai menunjukkan tanda-tanda moderasi mendorong The Fed untuk mulai memangkas suku bunga acuannya pada Desember 2024. Meskipun terjadi pemotongan suku bunga, *yield* US *Treasury* (UST) justru meningkat, mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kondisi fiskal AS dan risiko global yang meningkat, terutama setelah The Fed cenderung akan bersikap lebih *dovish* dalam pemotongan suku bunga di 2025. Di dalam negeri, *yield* Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun juga turut mengalami kenaikan, namun *spread* antara *yield* UST dan SBN cenderung menyempit. Penyempitan *spread* tersebut berpotensi mengurangi daya tarik terhadap aset domestik, namun tetap membuka peluang bagi arus masuk modal asing yang tercatat masih memasuki pasar dalam negeri.

Grafik 33 Spread Yield UST dan SBN

Sumber: PHEI dan Reuters

Pada pasar keuangan, kepercayaan dari investor masih cukup baik di pasar SBN yang selama setahun terakhir mencatatkan *capital inflow* atau *net buy* transaksi non-residen sebesar Rp34,59 Triliun. Sejalan dengan SBN, transaksi investor asing atau non-residen di pasar saham mencatatkan *net buy* atau *capital inflow* sebesar Rp14,97 Triliun dari Desember 2023 hingga Desember 2024.

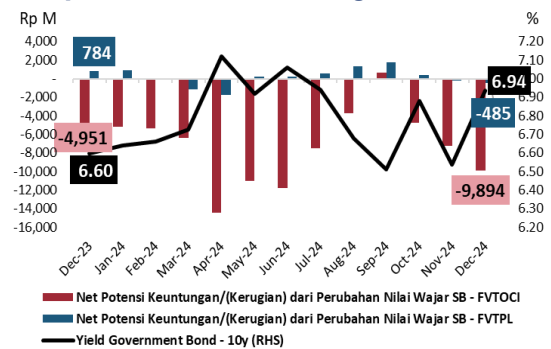
Grafik 34 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia

Sumber: DJPPR dan BEI

Di perbankan, risiko suku bunga yang dilihat dari nilai wajar berdasarkan *mark-to-market* masih terjaga. Pada Desember 2024, *yield* SBN naik menjadi 6,90% dibandingkan dengan posisi tahun lalu (Desember 2023) sebesar 6,60%. Nilai wajar portofolio obligasi kategori *Fair Value Through Profit or Loss* (FVTPL) masih menunjukkan potensi kerugian, diikuti juga

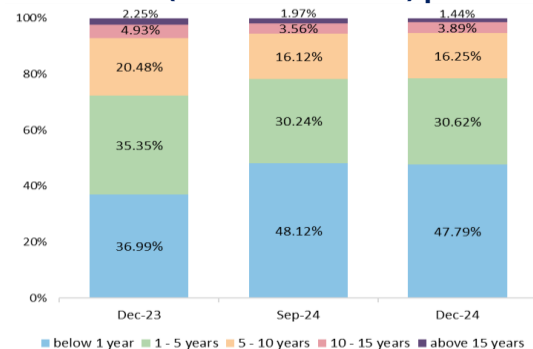
oleh potensi kerugian dari obligasi kategori *Fair Value Through Other Comprehensive Income* (FVTOCI) yang mencatatkan peningkatan seiring dengan adanya peningkatan *yield*. Selain itu, terdapat penurunan rata-rata sisa jatuh tempo SSB pada Desember 2024 dibandingkan Desember 2023, di mana terjadi *shifting* dari tenor jangka panjang menjadi menengah dan pendek, sehingga mengurangi fluktuasi nilai wajar SSB bank jika terjadi pergerakan suku bunga.

Grafik 35 Potensi Keuntungan/Kerugian Kepemilikan Surat Berharga Perbankan



Sumber: Reuters dan LBUT

Grafik 36 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan (FVTPL dan FVTOCI) per Tenor



Sumber: LBUT

Tabel 22 Porsi Kepemilikan Surat Berharga Perbankan berdasarkan Kategori

Kategori SSB	Nominal SSB (Rp T)			Porsi SSB (%)		
	Dec-23	Sep-24	Dec-24	Dec-23	Sep-24	Dec-24
Total KBMI 4	1,044.77	1,040.58	1,014.03	100%	100%	100%
FVTOCI	928.47	1,083.40	1,055.26	46.71%	47.67%	47.48%
FVTPL	157.71	250.97	226.19	7.93%	11.04%	10.18%
AC	901.62	938.52	941.17	45.36%	41.29%	42.35%
Total Industri	1,987.80	2,272.89	2,222.62	100%	100%	100%

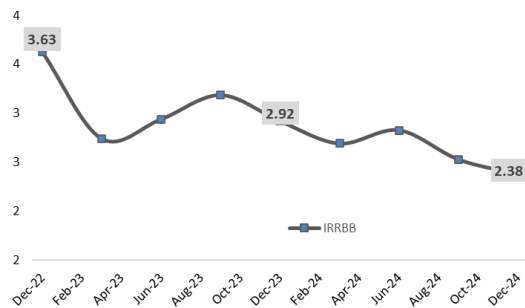
Sumber: LBUT

Risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* juga masih terjaga tecermin dari *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,38%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,92%. Penurunan IRRBB didorong oleh kewajiban dengan suku bunga tetap jangka panjang yang berkontraksi sebesar -5,22% (yoy) (tahun lalu berkontraksi -14,02%, yoy)

utamanya karena turunnya pinjaman yang diterima dan kewajiban pada bank lain. Di sisi lain, aset dengan suku bunga tetap jangka panjang tumbuh tinggi 16,22% (yoy), melampaui pertumbuhan tahun lalu yang tumbuh 6,72% (yoy), utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit. Sementara itu, aset jangka panjang dalam bentuk surat berharga yang dimiliki oleh perbankan turun sebesar -7,75% (yoy)

namun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -12,79% (yoy).

Grafik 37 Perkembangan Parameter IRRBB



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

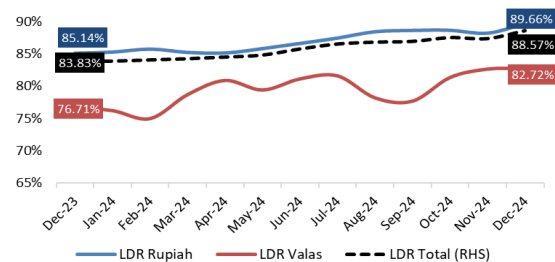
3. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih relatif memadai di tengah tumbuhnya penyaluran kredit. Hal ini tecermin dari rasio LDR yang masih terjaga berada dalam *range* (78%-92%). Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek juga tetap terjaga, tecermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masih berada jauh di atas *threshold*, rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) di atas 100%, serta kemampuan bank dalam mengelola dana stabil atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang masih berada di atas *threshold* (100%). Selain itu, dalam hal pemenuhan kondisi likuiditas untuk jangka pendek, perlu diperhatikan adanya kenaikan volume transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang juga diiringi dengan kenaikan suku bunga yang dapat mengindikasikan adanya kebutuhan dana yang bersifat *short-term* oleh bank.

LDR perbankan tercatat sebesar 88,57%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 83,83%. Peningkatan LDR didorong oleh naiknya LDR rupiah menjadi 89,66% dari tahun sebelumnya sebesar 85,14%. Selain itu,

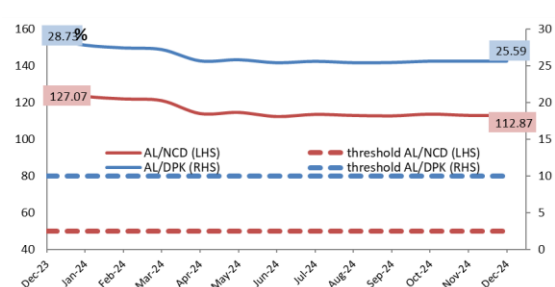
rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing masih terjaga sebesar 112,87% dan 25,59%, jauh di atas *threshold* (masing-masing sebesar 50% dan 10%), walaupun menurun dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 127,07% dan 28,73%. Penurunan antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK dan *Non Core Deposit* (NCD) yang melampaui pertumbuhan alat likuid, tercatat pada Desember 2024 masing-masing tumbuh sebesar 4,50% (yoy) dan 4,80% (yoy). Alat likuid per Desember 2024 berkontraksi sebesar -6,90% (yoy), masih dalam tren penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -4,50% (yoy).

Grafik 38 LDR berdasarkan Valuta



Sumber: LBUT

Grafik 39 AL/NCD dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tecermin dari LCR perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 213,23% meskipun menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 220,18%. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang tumbuh

sebesar 2,52% (yoy) melampaui *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang berkontraksi sebesar -0,72% (yoy).

Tabel 23 Perkembangan LCR Perbankan

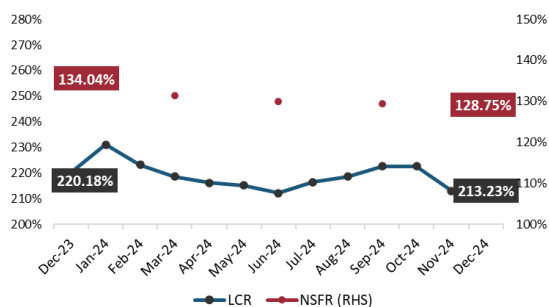
Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Dec-23	Sep-24	Dec-24
KBMI 1	257	287	331
KBMI 2	468	514	510
KBMI 3	627	681	659
KBMI 4	1,410	1,235	1,243
TOTAL HQLA	2,763	2,716	2,743

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Dec-23	Sep-24	Dec-24
KBMI 1	116	132	141
KBMI 2	186	186	193
KBMI 3	276	264	272
KBMI 4	677	638	680
TOTAL NCO	1,255	1,220	1,286

Kelompok	LCR (%)		
	Dec-23	Sep-24	Dec-24
KBMI 1	222.77	216.97	235.18
KBMI 2	251.14	276.69	264.71
KBMI 3	227.65	257.60	241.76
KBMI 4	208.18	193.61	182.67
LCR Industri	220.18	222.64	213.23

Sumber: OJK

Grafik 40 Perkembangan LCR dan NSFR

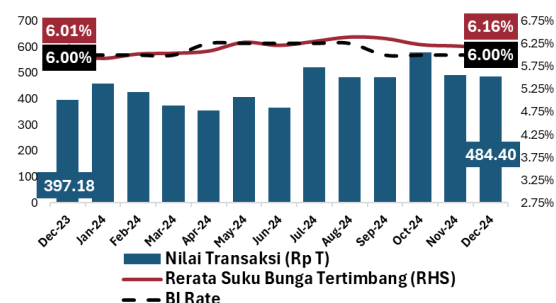


Sumber: APOLO

Lebih lanjut, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tecermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR yang terjaga pada level 128,75%, meski menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 134,04%.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui PUAB. Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB masih cukup terjaga, dengan volume transaksi yang meningkat diiringi suku bunga rata-rata tertimbang yang juga meningkat. Peningkatan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan suku bunga acuan BI Rate yang masih terjaga tinggi dalam setahun terakhir yaitu berada di level 6,00%. Selain itu, meningkatnya volume transaksi PUAB juga antara lain dapat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk pemenuhan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) BI.

Grafik 41 Perkembangan Suku Bunga PUAB



Sumber: LBUT Harian

4. Risiko Hukum

4.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Selama triwulan IV-2024, terdapat empat Kantor Bank (KB) dengan lima Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan Bank. Selanjutnya terhadap PKP yang telah diterima pada triwulan IV-2024 maupun pada periode sebelumnya, sebanyak dua KB dengan dua PKP masih diproses, satu PKP pada satu KB BU ditindaklanjuti melalui langkah-langkah pengawasan, dan delapan PKP pada enam KB telah dilimpahkan untuk penanganan

lebih lanjut kepada Satuan Kerja Penyidikan.

Selain itu, dalam rangka melakukan pendalaman terhadap indikasi penyimpangan ketentuan perbankan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Pengawasan Bank, selama triwulan IV-2024 telah dilaksanakan Pemeriksaan Khusus Indikasi Penyimpangan Ketentuan Perbankan (Riksus IPKP) bersama Pengawas terhadap empat KB.

**Tabel 24 Statistik Penanganan
Penyimpangan Ketentuan Perbankan**

Tahapan Kegiatan	Triwulan IV-2024	
	Total	
	KB	PKP
1. PKP yang diterima	4	5
2. PKP dalam proses *)	2	2
3. PKP yang dikembalikan *)	1	1
4. PKP yang dilimpahkan kepada Penyidik OJK *)	6	8

*) Termasuk *carryover* PKP yang diterima dari periode sebelumnya

Sumber: OJK

4.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan IV-2024 telah memberikan keterangan Ahli dan/atau Saksi sebanyak

14 kali dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait tindak pidana perbankan. Pemberian keterangan tersebut terdiri atas 10 permintaan dari Polri, satu permintaan dari Kejaksaan, RI dan tiga permintaan dari Satuan Kerja Penyidikan OJK.

Tabel 25 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Ahli	Saksi	Total
1	Polri	9	1	10
2	Kejaksaan RI	0	1	1
3	Penyidik OJK	3	0	3
Total		12	2	14

Sumber: OJK

Keterangan Ahli yang diberikan mencakup kasus-kasus yang ditangani oleh OJK maupun kasus yang dilaporkan oleh bank atau pihak lainnya kepada Polri dan Kejaksaan RI. Pemberian keterangan Ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank, serta pengalaman pegawai dalam menangani dugaan tipibank. Adapun keterangan Saksi diberikan terkait kasus yang tengah dalam proses persidangan, yang sebelumnya telah ditangani oleh OJK.

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

5 Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan 16 ketentuan terkait perbankan yaitu dalam bentuk 11 POJK dan lima SEOJK. Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut mengatur tentang Pelaporan Keuangan Bank dan transparansi, pembaharuan ketentuan rasio LCR dan NSFR, Konglomerasi Keuangan, Perintah Tertulis dan Kerahasiaan Bank. OJK juga menyampaikan kepada bank langkah-langkah dalam rangka transisi *global benchmark interest rate*, salah satunya pengakhiran Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) yang beralih pada Indonesia Overnight Index Average (IndoNIA).

1. Pengaturan Perbankan

Pada triwulan IV-2024, OJK menerbitkan 11 ketentuan terkait perbankan, yaitu dalam bentuk Peraturan OJK (POJK), antara lain sebagai berikut:

1.1 POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank

Pada 9 Oktober 2024, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank yang ditujukan untuk menekankan pentingnya perilaku berintegritas dari segenap *stakeholders* bank mencakup pegawai, pengurus, pemegang saham pengendali, dan setiap orang lainnya dalam proses pelaporan keuangan, sebagaimana hal ini sejalan dengan UU P2SK. Selain itu, dengan mengacu pada *best practice*, perlu diterapkan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan untuk mendorong laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Dalam POJK ini diatur tentang:

1) Prinsip penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank

untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan atau prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktik *window dressing*;

- 2) Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit;
- 3) dukungan pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal;
- 4) kewajiban pihak terafiliasi untuk menghindari tindakan intervensi kepada bank dalam proses pelaporan keuangan;
- 5) sanksi bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda;
- 6) bank menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam

proses pelaporan keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan; serta

- 7) bank membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

1.2 POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum

Dalam rangka tindak lanjut atas Destination Statement OJK 2022-2027 pada penguatan pengaturan terhadap prinsip prudensial yang selaras dengan standar internasional (BCBS) serta memperkuat likuiditas perbankan dengan mewujudkan rasio likuiditas jangka pendek yang *comparable* dan *reliable* bagi seluruh Bank Umum Konvensional (BUK), OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum pada tanggal 8 November 2024.

Pada POJK tersebut antara lain mengatur mengenai:

- 1) Kewajiban perhitungan dan pelaporan LCR bagi seluruh BUK (termasuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 Non Asing)
- 2) Penyesuaian terhadap pengkinian standar BCBS seperti penambahan komponen *High Quality Liquid Asset* (HQLA); dan

- 3) Payung pengaturan untuk *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP).

1.3 POJK Nomor 20 Tahun 2024 Perubahan atas POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum

Dalam rangka memperkuat likuiditas perbankan dengan mewujudkan rasio likuiditas jangka panjang yang *comparable* dan andal bagi seluruh Bank Umum Konvensional (BUK) serta penyelarasan dengan standar internasional (BCBS) dan standar akuntansi keuangan terkini, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 20 Tahun 2024 Perubahan atas POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum pada tanggal 8 November 2024.

POJK ini mengatur antara lain: (a) kewajiban perhitungan dan pelaporan NSFR bagi seluruh BUK (termasuk Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 Non Asing); dan (b) penyesuaian cakupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dalam perhitungan *Required Stable Funding* (RSF).

1.4 POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR dan BPR Syariah

OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi BPR dan BPR Syariah pada tanggal 1 Desember

2024 sebagai upaya meningkatkan pengawasan berbasis teknologi dan transparansi kondisi keuangan BPR dan BPRS, dengan digitalisasi laporan yang masih disampaikan secara luring serta dilakukan penyesuaian cakupan laporan dan tata cara publikasi laporan. POJK ini menjadi landasan hukum atas penyampaian seluruh laporan BPR dan BPR Syariah baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK melalui Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO) sejalan upaya simplifikasi pelaporan dengan cara mengurangi beban jumlah laporan melalui penggabungan laporan sejenis, penggabungan periodisasi laporan sejenis, dan mengurangi redundansi penyampaian laporan.

1.5 POJK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Pada 29 November 2024, OJK menetapkan POJK mengenai Kualitas Aset BPRS yang diantaranya mengatur mengenai Agunan Yang Diambil Alih serta penambahan kegiatan usaha yang diperkenankan, penerbitan standar akuntansi keuangan entitas privat yang merupakan pengganti dari standar akuntansi keuangan tanpa entitas publik yang akan berlaku 1 Januari 2025 dan penyelarasan dengan ketentuan terkini.

1.6 POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

POJK ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan Pilar ke-3 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI) 2023-2027 yaitu penguatan karakteristik perbankan syariah melalui

program kerja penguatan tata kelola syariah dan pilar ke-1 Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024-2027 (RP2B) yaitu penguatan struktur dan daya saing melalui program kerja penguatan penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR dan BPRS.

POJK ini juga diterbitkan dalam rangka melengkapi framework tata kelola di BPR Syariah yang akan mencakup tata kelola umum dan tata kelola syariah. Ketentuan mengenai tata kelola yang sifatnya umum akan mengacu pada POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah), sedangkan ketentuan tata kelola syariah akan mengacu pada POJK ini.

Secara umum ketentuan ini bertujuan untuk memberikan penguatan tata kelola dalam pemenuhan prinsip syariah pada kegiatan usaha dan operasional BPR Syariah, antara lain melalui pengaturan mengenai kerangka tata kelola syariah serta penguatan wewenang, struktur dan fungsi DPS.

1.7 POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan

Pada 13 Desember 2024, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan (POJK PKUP), yang merupakan tindak lanjut amanat UU P2SK. Selain itu, seiring dengan perkembangan produk bank, perlu dilakukan pembaruan atas ketentuan yang berlaku saat ini agar tetap sejalan dengan standar dan implementasi yang berlaku secara umum serta sesuai dengan kebutuhan nasabah.

POJK ini mengatur antara lain mengenai:

- 1) penyesuaian cakupan perusahaan anak (*investee*) Bank Umum agar selaras dengan UU P2SK;
- 2) kegiatan penyertaan modal oleh BPR/BPRS, antara lain definisi, cakupan *investee*, batas penyertaan modal, serta persyaratan dan perizinan penyertaan modal;
- 3) pengalihan piutang oleh Bank mencakup Bank Umum, Bank Umum Syariah, BPR, dan BPR Syariah;
- 4) penjaminan oleh Bank Umum dengan mengacu pada standar/praktik yang berlaku secara internasional;
- 5) implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan perjanjian elektronik dalam penyelenggaraan produk Bank, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) aktivitas Bank sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).

1.8 POJK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku

Dalam rangka penguatan pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan integritas sektor jasa keuangan, diperlukan penyediaan data dan informasi rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan. Untuk mendukung penyediaan data dan informasi rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan dimaksud, diperlukan sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengatur, mengembangkan, dan melakukan pengelolaan data dan informasi rekam jejak pelaku melalui sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan. Untuk itu, ketentuan

mengenai pengelolaan data dan informasi rekam jejak pelaku di sektor jasa keuangan perlu diatur dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengelolaan informasi rekam jejak pelaku melalui sistem informasi pelaku di sektor jasa keuangan agar dapat berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mengatur antara lain:

- 1) Ruang lingkup pihak yang tergolong sebagai Pelaku, yaitu orang perseorangan, korporasi, badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya;
- 2) Ruang lingkup pihak yang tergolong sebagai Pengguna, yaitu LJK dan pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan;
- 3) Persyaratan bagi Pengguna untuk memperoleh Hak Akses SIPELAKU;
- 4) Kriteria pertimbangan Pengguna dalam mengakses dan menggunakan Rekam Jejak dalam SIPELAKU;
- 5) Cakupan dan sumber data dan/atau informasi yang terkandung dalam Rekam Jejak dalam SIPELAKU;
- 6) Kewajiban dan larangan bagi Pengguna dalam penggunaan dan pengelolaan Rekam Jejak SIPELAKU; dan
- 7) Sanksi administratif atas pelanggaran kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

1.9 POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

OJK telah menetapkan POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan pada tanggal 19 Desember 2024, yang merupakan tindak lanjut UU P2SK, yaitu dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 212 Bab XV Konglomerasi Keuangan dan kebutuhan penyesuaian dengan *best practice* dan perkembangan kondisi terkini antara lain *Joint Forum Principles for the Supervision of Financial Conglomerate* serta *benchmark* ketentuan dari negara lain.

Selain itu, perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas lembaga jasa keuangan saat ini telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik dari sisi produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan, sehingga menyebabkan peningkatan eksposur risiko industri jasa keuangan di Indonesia yang harus diantisipasi melalui pengaturan dan pengawasan yang optimal untuk mengurangi probabilitas dan dampak kegagalan Konglomerasi Keuangan melalui mitigasi risiko yang ada pada konglomerasi keuangan yang memiliki keterkaitan.

Adapun cakupan pengaturan pada POJK dimaksud antara lain meliputi:

- 1) Kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK);
- 2) Persyaratan pembentukan PIKK;
- 3) Kepemilikan dan permodalan PIKK;
- 4) Kegiatan usaha PIKK;
- 5) Tugas dan tanggung jawab PIKK;
- 6) Kewajiban PIKK menyusun rencana korporasi dan memiliki piagam korporasi;

- 7) Kriteria kepemilikan dan pengendalian dalam Konglomerasi Keuangan beserta perubahannya;
- 8) Kepengurusan PIKK;
- 9) Penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali bagi pihak utama PIKK;
- 10) Larangan kepemilikan silang dalam Konglomerasi Keuangan;
- 11) Kewenangan yang dimiliki OJK terkait Konglomerasi Keuangan;
- 12) Pengakhiran PIKK; dan
- 13) Kewajiban PIKK menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dan laporan insidentil dalam hal dibutuhkan.

1.10 POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis

Pada 19 Desember 2024, OJK telah menetapkan POJK Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis yang merupakan amandemen ketentuan perintah tertulis sehubungan dengan terbitnya UU P2SK dengan menambahkan ketentuan yang mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan OJK dalam pemberian perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) dan menyesuaikan ketentuan terkait pengawasan *market conduct* dalam "pemberian perintah atau tindakan tertentu". Dengan diterbitkannya POJK Perintah Tertulis, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap SJK, baik pengawasan prudensial maupun pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), sehingga seluruh kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

dan stabil, serta mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain:

- 1) penambahan ketentuan perintah P3IK sesuai Pasal 8A UU OJK, dengan disusun secara OJK *wide* (memenuhi kepentingan seluruh LJK);
- 2) penyelarasan ketentuan terkait pengawasan *market conduct* (EPK) dalam "pemberian perintah atau tindakan tertentu" sesuai Pasal 244 UU P2SK; dan
- 3) pencabutan atas 3 (tiga) POJK yaitu POJK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis, POJK Nomor 18 /POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank, dan POJK Nomor 40 /POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan LJK Nonbank.

1.11 POJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 40A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Pasal 41A ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.

POJK ini mengatur beberapa hal, antara lain mengenai:

- 1) Definisi dan cakupan Rahasia Bank serta penjelasan bahwa nasabah debitur atau nasabah penerima fasilitas tidak termasuk Rahasia Bank, namun tetap dijaga

kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi dan POJK mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan;

- 2) Kewajiban Bank dan Pihak Terafiliasi merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya;
- 3) 13 hal yang dikecualikan dari Rahasia Bank;
- 4) Kewajiban Bank dan Pihak Terafiliasi merahasiakan informasi mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya dan/atau Nasabah Investor dan Investasinya;
- 5) Mekanisme pembukaan Rahasia Bank untuk pengecualian Rahasia Bank yang memerlukan izin atau koordinasi dengan OJK;
- 6) Mekanisme umum terkait pengecualian Rahasia Bank yang pelaksanaannya tidak memerlukan izin dari OJK dimana mengacu pada UU P2SK; dan
- 7) Batasan tujuan pertukaran informasi antar-Bank, kewajiban Bank yang menerima informasi untuk merahasiakan informasi yang diterima, serta larangan pertukaran informasi dilakukan untuk kepentingan pemasaran.

1.12 SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK Tata

Kelola BPR dan BPR Syariah), antara lain mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR, serta diperlukan perubahan tata cara penilaian pelaksanaan (*self assessment*) tata kelola BPR sejalan dengan prinsip penilaian tingkat kesehatan BPR berbasis risiko.

1.13 SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

SEOJK ini disusun dalam rangka memperkuat penerapan tata kelola di perbankan syariah, dimana sebelumnya telah diterbitkan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BUS dan UUS POJK Tata Kelola Syariah.

SEOJK ini sebagai aturan pelaksanaan dari POJK Tata Kelola Syariah yang mengatur mengenai DPS (penilaian kemampuan dan kepatutan/PKK, tugas dan tanggung jawab, hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris, dukungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, remunerasi, serta laporan hasil pengawasan DPS), fungsi terkait tata kelola syariah (manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah), serta kaji ulang ekstern penerapan tata kelola syariah.

1.14 SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat

Sehubungan dengan pemberlakuan POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah pada

1 Desember 2024, OJK telah menerbitkan SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat. SEOJK Nomor 16/SEOJK.03/2024 menjadi pedoman teknis yang memuat daftar laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan melalui APOLO, format, tata cara, mekanisme dalam pelaksanaan penyusunan dan penyampaian pelaporan serta petunjuk terkait transparansi kondisi keuangan bagi BPR.

1.15 SEOJK 17/SEOJK.03/2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah

SEOJK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan Transparansi Kondisi Keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (POJK APOLO BPR dan BPR Syariah), antara lain mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR Syariah.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang penjelasan lebih lanjut antara lain mengenai daftar laporan berkala dan laporan insidental yang disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO), format dan tata cara penyusunan dan penyampaian laporan khususnya Laporan Insidental, Laporan Berkala Bulanan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi, tata cara

penyampaian penanggung jawab pelaporan, persyaratan perangkat pendukung pelaporan, dan contoh pengenaan sanksi laporan.

1.16 SEOJK 21/SEOJK.03/2024 tentang Pedoman Akuntansi Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat (SEOJK PA BPR)

OJK telah menetapkan SEOJK 21/SEOJK.03/2024 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan bagi Bank Perekonomian Rakyat yang merupakan tindak lanjut dari penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik efektif per 1 Januari 2025 yang saat ini digunakan oleh BPR. Mempertimbangkan adanya pengkinian standar akuntansi dimaksud, diperlukan pengkinian panduan akuntansi yang sebelumnya diatur dalam SEOJK Nomor 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Bagi BPR dan SEBI Nomor 12/14/DKBU tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR. SEOJK ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar akuntansi keuangan yang relevan bagi industri BPR.

1.17 Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP)

Pada triwulan IV-2024, OJK juga menerbitkan satu Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK, yaitu:

Surat KEPP Nomor S-33/D.03/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Transisi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)

Sehubungan dengan *global benchmark interest rate reform*, yang dilakukan melalui pengakhiran Interbank Offered Rate (IBOR) untuk memperkuat kredibilitas dan kepercayaan terhadap pasar keuangan global, Indonesia telah mengambil langkah meningkatkan kredibilitas dan *robustness* suku bunga referensi dengan melakukan pengakhiran Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) dan beralih pada Indonesia Overnight Index Average (IndONIA). Adapun publikasi JIBOR ditetapkan akan berakhir pada 31 Desember 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK menyampaikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka transisi JIBOR, termasuk menyampaikan data kepada pengawas untuk mendukung monitoring atas transisi dari JIBOR ke Indonesia Overnight Index Average (IndONIA).

Pokok-pokok kebijakan dalam surat tersebut antara lain bank diminta untuk:

- 1) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan transisi penggunaan JIBOR sebagai suku bunga acuan dapat berjalan dengan baik;
- 2) Memastikan implementasi tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang memadai termasuk persiapan infrastruktur dan pengendalian internal dalam transisi JIBOR;
- 3) Memasukkan rencana transisi JIBOR dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2025-2027 yang disampaikan kepada OJK pada akhir November 2024 sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
- 4) Menyampaikan data eksposur JIBOR yang dimiliki serta rencana tindak lanjut terkait diskontinuitas JIBOR kepada OJK.

2. Kelembagaan Perbankan

2.1 Bank Umum Konvensional (BUK)

2.1.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2024, telah diselesaikan 13 perizinan kelembagaan BUK, terdiri dari enam perizinan pembukaan kantor cabang, dua perizinan pembukaan Kantor Wilayah (Kanwil), satu perizinan penutupan kantor cabang, satu perizinan pemindahan kantor wilayah, dan tiga perizinan peningkatan Kantor Cabang Pembantu (KCP) menjadi Kantor Cabang (KC).

2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2024, terdapat 113.993 jaringan kantor BUK, terdiri dari 113.929 jaringan kantor di dalam negeri dan 64 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) sebanyak 90.022 unit.

Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan sebanyak 1.184 jaringan kantor, terutama pada Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) dan terminal perbankan elektronik (ATM/CDM/CRM) yang masing-masing turun sebesar 44 unit dan 1.151 unit menjadi 18.770 unit Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) dan 90.022 unit terminal perbankan elektronik pada triwulan – IV 2024.

Tabel 26 Jaringan Kantor BUK

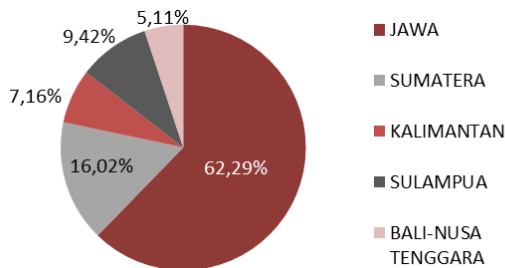
JARINGAN KANTOR	2023 TW IV	2024 TW I	2024 TW III	2024 TW IV	Δ
1 Kantor Pusat Operasional	37	37	37	37	-
2 Kantor Pusat Non Operasional	53	53	53	53	-
3 Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN)	7	7	7	7	-
4 Unit Usaha Syariah	20	18	19	19	-
5 Kantor Wilayah	152	138	150	152	2
6 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.705	2.629	2.690	2.697	7
7 Kantor Cabang (Luar Negeri)	17	16	17	17	-
8 Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri	19	19	19	19	-
9 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	19.148	18.847	18.814	18.770	(44)
10 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	7	7	6	6	-
11 Kantor Fungsional (KF)	1.168	1.165	1.216	1.217	1
12 Kantor dibawah KCP KCBLN yg tidak termasuk KF	9	9	9	9	-
13 Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	5	5	6	6	-
14 Terminal Perbankan Elektronik (ATM/CDM/CRM)	91.412	90.601	91.173	90.022	(1.151)
JARINGAN KANTOR UUS	-	-	-	-	-
15 Kantor Cabang (Dalam Negeri)	190	142	156	155	(1)
16 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	236	222	225	229	4
17 Kantor Kas	-	-	-	-	-
18 Kantor Fungsional	189	189	186	187	1
19 <i>Payment Point</i>	-	-	-	-	-
20 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	-	-	-	-	-
21 Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM)	165	164	165	169	4
22 Layanan Syariah Bank Umum	-	231	228	222	(6)
TOTAL	115.539	114.500	115.177	113.993	(1.184)

Sumber: APOLO OJK

Ket: merupakan jaringan kantor BUK di seluruh Indonesia

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor BUK di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 70.964 jaringan kantor (62,29%), diikuti pulau Sumatera 18.254 (16,02%), Sulampua 10.729 (9,42%), Kalimantan 8.157 (7,16%), dan Bali-Nusa Tenggara 5.825 (5,11%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan jaringan kantor pada seluruh wilayah dengan penurunan terbanyak di wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 42 Penyebaran Jaringan Kantor BUK



Sumber: APOLO OJK

2.2 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)

2.2.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2024, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui, yaitu permohonan penggabungan dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persetujuan penggabungan BPR, yaitu pada:
 - a. PT BPR Baskara Dewata ke dalam PT BPR Restu Dewata
 - b. PT BPR Restu Klaten Makmur, PT BPR Restu Artha Yogyakarta, PT BPR Restu Tawangmangu Jaya dan PT BPR Cepu Nasionalbank ke dalam PT BPR Restu Artha Abadi.
 - c. PT BPR Batola ke dalam PT BPR Tapinsejahtera.

- d. PT BPR Universal Kalbar, PT BPR Universal Karya Mandiri Riau dan PT BPR Universal Sentosa ke dalam PT BPR Universal.
- e. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jawa Barat Perseroda, PT BPR Majalengka Jabar (Perseroda) dan PT BPR Wibawa Mukti Jabar ke dalam PT BPR Karya Utama Jabar.

2. Pencabutan izin usaha BPR, yaitu pada:

- a. PT BPR Kertosono Saranaartha.
- b. PT BPR Ngunut Artha
- c. PT BPR Duta Niaga.
- d. PT BPR Pakan Rabaa Solok Selatan
- e. PT BPR Kencana
- f. PT BPR Arfak Indonesia

2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2024, terdapat 1.356 BPR dengan 8.254 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.882 di antaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Terdapat perbedaan data perubahan jumlah BPR dengan data perizinan disebabkan antara lain terdapat perbedaan antara periode perizinan dengan periode efektif berlakunya perizinan karena adanya masa proses transisi, termasuk *carry over* hasil perizinan periode sebelumnya.

Tabel 27 Jaringan Kantor BPR

JARINGAN KANTOR	2024		Δ
	TW III	TW IV	
- Kantor Pusat (KP)	1.370	1.356	(14)
- Kantor Cabang (KC)	1.937	1.947	10
- Kantor Kas (KK)	2.644	2.579	(65)
- ATM	380	542	162
- EDC	1.923	1.920	(3)
TOTAL	8.254	8.344	90

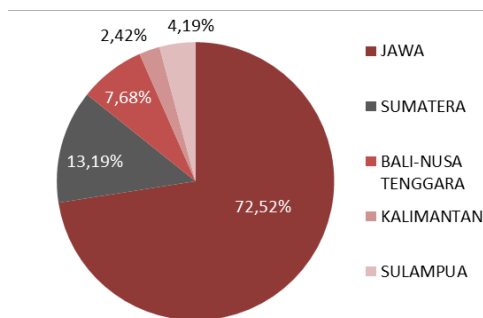
Sumber: OJK

Selain itu, terdapat perubahan mengenai jaringan kantor sehubungan dengan ketentuan pelaporan terbaru bagi BPR dan

BPRS yang mengatur di dalamnya terkait informasi jenis jaringan kantor, termasuk ATM dan EDC.

Berdasarkan lokasi, penyebaran jaringan kantor BPR (termasuk ATM dan EDC) masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 72,52% (6.060 jaringan kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 13,19% (1.102 jaringan kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan jaringan kantor hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan terbanyak di wilayah Jawa, sementara terdapat pengurangan jumlah jaringan kantor di wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Grafik 43 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



Sumber: OJK

2.2.3 Tata Kelola

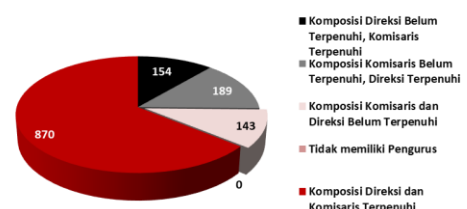
Penerapan tata kelola BPR dan BPRS diatur dalam masing-masing POJK Nomor 4/POJK.03/2015 (BPR) dan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 (BPRS) dan dibedakan sesuai besaran modal inti. Besaran modal inti BPR dan BPRS akan menentukan antara lain syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan jumlah DPS.

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS guna menyempurnakan 2 POJK sebelumnya

tersebut serta mulai efektif digunakan per tanggal 1 Juli 2024.

Sampai dengan Desember 2024, terdapat 870 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 143 BPR yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan SDM yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

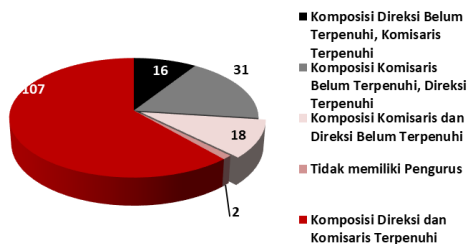
Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

Untuk BPRS, sampai dengan Desember 2024, terdapat 107 BPRS yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sementara itu, masih terdapat 18 BPRS yang belum memenuhi jumlah anggota keduanya untuk Direksi dan Dewan Komisaris sesuai persyaratan.

Grafik 45 Jumlah BPRS berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



Sumber: OJK

2.3 Perbankan Syariah

2.3.1 Perizinan

Pada triwulan IV-2024, terdapat satu proses perizinan kelembagaan untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan tiga proses perizinan untuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Untuk perizinan BPRS, pada triwulan IV-2024 terdapat satu jenis permohonan perizinan BPRS yang telah disetujui yaitu permohonan pencabutan izin usaha atas PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Juang Perseroda.

2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan IV-2024, terdapat 11.313 jaringan kantor BUS, dengan tiga di antaranya merupakan jaringan kantor luar negeri (dua KC dan satu terminal elektronik). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, secara total terdapat peningkatan sebanyak 3.231 jaringan kantor BUS, dengan peningkatan terbesar yaitu pada terminal elektronik dan Kantor Fungsional Bank Umum Syariah.

Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

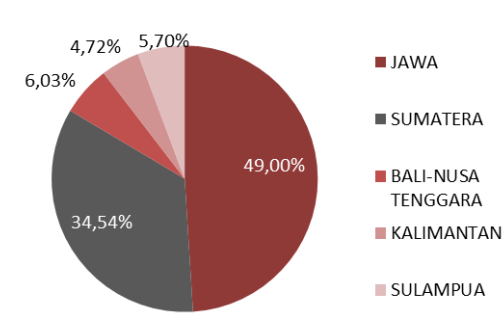
		2024		
JARINGAN KANTOR		TW III	TW IV	Δ
1	Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	7	7	-
2	Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	8	8	-
3	Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	21	21	-
4	Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	411	411	-
5	Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	2	2	-
6	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.576	1.574	(2)
7	Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	348	1.891	1.543
8	Kantor Perwakilan Bank Umum Syariah di Luar Negeri	-	-	-
9	Terminal Elektronik (ATM/CDM/CRM) Bank Umum Syariah	5.709	7.399	1.690
Layanan Syariah Bank Umum		8.082	11.313	3.231

Sumber: APOLO OJK

Sebaran jaringan kantor BUS dalam negeri sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera masing-masing memiliki porsi 49,00% (5.542 kantor) dan 34,54% (3.907 kantor). Selanjutnya diikuti Bali-Nusa Tenggara (6,03%, 682 kantor), Sulampua (5,70%, 645 kantor), dan Kalimantan (4,72%, 534 kantor).

Terdapat peningkatan jaringan kantor di seluruh wilayah, dengan peningkatan terbanyak pada wilayah Jawa dan Sumatera.

Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor BUS



Sumber: APOLO OJK

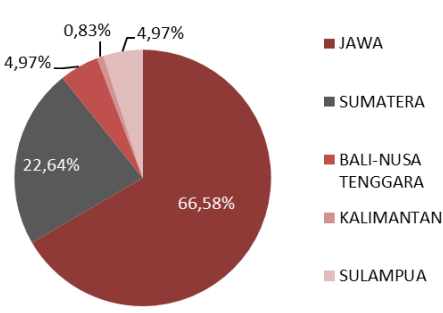
Untuk BPRS, pada periode laporan terdapat 1.930 jaringan kantor, meningkat 256 jaringan kantor dari triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, sebaran jaringan kantor BPRS umumnya terkonsentrasi di wilayah Jawa (66,58%, 1.285 kantor), diikuti Sumatera (22,64%, 437 kantor), Sulampua (4,97%, 96 kantor), Bali-Nusa Tenggara (4,97%, 96 kantor), dan Kalimantan (0,83%, 16 kantor).

Tabel 29 Jaringan Kantor BPRS

JARINGAN KANTOR	2024		Δ
	TW III	TW IV	
- Kantor Pusat (KP)	173	174	-
- Kantor Cabang (KC)	219	794	3
- Kantor Kas (KK)	278	308	(11)
- ATM	71	118	-
- <i>Payment Point</i>	441	536	264
TOTAL	1.182	1.930	256

Sumber: Laporan Bulanan BPRS, diolah

Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPRS



Sumber: OJK

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga terkait Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

6 Koordinasi Antar Lembaga Terkait Perbankan

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pada triwulan IV-2024, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia serta ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Selain itu, OJK juga turut aktif dalam fora internasional, antara lain *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*, *Working Committee-ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)*, dan *National Working Group on Benchmark Reform (NWGBR)*.

1. Koordinasi Multi-Lembaga dalam menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), maka Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).

Pada Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan Ketua Dewan Komisiner LPS melaksanakan Rapat Berkala KSSK I tahun 2025. Dalam siaran Pers KSSK tersebut disimpulkan bahwa, **Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) pada triwulan IV-2024 tetap terjaga di tengah divergensi pertumbuhan ekonomi dunia serta**

ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. OJK bersama dengan KSSK akan terus memperkuat kewaspadaan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, dalam upaya memitigasi potensi dampak rambatan faktor-faktor risiko global terhadap perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri.

Dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional, OJK menerapkan langkah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan amanat UU P2SK, OJK mendapatkan mandat baru yaitu pengawasan PIKK, kegiatan Bullion, Keuangan Derivatif, aset keuangan digital termasuk aset kripto, dan koperasi *open loop*. Proses peralihan dan penerimaan mandat tersebut telah dilaksanakan dengan baik termasuk penyiapan infrastruktur pengaturan dan pengawasannya;
- 2) Seiring peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto serta sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan digital di

Indonesia, OJK telah menerbitkan tiga ketentuan tentang penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto, mekanisme pelaporan dan pengawasan aset keuangan digital dan aset kripto, dan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA);

- 3) Dalam rangka melaksanakan amanat UU P2SK, OJK telah menyelaraskan beberapa ketentuan (POJK dan SEOJK) dan kebijakan OJK, antara lain mengenai: pemanfaatan dan tata kelola SIPELAKU, sebuah sistem yang memuat data dan informasi rekam jejak pelaku *fraud* di sektor jasa keuangan; Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), dan Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum untuk memperkuat manajemen risiko likuiditas; serta pengaturan Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK). Di sisi perlindungan konsumen, telah diterbitkan ketentuan tentang Penilaian Sendiri terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- 4) OJK mendukung program Pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui penggunaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pemberian kredit/pembiayaan perumahan sebagai salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur, dan bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian

kredit/pembiayaan. OJK juga menyiapkan kanal pengaduan khusus pada Kontak 157 untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk MBR dimaksud. Selanjutnya, OJK bersama *stakeholder* terkait akan membahas mengenai dukungan likuiditas bagi pembiayaan program 3 juta rumah mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program dimaksud, antara lain penyempurnaan skema Efek Beragun Aset Surat Partisipasi (EBA SP) di Pasar Modal;

- 5) OJK juga telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan, yaitu: kualitas KPR dapat dinilai hanya berdasarkan ketepatan pembayaran (1 pilar), lebih longgar dibandingkan kredit lainnya di mana bank menilai dengan 3 pilar (prospek usaha, kinerja debitur, kemampuan membayar); KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR Kredit); serta mencabut larangan terkait dengan pemberian kredit pengadaan/pengolahan tanah sejak 1 Januari 2023 untuk mendukung sisi pendanaan kepada pengembang perumahan.
- 6) OJK bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon

- Indonesia (IDXCarbon) pada 20 Januari 2025. Peresmian ini merupakan milestone dalam penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia. Selain itu, dalam upaya membangun ekosistem karbon yang transparan, berintegritas, inklusif, dan adil, maka Pemerintah Indonesia telah melakukan penguatan atas elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon sesuai *best practice* internasional, yakni meliputi penguatan: (1) Sistem Registri Nasional (SRN); (2) Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV); (3) Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK); dan (4) Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* (CA) pada perdagangan karbon luar negeri; dan
- 7) Sementara dari sisi perlindungan konsumen, sepanjang tahun 2024 OJK telah menerima dan menangani 16.231 pengaduan terkait entitas ilegal, yang terdiri dari pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. Adapun Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 2.930 entitas pinjaman online ilegal dan 310 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Satgas PASTI juga telah memproses pemblokiran terhadap 228 rekening bank atau virtual account yang dilaporkan terkait dengan aktivitas keuangan ilegal, serta 1.692 nomor kontak pihak penagih (*debt collector*) pinjaman online ilegal.

KSSK berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dalam mengantisipasi potensi risiko dari perkembangan ekonomi

dan dinamika geopolitik dunia terutama rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik, termasuk memperkuat *coordinated policy response* dan kewaspadaan untuk memitigasi berbagai risiko bagi perekonomian dan SSK. KSSK juga telah dan terus berkomitmen untuk mendukung sektor riil dan program Asta Cita Pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi mencapai kemakmuran bangsa.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan April 2025.

2. Koordinasi Bilateral

2.1. OJK dan BI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UUP2SK) mengamanatkan bahwa OJK agar berkoordinasi dengan BI dan LPS, salah satunya dalam penetapan Bank Sistemik, yang bertujuan untuk mencegah krisis sistem keuangan di bidang perbankan. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman (NK) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK.

Pada triwulan IV-2024, OJK dan BI telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- 1) Pembahasan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 serta Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan IAKD 2024-2028;

- 2) Konfirmasi hasil rekapitulasi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dengan Rencana Bisnis Bank;
- 3) Pembahasan tindak lanjut penanganan transaksi ilegal;
- 4) Pembahasan terkait perizinan dan/atau persetujuan SJK terintegrasi dalam *Task Force* BI dan OJK;
- 5) Pembahasan dan penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh kedua lembaga;
- 6) Pembahasan kondisi industri perbankan maupun individu bank tertentu; dan
- 7) Pembahasan isu-isu terkait pertukaran data untuk mendukung pelaksanaan tugas kedua lembaga.

2.2. OJK dan LPS

Sesuai dengan amanat UU PPKSK serta bentuk respons atas diterbitkannya UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang memerlukan koordinasi yang lebih intensif sesuai dengan Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan IV-2024 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS yaitu:

- 1) Pertukaran data dan perkembangan kondisi bank umum maupun BPR/BPRS;
- 2) Pembahasan dan penandatanganan penginian petunjuk pelaksanaan mengenai pertukaran data dan/atau informasi di sektor perbankan;
- 3) Persiapan dan pelaksanaan resolusi BPR/BPRS; dan
- 4) Penyampaian tanggapan tertulis dalam rangka penerbitan rancangan peraturan perundang-undangan; dan

OJK, BI, dan LPS juga melakukan koordinasi dalam hal penetapan metodologi dan pemutakhiran Bank Sistemik periode Oktober 2024 s.d. Maret 2025. Selain itu OJK, BI, dan LPS telah menandatangani penginian petunjuk pelaksanaan bersama BI, OJK, dan LPS mengenai forum integrasi pelaporan.

3. Partisipasi OJK dalam Fora Internasional

3.1. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

OJK merupakan anggota BCBS dan terlibat aktif dalam berbagai pembahasan baik di BCBS Level 1 maupun Groups BCBS di Level 2 dan Level 3 yaitu Supervisory Cooperation Group (SCG), Policy and Standard Group (PSG), Risk and Vulnerability Assessment Group (RVG), Task Force on Climate-related Financial Risk (TCFR), Accounting and Audit Expert Group (AAEG), dan Financial and Technology Group (FTG). Pada Triwulan IV-2024, OJK aktif berpartisipasi dalam menghadiri berbagai pertemuan dan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- 1) *BCBS Committee*
 Pertemuan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) pada bulan November 2024 secara virtual. Pada pertemuan ini dilakukan beberapa agenda pembahasan, sebagai berikut:
 - a) Program kerja BCBS Committee 2025-2026 yang disusun berdasarkan 4 besaran tema, yaitu: *Basel III Implementation, Risk assessment and safeguarding resilience, Digitalisation of finance,*

dan *Liquidity* terkait pembelajaran dari 2023 *banking turmoil*. BCBS juga akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan isu *climate-related financial risks* dan bekerjasama dengan pihak eksternal, termasuk *standard-setting bodies* lainnya;

- b) Implementasi Basel III: BCBS menegaskan kembali harapan untuk mengimplementasikan semua aspek kerangka kerja Basel III secara penuh, konsisten, dan sesegera mungkin. Komitmen ini juga baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20;
- c) Intermediasi Keuangan Non-Bank: BCBS membahas keterkaitan bank dengan intermediasi keuangan non-bank (*Non-Bank Financial Intermediation/NBFI*). NBFI terus berkembang dengan cara yang dapat menimbulkan risiko dan kerentanan terhadap sistem perbankan global. Bank memiliki keterkaitan dengan NBFI melalui berbagai aktivitas dan layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesenjangan data menghambat pengukuran dan pengelolaan risiko yang efektif terhadap keterkaitan bank dengan NBFI. Oleh karena itu, bank dan otoritas pengawas harus terus waspada terhadap risiko ini serta meningkatkan pemahaman mereka mengenai cakupan dan materialitas keterkaitan tersebut;
- d) BCBS juga meninjau komentar yang diterima dari konsultasi mengenai

pedoman manajemen risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*). Berdasarkan masukan tersebut, BCBS menyetujui seperangkat pedoman akhir yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam manajemen risiko kredit pihak lawan yang terungkap selama episode tekanan di sektor NBFI;

- e) Global Banking Turmoil 2023: BCBS membahas upayanya dalam mengembangkan pedoman untuk mendukung otoritas pengawas dalam pekerjaan sehari-hari, sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pengawasan berdasarkan pelajaran dari gejolak perbankan tahun 2023. Upaya ini mencakup pengawasan risiko likuiditas dan risiko suku bunga dalam pembukuan perbankan, penilaian keberlanjutan model bisnis bank, serta pentingnya penerapan penilaian pengawasan yang efektif;
- f) Kebijakan Makroprudensial: BCBS mengevaluasi berbagai praktik yang diterapkan oleh yurisdiksi yang menetapkan tingkat positif untuk Basel III Countercyclical Capital Buffer. BCBS mendukung dan melihat manfaat dari kemampuan otoritas untuk menetapkan *positive "cycle-neutral" rate*. Oleh karena itu, BCBS menyepakati untuk mempublikasikan laporan mengenai praktik yang telah ada untuk mendukung yurisdiksi yang ingin menerapkan *positive "cycle-neutral" rate*; dan
- g) Risiko Keuangan Terkait Iklim: BCBS terus meninjau kerangka kerja

pengungkapan Pillar 3 yang diusulkan terkait risiko keuangan yang berhubungan dengan iklim.

- 2) OJK juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan pada level 2 dan level 3 BCBS yaitu *Policy and Standard Group* (PSG), *Supervisory Cooperation Group* (SCG), *Task Force on Climate-related Financial Risk* (TCFR), *Financial and Technology Group* (FTG), *Accounting and Auditing Expert Group* (AAEG), *Market Risk Group* (MRG) yang dilakukan pada triwulan 4/2024. Partisipasi OJK dilakukan dengan memberikan masukan dan tanggapan atas *on going works* yang dilakukan oleh BCBS.

3.2. Partisipasi OJK dalam *National Working Group on Benchmark Reform* (NWGBR)

Guna memperkuat kredibilitas dan kepercayaan terhadap pasar keuangan global, Indonesia telah mengambil langkah meningkatkan kredibilitas dan *robustness* suku bunga referensi dengan melakukan pengakhiran Jakarta *Interbank Offered Rate* (JIBOR) dan beralih pada Indonesia *Overnight Index Average* (IndONIA). Adapun publikasi JIBOR ditetapkan akan berakhir pada 31 Desember 2025.

Sebagai upaya memastikan transisi JIBOR berjalan lancar, NWGBR yang terdiri dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) menerbitkan panduan transisi pengakhiran JIBOR pada 27 September 2024. Selanjutnya, OJK mengeluarkan Surat KEPP Nomor S-33/D.03/2024 tanggal 10 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Transisi Jakarta

Interbank Offered Rate (JIBOR) yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka transisi JIBOR, termasuk menyampaikan data kepada pengawas untuk mendukung monitoring atas transisi ini.

3.3. Working Committee - ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF)

Sebagai tindak lanjut atas pertemuan WC-ABIF ke-16 yang dipimpin oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan National Bank of Cambodia (NBC) selaku *co-chair* WC-ABIF 2024-2026 pada 11 September 2024, Co-chair WC-ABIF mengundang otoritas pengawas perbankan dari masing-masing AMS untuk melakukan *focus group discussion* (FGD) bilateral atas proposal ABIF *review guideline*. FGD dimaksud bertujuan memperoleh informasi dan masukan yang lebih spesifik dan teknis untuk menyempurnakan proposal ABIF *review guideline* sebelum dibahas kembali pada pertemuan WC-ABIF mendatang.

4. Pengembangan Industri Perbankan

4.1 Pelaksanaan *Capacity Development* Bagi Industri Perbankan

OJK telah menyelenggarakan kegiatan *capacity building* dalam rangka meningkatkan pemahaman industri perbankan terkait perubahan iklim, risiko, dampak, upaya adaptasi dan mitigasi secara komprehensif, serta implementasi kerangka *climate risk stress testing* secara khusus.

Latar belakang pelaksanaan *capacity building* tersebut adalah adanya kebutuhan membangun pemahaman dan meningkatkan kapasitas industri perbankan

sebagai salah satu aspek *enabler* dalam pengembangan maupun implementasi kebijakan Keuangan Berkelanjutan, serta dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Adapun selama periode triwulan IV – 2024, OJK telah melaksanakan kegiatan *capacity development* yaitu berupa Seminar dan *Workshop* bertema *Climate Risk Integration in the Banking Risk Framework* bekerjasama dengan dengan United Nation Environment Programme Finance Initiative.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Meningkatkan Kontribusi Perbankan dalam Perekonomian

Indonesia sempat mencatatkan beberapa kali rekor pertumbuhan ekonomi hingga 8%....

Pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,03%, sedikit melambat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang tumbuh 5,05%. Namun demikian, jika melihat tren pertumbuhan ekonomi setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong stabil di kisaran angka 5%. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 diproyeksikan melambat, didorong kekhawatiran akan terhambatnya transaksi perdagangan internasional yang disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan impor. Sejalan dengan hal tersebut, IMF dalam proyeksi terbarunya¹ memperkirakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2025 sebesar 4,7%, sedangkan OECD² juga merevisi ke bawah pertumbuhan PDB Indonesia menjadi sebesar 4,9%.

Dalam perhitungan Kementerian PPN/Bappenas, untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*/MIT), Indonesia harus tumbuh minimal 6-7%³. Pertumbuhan ekonomi 8% diperlukan agar Indonesia keluar dari MIT dan mewujudkan cita-cita tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sampai dengan tahun 2029, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Jika melihat data ke belakang, angka pertumbuhan 8% memang pernah beberapa kali menjadi capaian angka pertumbuhan Indonesia, yaitu pada tahun 1968, 1973, 1977, 1980 dan 1995⁴.

Pertumbuhan ekonomi **tahun 1968** ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalan yang tumbuh pesat, seiring dengan mulai terbukanya Indonesia terhadap penanaman modal asing pertama, yaitu pemberian izin kepada Freeport untuk menambang di Papua pada 1967. Setelah Freeport, beberapa Perusahaan tambang asing masuk diantaranya ALCOA, Billton Mij, INCO, Kennecott, dan US Stell. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi didorong oleh pertambangan berlanjut hingga **tahun 1973**. Terjadi krisis minyak yang dipicu oleh Israel, Mesir dan Suriah yang menyebabkan blokade minyak oleh negara Timur Tengah ke negara Barat dan menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, yang akhirnya menguntungkan Indonesia sebagai produsen minyak. Sektor migas menjadi penyumbang hingga 75% pendapatan negara saat itu. Keuntungan yang didapat dari penjualan minyak dunia terus membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada **tahun 1977**, pertumbuhan ekonomi didorong oleh industrialisasi, yang mana Pemerintah mulai mengembangkan industri manufaktur, dengan memanfaatkan hasil dari *oil boom* yang terjadi sebelumnya, Pemerintah saat itu membangun beberapa industri strategis antara lain industri substitusi impor, dan industri dasar seperti besi dan baja, serta petrokimia. Masuknya modal asing pada industri manufaktur menyebabkan pertumbuhan yang tinggi pada sektor ini, meski kontribusinya terhadap PDB masih di bawah sektor pertambangan dan pertanian.

¹ <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025>

² https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-interim-report-march-2025_89af4857-en.html

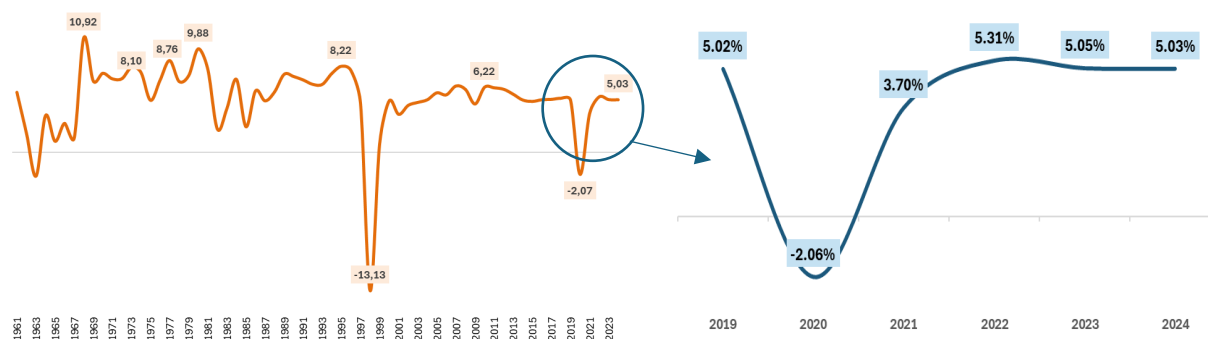
³ https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-21-I-P3DI-November-2024-213.pdf

⁴ <https://datanesia.id/tumbuh-8-sebuah-catatan-sejarah/>

Tahun 1980 pertumbuhan PDB Indonesia tergolong terbaik dalam kurun waktu 15 tahun yaitu mencapai 10%. Hal ini didorong oleh *oil boom* kedua yang dipicu oleh Revolusi Iran yang mengganggu produksi minyak dunia, sehingga harga minyak melambung tinggi. Indonesia menangkap peluang ini sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar. Namun ketika pada pertengahan tahun, harga minyak jatuh. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal yang mendorong ekspor seperti pembebasan bea cukai ekspor-impor, insentif bagi eksportir non-minyak dikombinasi dengan deregulasi agar Indonesia mengurangi ketergantungan pendapatan dari minyak dan mulai menggenjot ekspor non-migas. Selain itu, pertumbuhan juga terjadi dari sektor padat karya salah satunya manufaktur yang turut meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga perekonomian Indonesia masih terjaga. Industrialisasi dinyatakan sebagai tujuan dan faktor utama perkembangan ekonomi, dengan pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 22,17%. Pencanangan swasembada pangan juga menyebabkan sektor pertanian masih memimpin kontribusi terhadap PDB pada 1983-1990.

Tahun 1995 merupakan terakhir kalinya Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 8%, yang mana pertumbuhan ekonomi ditopang sektor industri pengolahan, yang sampai hari ini merupakan salah satu sektor ekonomi dengan kontribusi besar terhadap perekonomian.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

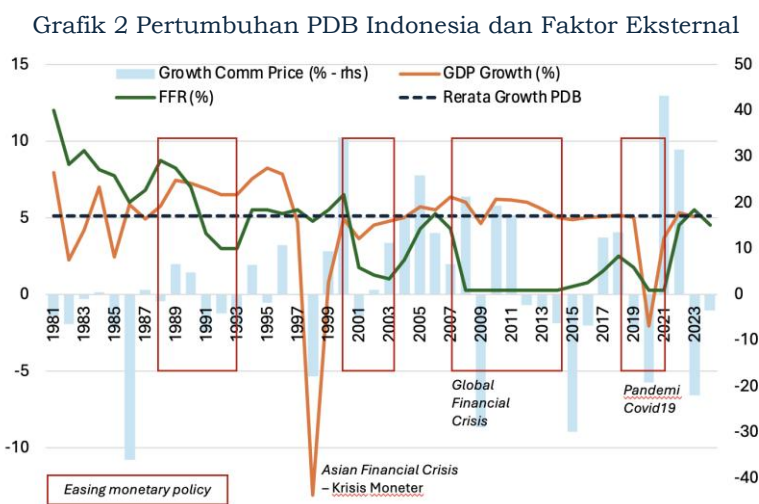
Belajar dari masa lalu, tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh bauran kondisi global dan kebijakan ekonomi domestik. Peluang yang didapat dari tingginya harga minyak, pemanfaatan hasil ekspor untuk perluasan investasi dalam negeri, serta perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, telah dilakukan sebelumnya untuk mendorong meningkatnya PDB dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi likuiditas global sebagai pendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi...

Dalam konteks perekonomian global yang semakin terbuka dan saling terhubung, PDB suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh dinamika eksternal. Selain faktor harga komoditas, kondisi likuiditas global juga menjadi salah satu faktor yang menentukan arah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Likuiditas global merujuk pada ketersediaan dana atau modal di pasar keuangan internasional, yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara-negara maju. Saat

negara-negara maju melakukan pelonggaran kebijakan moneter, baik melalui penurunan suku bunga maupun *quantitative easing*, likuiditas global berada dalam kondisi melimpah, dan aliran dana cenderung mengalir ke negara-negara berkembang yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, utamanya jika didukung oleh kondisi sosial politik yang tergolong stabil. Sebaliknya, ketika terjadi pengetatan likuiditas global, akan terjadi arus keluar modal (*capital outflow*) dari negara-negara berkembang. Fenomena ini sering kali disertai dengan tekanan pada nilai tukar, yang dapat menyebabkan depresiasi mata uang lokal dan berdampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi negara tujuan investasi. Dengan demikian, interaksi antara likuiditas global dan PDB merupakan faktor krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi, khususnya bagi negara-negara dengan keterbukaan ekonomi yang tinggi.



Sumber: Reuters, BPS

Siklus ekonomi dan kebijakan moneter memiliki keterkaitan yang erat, karena kebijakan moneter digunakan untuk memengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter longgar atau ekspansif umumnya diambil jika terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi (resesi) atau bahkan saat terjadi krisis, sebagaimana kebijakan *quantitative easing* yang diambil AS setelah Global Financial Crisis (GFC) tahun 2008. Jika suku bunga diturunkan, maka biaya dana akan menjadi lebih murah sehingga mendorong investasi dan konsumsi. Dari grafik 2, terlihat bahwa ketika terjadi pelonggaran kebijakan moneter global yang ditandai dengan penurunan Fed Fund Rate (FFR) yang cukup signifikan dan cepat, memicu pertumbuhan PDB Indonesia di atas rerata pertumbuhan sebesar 5%, antara lain pada tahun 1990-1993, 2001-2003, dan 2009-2014. Pertumbuhan tersebut juga dapat terjadi dengan catatan bahwa terdapat kondisi yang stabil dan mendukung baik secara domestik maupun global.

Dibandingkan negara-negara lain di ASEAN, saat ini pertumbuhan ekonomi Vietnam menjadi yang tertinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong cukup sejalan dengan negara lainnya...

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Secara umum, pertumbuhan di *Emerging Markets* memang cenderung lebih

tinggi dibandingkan dengan kelompok negara *Advanced Economies*. Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kompetitif dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2023, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,05%, lebih tinggi dibandingkan Malaysia (3,7%), Thailand (1,9%), dan Singapura (1,1%). Namun demikian, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja pertumbuhan yang sangat agresif, dengan capaian 6,2%–6,5% pada tahun 2023 dan konsisten menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan.

Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan beberapa negara *emerging markets* lainnya, kinerja Indonesia juga tergolong solid. Brazil mengalami pertumbuhan yang relatif fluktuatif dan dalam lima tahun terakhir rata-rata berada di bawah 3%. Korea Selatan, meskipun termasuk dalam kategori negara maju, mencatatkan pertumbuhan yang moderat, berkisar antara 2% hingga 3% per tahun. Sementara itu, Jepang menghadapi tantangan struktural seperti populasi menua dan deflasi, sehingga pertumbuhan ekonominya cenderung stagnan dan sering kali berada di bawah 1%.

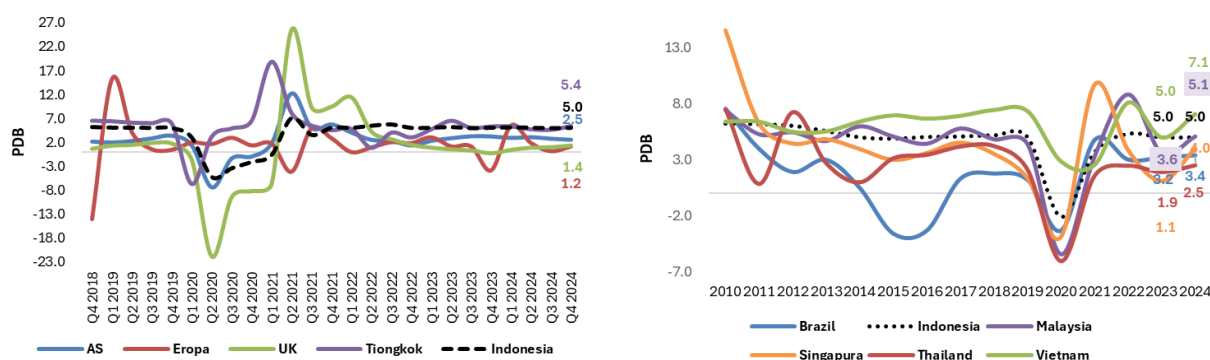
Dengan demikian, dalam konteks global maupun regional, Indonesia menempati posisi yang cukup kuat dan stabil dalam hal pertumbuhan ekonomi, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan daya saing, khususnya dibandingkan negara-negara dengan laju pertumbuhan lebih tinggi seperti Vietnam.

Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam telah menjelma menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan paling dinamis di kawasan ASEAN. Menurut proyeksi Asian Development Bank (ADB), ekonomi Vietnam diperkirakan tumbuh sebesar 6,6% pada tahun 2025, sementara International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan sebesar 6,1% pada tahun yang sama, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk *emerging market* akibat penerapan tarif impor AS (menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya sebesar 6,5%). Pertumbuhan ini didorong oleh strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industri manufaktur, investasi asing langsung (FDI), dan ekspor.

Vietnam berhasil menarik FDI dalam jumlah besar berkat kebijakan ekonomi yang terbuka, insentif fiskal yang kompetitif, serta reformasi struktural yang konsisten. Stabilitas politik dan kepastian hukum turut memperkuat posisi Vietnam sebagai destinasi investasi yang menarik, terutama di tengah relokasi rantai pasok global dari Tiongkok ke negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah. Selain itu, integrasi Vietnam dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas sehingga memperluas akses pasar ekspor, yang semakin memperkokoh peran sektor eksternal dalam mendukung pertumbuhan ekonominya.

Dengan kombinasi antara strategi industrialisasi yang terarah, keterbukaan terhadap investasi asing, dan stabilitas makroekonomi, Vietnam dipandang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Tenggara.

Grafik 3 Perkembangan PDB Indonesia dibandingkan Negara Lain

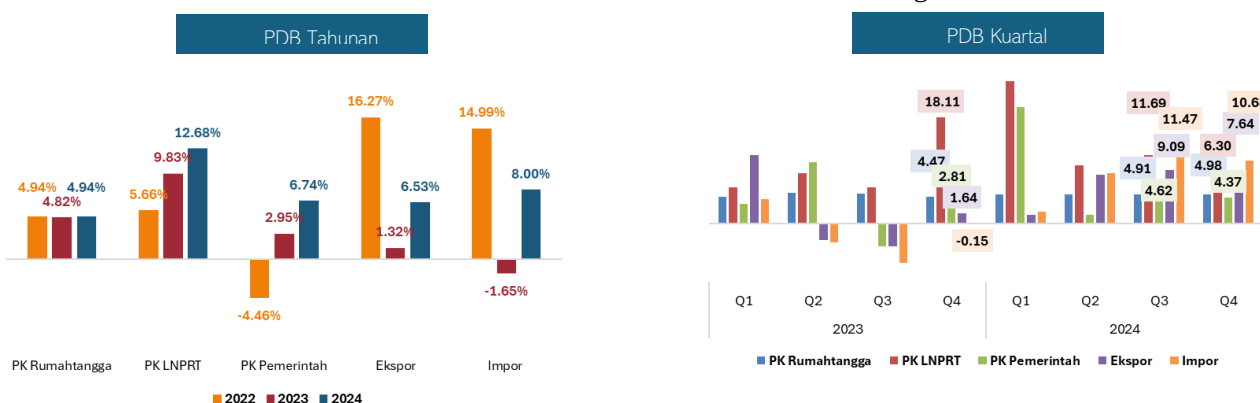


Sumber: CEIC

Konsumsi masyarakat sebagai komponen pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini...

Sumber pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa. Pada triwulan IV 2024, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi komponen terbesar penyumbang PDB dari segi pengeluaran dengan porsi 52,52% dengan pertumbuhan sebesar 4,98% yang meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III sebesar 4,47%. Komponen penyumbang PDB terbesar kedua yaitu Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang menyumbang porsi 32,08% dengan pertumbuhan 4,33% menurun dibandingkan triwulan III yang mampu tumbuh 5,02%. Selanjutnya, ekspor barang dan jasa memiliki porsi sebesar 25,14% dengan pertumbuhan sebesar 7,64% pada triwulan IV melesat melebihi pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu 1,64%. Di sisi lain, impor barang dan jasa menyumbang porsi 20,98% yang tumbuh cukup tinggi pada triwulan IV sebesar 10,68% dibandingkan triwulan lalu -0,15%. Sumber pertumbuhan ekonomi lainnya berdasarkan pengeluaran yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah dan konsumsi LNPRT masing-masing berkontribusi sebesar 9,48% dan 1,36% terhadap PDB dengan pertumbuhan di triwulan IV masing-masing 4,37% dan 6,30%.

Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan Pengeluaran



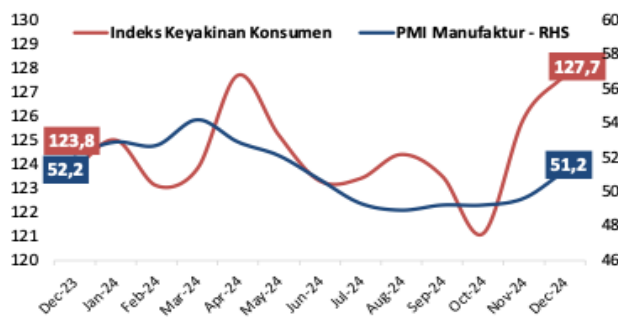
Sumber: BPS

Jika dilihat ke belakang, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai signifikan sejak tahun 1967, seiring dengan dimulainya pembangunan ekonomi yang lebih terstruktur dan berorientasi pada pertumbuhan. Sejak saat itu, konsumsi menjadi pendorong utama PDB, dengan kontribusi yang terus konsisten. Sepanjang tahun 2024, konsumsi rumah tangga tercatat menyumbang sekitar 54,04% terhadap total PDB nasional, menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global. Peran konsumsi domestik yang kuat inilah yang turut menopang ketahanan ekonomi Indonesia secara umum.

Sebagai salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, tingkat konsumsi rumah tangga pada awal 2025 masih menunjukkan pelemahan yang dipengaruhi oleh masih melemahnya kondisi daya beli masyarakat. Pelemahan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah telah terjadi sejak tahun 2024 yang dapat terlihat dari berbagai hal antara lain meningkatnya tingkat pengangguran dan kesenjangan ekonomi, melemahnya penjualan, dan kinerja industri manufaktur yang berkontraksi. Jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan secara gradual sejak pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, jumlah masyarakat kelas menengah mencapai 23% atau 60 juta jiwa (2014-2018). Sedangkan setelah pandemi, pada tahun 2023 jumlah tersebut menurun hingga menyentuh 18,8% atau 52 juta jiwa. Penurunan populasi kelas menengah yang kemudian masuk ke kelompok “calon kelas menengah” dan “rentan”, memperkuat indikasi tingkat kemakmuran masyarakat menengah ke bawah yang semakin menurun. Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat masyarakat kelas menengah merupakan kelompok pembelanja rumah tangga yang besar dan cepat sehingga menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi.

Kinerja industri manufaktur (PMI Manufaktur) yang perlahan mulai merangkak naik pada Desember '24, sempat mengalami penurunan sejak April s.d November 2024 yang mengakibatkan penurunan profit Perusahaan manufaktur sehingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak Januari – Desember 2024 angka PHK hampir mencapai 80.000 orang yang tentunya bukan jumlah yang sedikit. Hal ini mengakibatkan meningkatnya tenaga kerja yang memasuki sektor informal dan memengaruhi tingkat daya beli, mengingat sektor ini tidak memiliki penghasilan yang tetap sehingga masyarakat cenderung menahan diri untuk melakukan konsumsi.

Grafik 5 Indeks Keyakinan Konsumen dan PMI Manufaktur Indonesia



Sumber: BI, Reuters

Dampak rembetan dari efisiensi anggaran terhadap pertumbuhan konsumsi masyarakat dan perekonomian juga tetap perlu diwaspadai...

Salah satu kebijakan di awal pemerintahan Presiden baru yaitu rencana efisiensi yang telah diputus melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang memangkas anggaran besar-besaran senilai Rp306,69 T. Sebanyak Rp256,1 T merupakan pemangkasan dari anggaran Kementerian/Lembaga dan sisanya berasal dari pemangkasan transfer daerah. Adapun lima Kementerian dengan pemangkasan anggaran terbesar dari total pagu anggaran tiap Kementerian tahun ini yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dipangkas 73,34%, Otorita IKN dipangkas 75,2%, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dipangkas 69,4%, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dipangkas 62,9%, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dipangkas 57,8%. Efisiensi anggaran ini diklaim untuk mendukung program unggulan pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan sosial.

Pemangkasan anggaran yang cukup masif ini tentunya memiliki dampak terhadap berbagai program yang telah direncanakan di masing-masing Kementerian. Sebagai contoh, proyek infrastruktur strategis di Kementerian PU terancam keberlanjutannya yang justru dapat menyerap banyak tenaga kerja pada sektor konstruksinya, Kemendiknas terpaksa mengurangi program riset di tengah semangat Indonesia untuk mengejar ketertinggalan Teknologi, BRIN terpaksa harus menghentikan langganan data satelit yang digunakan untuk “*earth observation*” khususnya sistem pemetaan permukiman kumuh perkotaan dan survei nasional, serta Kemenhub juga akhirnya harus mengurangi subsidi transportasi umum yang dapat menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang kesehariannya bergantung pada transportasi umum.

Di sisi lain, peralihan anggaran efisiensi untuk pelaksanaan program MBG sebenarnya diharapkan dapat memberikan efek rembetan lainnya utamanya kepada UMKM di masing-masing daerah. Melalui pelaksanaan MBG, diharapkan dapat menghidupkan usaha-usaha terkait produksi makanan dan minuman, sehingga pelaksanaan program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara lebih luas. Untuk itu, dalam pelaksanaan program tersebut perlu dipertimbangkan pemilihan *vendor* dan *supplier* yang tepat, penjadwalan dan pembayaran yang tepat waktu, penggunaan sumber daya yang mempertimbangkan kondisi dan keunggulan daerah, serta tata kelola yang baik dan berintegritas, serta tetap mengedepankan kualitas makanan, kebersihan, dan komposisi gizi sesuai judul program yaitu “Makan Bergizi Gratis”.

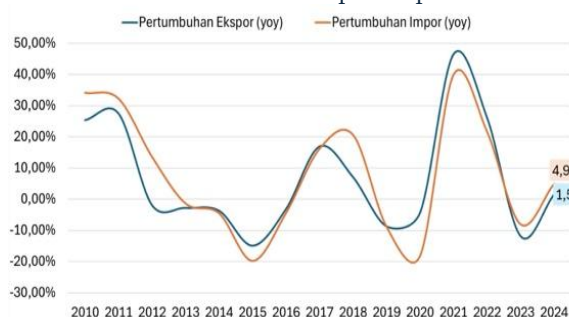
Indonesia masih menunjukkan surplus perdagangan dan pertumbuhan investasi asing, namun diperlukan perbaikan iklim investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi...

Indonesia sendiri merupakan negara dengan keterbukaan ekonomi yang cukup tinggi, ditandai dengan partisipasinya dalam pasar global dan keterlibatannya dalam perdagangan internasional. Nilai ekspor dan impor Indonesia juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Selama 10 tahun terakhir, ekspor dan impor Indonesia menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan domestik. Ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu

bara, dan produk elektronik, dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara ASEAN sebagai mitra utama. Meskipun mengalami penurunan pada beberapa tahun, ekspor Indonesia tetap menunjukkan tren positif secara keseluruhan, terutama pada tahun-tahun dengan kenaikan harga komoditas global. Impor Indonesia sebagian besar terdiri dari bahan baku dan barang modal untuk mendukung sektor industri, dengan Tiongkok sebagai negara asal impor terbesar. Selama periode ini, Indonesia mencatatkan defisit perdagangan pada beberapa tahun, namun tetap berusaha mempertahankan keseimbangan perdagangan melalui diversifikasi pasar ekspor dan upaya efisiensi impor.

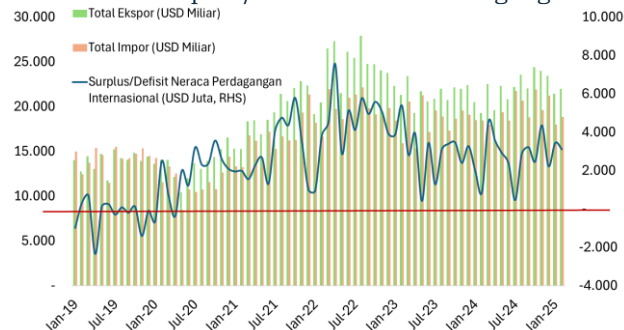
Neraca perdagangan pada Desember 2024 masih mencatatkan surplus yaitu sebesar USD 2,24 miliar yang menjadikan surplus selama 56 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus didorong oleh kinerja ekspor yang lebih tinggi (USD 23,46 miliar) daripada impor (USD 21,22 miliar) pada Desember 2024. Dari surplus tersebut USD 1,76 miliar tercatat dari defisit migas dan USD 4 miliar dari surplus non migas.

Grafik 6 Pertumbuhan Ekspor Impor Indonesia



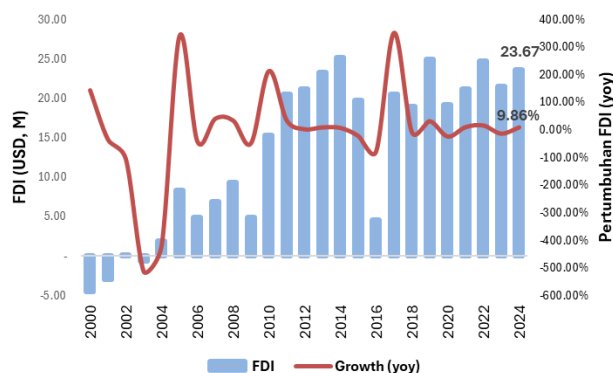
Sumber: BPS, diolah

Grafik 7 Surplus/Defisit Neraca Perdagangan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 8 Pertumbuhan FDI Indonesia



Sumber: BPS, diolah

Selain itu, *Foreign Direct Investment* (FDI) Indonesia juga cukup berkembang. Pada tahun 2010, FDI Indonesia naik cukup signifikan. Kenaikan itu disebabkan oleh stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga pasca pemilu 2009, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil sekitar 6%. Selain itu, pemulihan ekonomi global pasca krisis 2008 membuat investor asing kembali melirik pasar berkembang seperti Indonesia yang memiliki pasar domestik besar dan potensi pertumbuhan tinggi. Peningkatan peringkat kredit dari Moody's dan

Fitch, reformasi regulasi investasi, dan tingginya harga komoditas juga turut mendorong masuknya modal asing. Selama 10 tahun terakhir, FDI Indonesia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kebijakan domestik. FDI Indonesia sempat turun tajam terutama pada 2016, akibat ketidakpastian politik dan kebijakan yang kurang mendukung. Namun, sejak 2017, FDI mulai pulih seiring dengan reformasi kebijakan investasi, seperti Omnibus Law dan kebijakan pro-bisnis lainnya, serta peningkatan infrastruktur yang menarik minat investor asing. Meskipun ada penurunan pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, FDI kembali mencatatkan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan sektor-sektor utama yang menarik investasi asing mencakup manufaktur, infrastruktur, dan sektor energi. Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, FDI Indonesia menunjukkan tren pemulihan dan perbaikan yang positif sepanjang dekade terakhir.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% adalah pengembangan investasi, yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), realisasi investasi sepanjang tahun 2024 sebesar Rp 1.714,2 T atau naik sebesar 20,8% (yoy) dengan komposisi Rp 895,4 T (52,2%) investasi di luar Pulau Jawa dan Rp 818,8 T (47,8%) investasi di Pulau Jawa. Jika dilihat dari jenis penanaman modalnya, PMA berkontribusi sebesar 52,5% dan sisanya 47,5% PMDN. Terdapat lima besar negara asal PMA sepanjang tahun 2024 yaitu Singapura (USD 20,1M), Hongkong (USD 8,2M), Tiongkok (USD 8,1M), Malaysia (USD 4,2M) dan US (USD 3,7M). Realisasi PMA sepanjang tahun 2024 disalurkan kepada subsektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar 22,6%, dilanjutkan subsektor pertambangan sebesar 8,6%, industri kertas dan percetakan 8%, Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (7,8%), dan Industri Kimia dan Farmasi (6,9%). Sedangkan realisasi PMDN pada tahun 2024 kepada subsektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (14,8%), pertambangan (13,1%), Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran (9,4%), Jasa lainnya (8,1%), dan Industri makanan (8,1%).

Perkembangan realisasi investasi pada triwulan-IV 2024 sebesar Rp452,8 triliun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (yoy) yaitu Rp365,8 triliun dan triwulanan sebelumnya (qtq) sebesar Rp431,4 triliun. Namun kenaikan penanaman modal ini belum berdampak signifikan untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data BKPM, di balik kenaikan realisasi investasi tersebut, penyerapan tenaga kerja justru menurun sejak triwulan III dan triwulan IV tahun 2024, meskipun masih meningkat jika dibandingkan triwulan yang sama tahun 2023. Penyerapan tenaga kerja pada triwulan II-2024 mencapai 677.623 orang menurun menjadi 650.172 pada triwulan III-2024 dan akhirnya menjadi 580.196 pada triwulan IV-2024. Hal ini dapat dimungkinkan terjadi karena investasi tidak disalurkan kepada industri “padat karya” seperti manufaktur dan infrastruktur. Berdasarkan angka penyaluran baik PMA maupun PMDN, investor terlihat masih tertarik pada industri lain di luar keduanya.

Meski capaian realisasi investasi pada tahun 2024 melebihi target pemerintah dan mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 20,8%, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menarik minat investor untuk melakukan investasi di dalam negeri. Berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking (WCR) in 2024, Indonesia menduduki posisi ke 27 dari 67 negara dengan skor 71.52 dari 100. IMD World Competitiveness

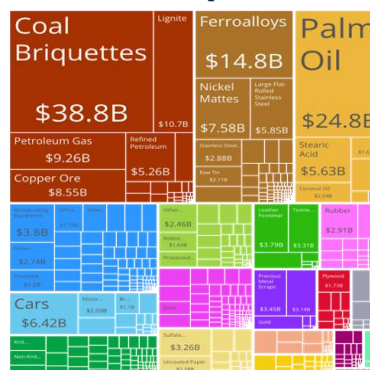
Ranking menganalisis dan memeringkat kapasitas negara-negara untuk menciptakan dan memelihara lingkungan yang mendukung daya saing Perusahaan. IMD World Competitiveness Ranking membagi empat faktor utama sebagai penilaian yaitu kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan infrastruktur. Dari keempat faktor tersebut masih dibagi menjadi 20 subfaktor yang terdiri dari 336 kriteria. Kriteria berupa data keras (daya saing yang dapat diukur misal PDB), data lunak (daya saing yang dipersepsikan misal manajer yang kompeten), dan data survei.

Berdasarkan data IMD WCR, peringkat Indonesia mengalami kenaikan setelah sempat jatuh pada tahun 2022 menjadi peringkat 44 dari sebelumnya berada di peringkat 37. Tahun 2023 ranking Indonesia meningkat menjadi urutan ke 34 dan tahun 2024 menduduki peringkat 27. Peringkat tersebut didasarkan pada hasil penilaian keempat faktor utama. Faktor utama pertama yaitu kinerja utama Indonesia menduduki ranking 24 yang didorong oleh kinerja ekonomi domestik dan harga yang cukup baik. Namun subfaktor lain menunjukkan penurunan performa dan tentunya perlu perbaikan yaitu **perdagangan internasional, investasi internasional, dan lapangan pekerjaan**. Faktor utama kedua yaitu efisiensi pemerintah berada pada posisi 23. Ranking yang cukup baik ini didorong oleh kebijakan pajak dan *public finance* yang dirasa baik. Namun subfaktor menunjukkan perlunya **evaluasi yaitu kerangka kerja institusional, kerangka kerja masyarakat, dan aturan legal bisnis Indonesia yang dinilai sangat perlu diperbaiki**. Faktor ketiga yaitu efisiensi bisnis menduduki posisi cukup baik yaitu peringkat 14 yang didorong oleh beberapa subfaktor seperti labor market Indonesia yang sangat menjanjikan, sikap dan nilai yang dijunjung tinggi masyarakat, dan praktik manajemen yang cukup baik. Namun, terdapat subfaktor yang menjadi perhatian yaitu **permasalahan keuangan serta tingkat produktivitas dan efisiensi masih cukup rendah**. Faktor utama yang terakhir yaitu infrastruktur yang berada pada ranking paling rendah dibandingkan ketiga faktor utama sebelumnya, yaitu peringkat 52. Dibalik itu subfaktor pembentuk faktor ini memiliki penilaian yang cukup tidak memuaskan serta membutuhkan tindakan evaluasi dan perbaikan nyata dari pemerintah **seperti infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, dan infrastruktur ilmiah**. Bahkan penilaian terhadap **kebutuhan dasar masyarakat** yaitu pendidikan serta kesehatan dan lingkungan mendapat penilaian yang rendah.

Peluang diversifikasi komoditas ekspor dapat menunjang pertumbuhan ekonomi...

Dikutip dari BPS, komoditas unggulan Indonesia masih didominasi oleh batu bara, minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, serta besi dan baja. Ketiganya berkontribusi sebesar 31,71% terhadap total ekspor non migas yang mengalami surplus pada Desember 2024.

Grafik 9 Produk Ekspor Indonesia 2023



Sumber: oecworld, BPS

Namun jika dilihat dari trennya, ketiga komoditas tersebut cukup berfluktuasi. Harga CPO terpantau mengalami kenaikan sejak Juli 2024, serta baik yoy maupun mtm. Harga rata-rata CPO sebesar US\$1.146,27 per ton, naik dari US\$1.090,53 per ton pada November 2024 dan US\$833,63 per ton pada Desember 2023. Di sisi lain, harga batu bara juga mengalami kenaikan pada bulan Desember 2024 dengan nilai ekspor sebesar US\$2,69 miliar meningkat 2,81% dibandingkan bulan November 2024, namun menurun nilai ekspornya dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Sedangkan untuk nilai ekspor besi dan baja pada Desember 2024 ini menurun 1,14% dibandingkan bulan sebelumnya, namun meningkat 3,82% dibandingkan Desember tahun sebelumnya.

Berdasarkan publikasi Kementerian Perdagangan, terdapat sinyal ekspor sektor pertanian dan industri mengalami peningkatan pada 2024. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan tertinggi ekspor nonmigas berupa kakao dan olahannya sebesar 118,63%, aluminium dan barang daripadanya sebesar 70,07%, kopi, teh dan rempah-rempah sebesar 67,27%. Selain itu, komoditas ekspor nonmigas yang mendorong pertumbuhan yaitu produk manufaktur (porsi: 23,91%) tumbuh pesat dari 3,43% menjadi 16,42%, komoditas nikel (porsi: 3,64%) yang tumbuh sebesar 53,53% dan peralatan Listrik (porsi: 3,64%) yang tumbuh sebesar 45,34% setelah berkontraksi pada periode sebelumnya.

Dari komoditas nonmigas tersebut, terdapat beberapa *opportunity* yang dapat diambil dan dikembangkan oleh pemerintah, antara lain dengan **merealisasikan rencana hilirisasi**, salah satunya untuk komoditas nikel. Tujuan utama dari hilirisasi yaitu meningkatkan nilai tambah ekspor, yaitu dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nikel sedang menjadi *hot commodity* terkait dengan berkembangnya *Electronic Vehicle* (EV). Hal ini mengingat Nikel menjadi bahan utama baterai lithium EV dan Indonesia merupakan penghasil Nikel terbesar. Hilirisasi bisa dimulai dari penambangan, kemudian pembangunan smelter, lalu tahap memproduksi dan merakit baterai, hingga daur ulang baterai. Sehingga di setiap tahapnya, pemerintah Indonesia dapat memiliki peran untuk pengembangan industri.

Kedua, perlunya **transformasi sektor manufaktur**. Sektor ini merupakan salah satu penyerap tenaga kerja yang cukup signifikan dan menghasilkan produk ekspor yang cukup menjadi andalan Indonesia. Sektor manufaktur khususnya di Indonesia saat ini sedang menghadapi masa sulit. Berdasarkan hasil pengamatan McKinsey, ketahanan rantai pasok global saat ini mengalami disrupsi namun tetap saling terhubung. Oleh sebab itu Indonesia sebaiknya memanfaatkan interkoneksi dengan negara terkait sambil mengelola risiko. Peningkatan infrastruktur transportasi dan logistik diperlukan untuk mendorong ekspor dari sektor manufaktur.

Ketiga, perlunya melakukan **digitalisasi UMKM menuju global**. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi dan mengawal program digitalisasi UMKM agar mampu memiliki daya saing global sebagai contoh memanfaatkan platform *e-commerce* agar produk UMKM lebih mudah dipasarkan dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Perekonomian Indonesia masih didominasi sektor ekonomi yang sama, namun terdapat beberapa perubahan di dalam masing-masing sektor...

Perekonomian Indonesia dalam 15 tahun terakhir masih didominasi oleh lima sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan; sektor perdagangan; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor konstruksi; serta sektor pertambangan. Kelima sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam kontribusinya terhadap PDB nasional serta dalam penyerapan tenaga kerja. Dominasi kelima sektor ini menunjukkan bahwa tidak

terdapat perubahan ekonomi yang signifikan secara struktural dalam kurun waktu tersebut. Namun, terdapat *shifting* dalam beberapa sektor yang diharapkan dapat memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian.

Industri pengolahan masih menjadi penopang utama PDB dengan porsi tertinggi di antara sektor-sektor lain sebesar 20,27%, disusul oleh perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi sebesar 13,02% terhadap PDB. Meskipun kedua sektor ini memiliki porsi terbesar terhadap PDB namun pertumbuhan kedua sektor tersebut masih tergolong moderate (<5%). Oleh karena itu, pemerintah perlu menaruh perhatian pada kedua sektor yang *high potential* ini dengan memaksimalkan pertumbuhannya agar mencapai *high growth* (>5%) dan berkontribusi secara maksimal pula terhadap PDB. Hal ini juga mengingat bahwa kedua sektor tersebut juga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung program hilirisasi (proses mengolah *raw material* menjadi barang setengah jadi bahkan menjadi barang jadi) yang masih menjadi semangat pemerintahan baru.

Beberapa subsektor ekonomi menunjukkan potensi tinggi untuk didorong guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya adalah industri manufaktur kertas, yang diproyeksikan memiliki *capital expenditure* (CAPEX) tinggi. Hal ini tecermin dari ekspansi bisnis oleh perusahaan-perusahaan besar di industri kertas melalui pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Permintaan global terhadap produk kertas yang terus meningkat terutama karena pergeseran dari plastik ke kertas yang lebih ramah lingkungan. Selain industri kertas, keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam juga menjadi penggerak penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas nasional dan memperkuat perekonomian.

Prospek industri otomotif ke depan cukup menjanjikan, terutama pada kendaraan *hybrid* yang semakin diminati karena dinilai lebih irit bahan bakar dan lebih terjangkau dibandingkan kendaraan listrik (EV), yang pasarnya masih terbatas akibat infrastruktur pendukung yang belum memadai. Industri mesin dan elektronik juga memiliki prospek positif, didorong oleh penerapan kebijakan minimal serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada produk *handphone*, laptop, dan tablet, yang diharapkan mendorong pertumbuhan produksi dalam negeri. Selain itu, industri kulit dan alas kaki sebagai salah satu sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 juga dinilai memiliki potensi pertumbuhan yang baik, tercermin dari peningkatan investasi dan peluang ekspor seiring dengan dikenakannya tarif impor AS terhadap produk tekstil dari Tiongkok dan Meksiko. Namun, tantangan tetap perlu diwaspadai, seperti pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya impor bahan baku, terutama di industri otomotif, serta lemahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan kontraksi penjualan kendaraan bermotor pada triwulan IV-2024, baik secara *wholesales* maupun ritel. Untuk industri kulit dan alas kaki, risiko juga muncul dari potensi pergeseran pasar negara eksportir besar ke Indonesia yang dapat memperketat persaingan di pasar domestik.

Selain itu, diversifikasi pada industri yang bersifat padat karya maupun yang memberikan *multiplier effect* kepada masyarakat juga perlu didorong, sehingga pertumbuhan ekonomi dari investasi maupun ekspor impor dapat dirasakan efeknya lebih luas ke masyarakat. Perluasan efek industrialisasi kepada masyarakat akan mencegah ketimpangan sosial yang lebih tinggi, serta meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat yang nantinya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Sektor pertambangan, yang sebelumnya didominasi oleh ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan bijih nikel, mengalami perubahan dengan adanya

kebijakan hilirisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menerapkan kebijakan yang mewajibkan proses pengolahan terlebih dahulu sebelum ekspor dilakukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut serta memperkuat daya saing industri dalam negeri. Kebijakan ini terutama terlihat pada industri nikel, yang kini mulai berkembang menjadi basis produksi baterai kendaraan listrik.

Di tengah pergeseran menuju energi terbarukan, sektor batubara masih menunjukkan potensi tren pertumbuhan dengan emiten tambang yang mengalokasikan CAPEX besar untuk membiayai proyek ekspansi, seperti pembangunan smelter dan pembangkit listrik. Permintaan batubara diperkirakan masih akan meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri, pertumbuhan permintaan listrik diproyeksi masih cukup tinggi seiring dengan program pembangunan 3 juta rumah, serta kebutuhan listrik untuk mendukung program hilirisasi industri. Sementara itu, di pasar global, permintaan ekspor batubara diharapkan masih cukup baik terutama oleh Tiongkok dan India.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga masih perlu dioptimalkan mengingat kontribusinya mencapai 11% terhadap PDB yang menjadikannya salah satu pilar perekonomian Indonesia. Kinerja baik sektor ini diharapkan turut mendorong industri pengolahan melalui peningkatan nilai tambah produk olahan. Peluang ekspor juga terbuka lebar seiring kebijakan tarif impor AS terhadap negara lain, yang dapat dimanfaatkan Indonesia melalui kerja sama perdagangan. Selain itu, program swasembada pangan pemerintah menjadi potensi tambahan dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, sektor ini tetap dihadapkan pada tantangan seperti perubahan iklim, kenaikan harga pupuk akibat geopolitik, dan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga ketahanan sektor ini.

Namun demikian, terdapat juga sektor yang kontribusinya terhadap PDB relatif rendah, tetapi tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir sehingga porsinya terhadap PDB pun meningkat. Salah satu sektor tersebut adalah sektor transportasi dan pergudangan, yang pada tahun 2024 mencatat pertumbuhan sebesar 8,69% (yoy) dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 4,88%. Bahkan, pada tahun 2022, sektor ini mengalami lonjakan pertumbuhan hingga 19,87% (yoy), menunjukkan peningkatan signifikan dalam perannya terhadap ekonomi nasional.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia juga semakin masif dalam satu dekade terakhir. Menurut Portal Informasi Indonesia⁵, dalam 10 tahun terakhir pemerintah telah membangun 2.103 km jalan tol, 40 bendungan, dan 27 bandara baru. Sejalan dengan pembangunan tersebut, diharapkan konektivitas antarwilayah meningkat sehingga memperlancar distribusi barang dan jasa serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Sama halnya dengan sektor transportasi dan pergudangan, sektor informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada tahun 2024, sektor ini tumbuh sebesar 8,56% (yoy), dan pada tahun 2022 bahkan mencapai pertumbuhan sebesar 11,94% (yoy). Dalam 15 tahun terakhir, kontribusi sektor ini terhadap PDB meningkat cukup tinggi, dari hanya 3,83% pada tahun 2010 menjadi 7,02% pada tahun 2024. Pesatnya pertumbuhan kedua sektor tersebut tidak terlepas dari digitalisasi ekonomi yang semakin masif. Penggunaan *e-commerce* dan *fintech* yang semakin luas

⁵<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8648/10-tahun-pembangunan-infrastruktur-menghubungkan-nusantara-menggerakkan-ekonomi?lang=1>

telah meningkatkan permintaan terhadap layanan internet sebagai infrastruktur digital serta jasa transportasi dan pergudangan untuk memperlancar proses perdagangan bagi para pelaku *e-commerce*.

Sektor ekonomi digital juga menunjukkan proyeksi pertumbuhan yang sangat tinggi, dengan CAPEX diperkirakan tumbuh lebih dari 30%. Hal ini didorong oleh semakin luasnya penggunaan *e-commerce* dan layanan *fintech* oleh masyarakat. Pertumbuhan ini memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait seperti sektor perdagangan, sektor transportasi, pergudangan, komunikasi, dan sektor perantara keuangan. Integrasi antara teknologi digital dan kegiatan ekonomi konvensional diharapkan menciptakan ekosistem baru yang mampu meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, serta mendorong inklusi keuangan dan ekonomi yang lebih merata.

Secara umum, ekonomi Indonesia telah mengarah ke ekonomi yang lebih berbasis industri, digital, dan jasa. Namun, untuk mempercepat kemajuan ekonomi dan meningkatkan daya saing, diperlukan inovasi yang lebih agresif dalam berbagai sektor. Dibutuhkan sinergi serta langkah-langkah strategis oleh Pemerintah agar Indonesia mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersaing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

Indonesia memiliki keunggulan dan kesempatan tersendiri di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian saat ini...

Di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global maupun domestik saat ini, muncul tantangan lain yang dihadapi. Belum lama ini Presiden AS terpilih, Donald Trump mengumumkan *reciprocal tariffs* yang diberlakukan terhadap 180 negara. Selang beberapa hari, Presiden Trump mengumumkan bahwa melakukan penundaan pengenaan tarif tersebut untuk semua negara kecuali Tiongkok selama 90 hari. Nama Indonesia turut muncul dalam daftar tersebut dan rencananya akan dikenakan tarif sebesar 32% untuk barang ekspor Indonesia yang dijual di AS. Beberapa negara ASEAN lainnya dikenakan tarif yang lebih tinggi dari Indonesia, namun ada pula yang dikenakan tarif lebih rendah seperti negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam sebesar 24%, Filipina sebesar 17%, dan Singapura hanya 10%. Penerapan *reciprocal tariffs* ini memicu babak awal *trade war* dimulai dan membawa dampak negatif bagi Indonesia seperti tekanan signifikan terhadap nilai tukar Rupiah yang mencapai Rp 16.670/USD (berdasarkan kurs jual Bank Indonesia) pada tanggal 7 April 2025. Dampak lain yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi yang menurunnya permintaan terhadap produk-produk Indonesia karena harga menjadi semakin mahal imbas terkena *reciprocal tariffs*. *Demand* yang menurun, biaya ekspor meningkat, daya saing yang menurun, menyebabkan produktivitas pabrik-pabrik menurun sehingga dapat menimbulkan ancaman gelombang PHK.

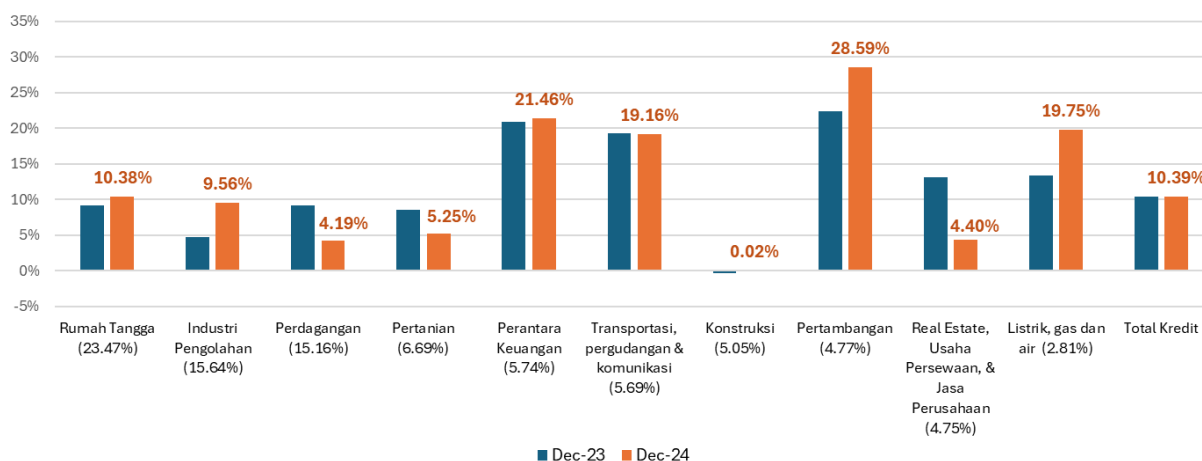
Namun, di balik *challenge* tersebut tentunya terdapat *opportunity* yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendorong kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Belajar dari kejadian tahun 1980, ketika salah satu komoditas utama menurun prospeknya, pemerintah harus bergerak cepat melakukan langkah-langkah strategis seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan reformasi regulasi. Selain itu, penting untuk melihat peluang sektor ekonomi yang masih memiliki prospek maupun peluang yang dimiliki sektor ekonomi lain. Kebijakan ekonomi yang jelas dan realistis sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan mengurangi ketidakpastian. Tarif tinggi yang dikenakan AS dapat memotivasi untuk lebih mempererat kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara lain seperti

sesama ASEAN, Uni Eropa, India, dan negara mitra dagang Indonesia lainnya. Program penguatan sektor keuangan dan cadangan devisa perlu direalisasikan untuk meningkatkan likuiditas di pasar keuangan dan mengantisipasi dampak fluktuasi nilai tukar Rupiah, serta untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Di tengah berbagai risiko dan ketidakpastian kondisi global dan domestik, kondisi intermediasi perbankan Indonesia masih relatif solid...

Sampai dengan akhir tahun 2024, kinerja kredit perbankan Indonesia masih menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan *double digit*. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kredit produktif yang mencerminkan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Kredit produktif tumbuh sebesar 10,31% (yoy), dengan pertumbuhan kredit investasi yang lebih tinggi, yakni sebesar 13,62% (yoy). Hal ini menjadi sinyal bahwa pelaku usaha, terutama kalangan korporasi, masih memiliki keyakinan untuk melakukan ekspansi bisnis. Berdasarkan kategori debitur, kredit kepada korporasi mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 15% (yoy), sementara kredit kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan tren perlambatan. Di sisi lain, kredit konsumsi juga tetap tumbuh dengan baik sebesar 10,61% (yoy), namun perlu diwaspadai risiko kredit konsumsi yang cenderung meningkat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Grafik 10 Pertumbuhan Kredit 10 Sektor Ekonomi dengan Porsi Kredit Terbesar (yoy)



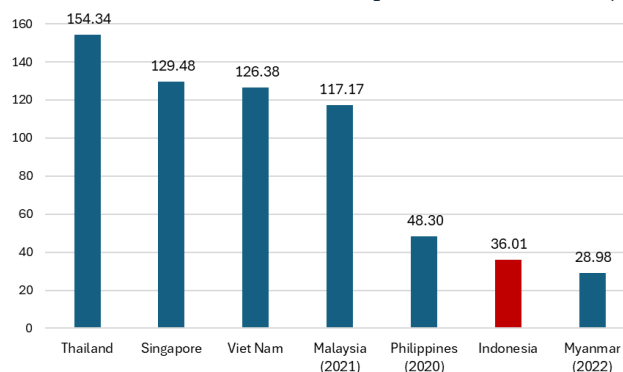
Sumber: LBUT, diolah

Dari sisi sektor ekonomi, kredit kepada sektor industri pengolahan, yang merupakan sektor dengan porsi kredit terbesar (15,64%), menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit. Kredit pada sektor ini tumbuh sebesar 9,56% (yoy), naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 4,72% (yoy). Selain itu, beberapa sektor lainnya turut menjadi motor pertumbuhan kredit dengan laju pertumbuhan yang tinggi, bahkan melebihi 19% (yoy). Sektor-sektor tersebut antara lain sektor pertambangan, sektor perantara keuangan, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air. Tingginya pertumbuhan kredit pada sektor-sektor ini mencerminkan arah ekonomi Indonesia yang semakin bergerak ke sektor berbasis energi, logistik, dan infrastruktur penunjang digitalisasi.

Kapasitas pembiayaan sektor riil di Indonesia masih perlu ditingkatkan...

Namun demikian, apabila dilihat dari rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (*Loan to GDP ratio*), posisi Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data World Bank⁶, rasio kredit terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 hanya di kisaran 36%. Angka ini jauh di bawah Thailand yang mencapai 154%, serta Singapura, Vietnam, dan Malaysia yang masing-masing memiliki rasio di atas 115%. Rasio kredit yang rendah menunjukkan bahwa kapasitas pembiayaan sektor riil oleh lembaga keuangan di Indonesia masih terbatas. Padahal, penyaluran kredit berperan penting untuk menggerakkan sektor riil sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Grafik 11 Rasio Kredit terhadap PDB Tahun 2023 (%)



Sumber: World Bank

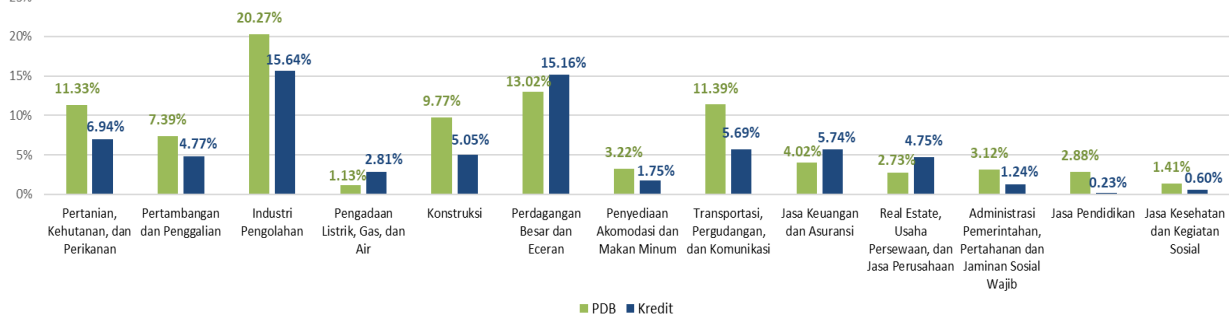
Sebagai perbandingan, Vietnam merupakan contoh negara yang berhasil meningkatkan rasio kredit terhadap PDB secara signifikan. Pada tahun 2012, rasio kredit Vietnam tercatat sebesar 75%, dan berhasil naik menjadi 126% pada tahun 2022. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi agresif pemerintah Vietnam dalam mendorong sektor ekspor, memperkuat industri manufaktur, dan menciptakan ekosistem investasi yang menarik bagi investor asing. Hasilnya, Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7% (yoy) pada tahun 2024, didorong oleh ekspansi ekspor barang elektronik, tekstil, dan produk manufaktur lainnya. Pemerintah Vietnam juga memberikan insentif bagi pelaku industri dan penyederhanaan perizinan usaha untuk menarik investasi langsung asing (FDI).

Untuk dapat bersaing dengan negara-negara tetangga tersebut, Indonesia membutuhkan perubahan mendasar dalam banyak aspek. **Reformasi birokrasi** menjadi salah satu elemen kunci, terutama dalam menciptakan **iklim usaha yang ramah investasi**. Selain itu, **kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap investor** perlu diperkuat agar mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha domestik maupun asing. Salah satu indikator penting efisiensi investasi adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,33%, artinya untuk menghasilkan pertumbuhan 1% dibutuhkan investasi yang relatif besar. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ICOR negara-negara ASEAN lain yang berada di kisaran 4%–5%. Tingginya ICOR menunjukkan rendahnya efisiensi investasi di Indonesia, yang bisa menjadi faktor penghambat dalam menarik modal asing.

⁶ Domestic credit to private sector by banks (% of GDP) by World Bank

Selain itu, masih terdapat peluang untuk mendorong sektor riil, khususnya sektor produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB namun porsi penyaluran kredit di sektor tersebut masih relatif rendah. Artinya, terdapat ruang untuk optimalisasi pembiayaan perbankan pada beberapa antara sektor antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 11,33% terhadap perekonomian Indonesia, sementara porsi penyaluran kreditnya hanya di angka 6,94%. Sama halnya dengan sektor transportasi, perdagangan, dan komunikasi yang berkontribusi sebesar 11,39% namun porsi penyaluran kreditnya sebesar 5,69%. Peningkatan penyaluran kredit pada sektor-sektor tersebut diharapkan dapat mendorong investasi yang pada akhirnya akan mempercepat perputaran ekonomi.

Grafik 12 Perbandingan Porsi Kredit dan Kontribusi PDB Tahun 2024 Berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: LBUT dan BPS, diolah

Selain perbaikan dari sisi regulasi dan efisiensi investasi, peningkatan inklusi keuangan juga sangat krusial. Akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih terbatas, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dengan meningkatkan akses keuangan, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk kegiatan produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli dan pertumbuhan konsumsi domestik. Inklusi keuangan juga akan memperluas basis nasabah perbankan dan mendorong peningkatan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang selama ini masih belum optimal. Perbaikan-perbaikan tersebut harus ditingkatkan dan dijaga keberjalanannya untuk memperkuat sektor riil yang pada akhirnya akan turut mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN I

Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
Indikator Kinerja Perbankan		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
Risiko Kredit		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
9.	Rasio <i>Loan at Risk (LaR)</i>	$\frac{\text{Restru Kredit kol. 1 + Kredit kol. 2 + Kredit NPL}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
Risiko Pasar		
10.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
11.	Rasio <i>Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)</i>	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
Risiko Likuiditas		
12.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
15.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
16.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
17.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN II

GLOSSARY

Istilah	Keterangan
A	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid ($AL = \text{Final Excess Reserve} + \text{Kas} + \text{Penempatan pada BI lainnya} + \text{Reserve Repo}$) terhadap Dana Pihak Ketiga ($DPK = \text{Tabungan} + \text{Giro} + \text{Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/DPK > 10\%$.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> ($NCD = 30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}$). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> $AL/NCD > 50\%$.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
B	
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
C	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan $(\text{modal}/\text{ATMR}) \times 100\%$, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS (<i>Bank for International Settlements</i>) sebesar minimal 8%.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Concentration Ratio</i> (CR)	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.

Istilah	Keterangan
D	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
F	
<i>Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)</i>	Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai "tersedia untuk dijual" diakui dalam pendapatan komprehensif lain.
<i>Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)</i>	Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan, yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
G	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
I	
<i>Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)</i>	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
K	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMU)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Permenko No.11 Tahun 2017).

Istilah	Keterangan
L	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	Merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Contoh: Ormas, LSM, Lembaga Keagamaan. Sumber: BPS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih (<i>Net Cash Outflow/NCO</i>) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan at Risk (LaR)</i>	<i>Loan at Risk (LaR)</i> merupakan indikator risiko atas kredit yang disalurkan yang terdiri atas kredit kolektibilitas 1 (kualitas Lancar) yang telah direstrukturisasi, kolektibilitas 2 (kualitas Dalam Perhatian Khusus), serta kredit bermasalah atau <i>Non Performing Loan (NPL)</i> .
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
M	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama (<i>Common Equity Tier 1</i>) dan modal inti tambahan (<i>Additional Tier 1</i>). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara

Istilah	Keterangan
	modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
N	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
P	
<i>Pembiayaan Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>Pembiayaan Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)

Istilah	Keterangan
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman (<i>borrowing</i>) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
R	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.

Istilah	Keterangan
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .
T	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)

Halaman ini sengaja dikosongkan



Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan
Menara Radius Prawiro, Gedung A, Lantai 10
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat
Telp: 021-29600000
e-mail: dsapi@ojk.go.id

